

**MOHAMMAD HIDAYATURRAHMAN
EDY PURWANTO**

Teori dan Praktik

**EKONOMI POLITIK
DAN PEMBANGUNAN
di INDONESIA**

**MOHAMMAD HIDAYATURRAHMAN
EDY PURWANTO**

WILAKSANA
PRESS



Teori dan Praktik

**EKONOMI POLITIK
DAN PEMBANGUNAN
di INDONESIA**

Teori dan Praktik Ekonomi Politik dan Pembangunan di Indonesia

Sumenep, Wiraraja Press

Halaman : xii + 160 Hal
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penulis : Mohammad Hidayaturrehman
Edy Purwanto
Editor : Dwi Listia Rika Tini
Tata Letak : Abd Bakar Ary Shandy
Desain Sampul : Ahmed David
Ilustrasi Isi : Mohammad Hidayaturrehman

ISBN: 978-623-5650-04-3

Cetakan Pertama: 2022

Penerbit:

Wiraraja Press

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km.05 Patean Sumenep

Telp/Fax: (0328) 664272 / (0328) 673088

Website/Email: wiraraja.ac.id/rektorat@wiraraja.ac.id

Percetakan:

Tim Wiraraja Press

Isi diluar tanggung jawab percetakan

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 PASAL 113 TENTANG HAK CIPTA

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit sebagai atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru sekalian alam, pemilik alam dan segala isinya. Berkah nikmat dan karunia-Nya, kita semua dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesenangan, kebahagiaan dan kesehatan. Syukur kita perlu terus dan senantiasa dipanjatkan. Semoga dengan syukur yang kita haturkan, membuat keberkahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita berharap syukur yang kita panjatkan juga akan menambah nikmat yang telah diberikan pada kita semua.

Shalawat dan salam, semoga terus berlimpah dan tumpahruah pada tauladan, junjungan, dan pahlawan revolusioner umat manusia, Nabi Muhammad SAW, yang sudah berjuang mengeluarkan umatnya dari dunia kegelapan dan kebodohan, menuju cahaya hidayah, jalan terang yang diberkahi Allah SWT. Dengan pengorbanan yang dilakukan, kita dapat merenguk nikmatnya beriman, berislam dan berilmu pengetahuan. Semoga shalawat dan salam juga akan senantiasa terlimpah dan tumpahruah kepada keluarga, sahabat, dan para penerus risalah perjuangan yang setia sampai akhir zaman.

Kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penerbitan buku ini, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara khusus kepada Unitomo Press, kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, dan Center for Indonesia Reform (CIR). Akhirnya, penulis berharap buku ini bisa menjadi salah satu khazanah yang bisa menambah materi bacaan saudara sekalian, menjadi sahabat literasi yang setia, tidak pernah ingkar janji. Penulis mohon maaf, jika sekiranya di dalam buku ini terdapat kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Kritik, saran, dan masukan dinanti selalu untuk perbaikan ke depan.

Madura, 1 Juni 2022



Daftar Isi

	Hal
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
PENDAHULUAN	x
BAB I Teori Pilihan Publik	1
Pengertian Teori Pilihan Publik	1
Ahli Teori Pilihan Publik	2
<i>James Buchanan</i>	2
Praktik Teori Pilihan Publik.....	3
BAB II Teori Pertukaran Sosial	6
Pengertian Teori Pertukaran Sosial	6
Ahli Teori Pertukaran Sosial.....	9
<i>George Homans</i>	9
<i>Peter Blau</i>	10
<i>George Ritzer</i>	12
Praktik Teori Pertukaran Sosial.....	13
BAB III Teori Interaksi Sosial	19
Pengertian Teori Interaksi Sosial.....	19
Ahli Teori Interaksi Sosial	24
<i>George Simmel</i>	24
<i>Herbert Blumer</i>	25
Praktik Teori Interaksi Sosial	26
BAB IV Teori Pilihan Rasional	29
Pengertian Teori Pilihan Rasional.....	29

Ahli Teori Pilihan Rasional	34
<i>James Coleman</i>	34
Praktik Teori Pilihan Rasional	36
BAB V Teori Realitas Sosial	40
Pengertian Teori Realitas Sosial.....	40
Realitas Sosial Objektif.....	42
Realitas Sosial Simbolik.....	42
Realitas Sosial Subjektif.....	43
Ahli Teori Realitas Sosial.....	43
<i>Peter Berger dan Thomas Luckmann</i>	43
Praktik Teori Realitas Sosial	48
BAB VI Teori Politik	52
Pengertian Teori Politik.....	52
Ahli Teori Politik.....	54
<i>Al-Mawardi</i>	54
<i>John Locke</i>	55
Praktik Teori Politik	55
BAB VII Teori Kubus Kekuasaan	60
Pengertian Teori Kubus Kekuasaan	60
Ahli Teori Kubus Kekuasaan	61
<i>John Gaventa</i>	61
Praktik Teori Kubus Kekuasaan.....	61
BAB VIII Teori Investasi Politik	67
Pengertian Teori Investasi Politik.....	67
Ahli Teori Investasi Politik.....	69
<i>Thomas Ferguson</i>	69
Praktik Teori Investasi Politik	70
BAB IX Teori Motivasi	72
Pengertian Teori Motivasi.....	72
Ahli Teori Motivasi.....	73
<i>Abraham Maslow</i>	73

	<i>David McClelland</i>	74
	Praktik Teori Motivasi	74
BAB X	Teori Partisipasi	79
	Pengertian Teori Partisipasi.....	79
	Ahli Teori Partisipasi.....	84
	<i>Cohen dan Uphoff</i>	84
	Praktik Teori Partisipasi	85
BAB XI	Teori Peran	88
	Pengertian Teori Peran.....	88
	Ahli Teori Peran.....	91
	<i>Robbins dan Judge</i>	91
	Praktik Teori Peran	92
BAB XII	Teori Modernisasi	97
	Pengertian Modernisasi	97
	Ahli Teori Modernisasi	98
	<i>Harrod & Domar: Modal dan Investasi</i>	98
	<i>Max Weber: Semangat Kapitalisme dan Etika Protestan</i> ..	98
	<i>David McClelland: n-Ach</i>	98
	<i>Alex Inkeles dan David Smith: Manusia Modern</i>	99
	<i>Hoselitz: Faktor-Faktor Non-Ekonomi</i>	99
	<i>Rostow: Lima Tahap Pembangunan</i>	99
	Praktik Teori Modernisasi	100
BAB XIII	Teori Dependensi	103
	Pengertian Teori Dependensi	103
	Ahli Teori Dependensi	104
	<i>Raul Prebisch</i>	104
	<i>Andre Gunder Frank</i>	104
	<i>Theotonia De Santos</i>	104
	<i>Antonio Gramsci</i>	105
	Praktik Teori Dependensi.....	105

BAB XIV Teori Kritis	109
Pengertian Teori Kritis.....	109
Ahli Teori Kritis	110
<i>Theodor Adorno</i>	110
<i>Jürgen Habermas</i>	112
Praktik Teori Kritis	113
BAB XV Teori Pemberdayaan	116
Pengertian Teori Pemberdayaan.....	116
Ahli Teori Pemberdayaan.....	118
<i>Jim Ife</i>	118
Praktik Teori Pemberdayaan	119
BAB XVI Teori Pengembangan Lembaga	125
Pengertian Teori Pengembangan Lembaga.....	125
Ahli Teori Pengembangan Lembaga.....	127
<i>Abraham Maslow</i>	127
<i>Arthur Combs</i>	127
<i>Aldous Huxley</i>	128
<i>David Mills dan Stanley Scher</i>	129
Praktik Teori Pengembangan Lembaga	129
Penutup	132
Daftar Pustaka	133
Glosarium	143
Indeks	146
Riwayat Penulis 1	151
Riwayat Penulis 2	161



Pendahuluan

Sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam proses belajar, dan membentuk pribadi yang memiliki kemampuan, keahlian (*skill*) dan kompetensi. *Pertama*, kemampuan untuk mengelola pikiran. Hal ini biasa disebut dengan kerangka berpikir (*frame of reference*), yaitu upaya untuk membentuk pola pikir, melalui bacaan yang dilakukan secara rutin dan tuntas. Dalam konteks ini budaya literasi, khususnya di dalam membaca perlu dirutinkan dalam praktik sehari-hari. Sebagai orang beragama, tentu kita meyakini kehebatan perintah yang pertama kali diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu supaya membaca “*iqra*”. Hal ini sekaligus menjadi penanda bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membaca, baik yang bersifat literal maupun fenomenal. Hal itu salah satu hikmah dari rahasia, mengapa para tokoh dan ilmuwan di masa lalu, saat menulis beberapa kitab yang terkenal hingga kini, seperti Imam Syafi’i, yang menyebut, ilmu sebelum beramal “*al-ilmu qabla al-amal*.” Hal ini menunjukkan urgensi mencerna ilmu pengetahuan sebelum melakukan amal kebaikan. Salah satu cara untuk mencandra ilmu pengetahuan adalah dengan membaca.

Tuhan yang memberi perintah untuk membaca, juga memberi kemampuan bagi manusia berupa kekuatan untuk menghafal dan mengingat apa yang dicandra melalui membaca (*memorizing*). Kekuatan memori manusia sangat kuat untuk mengingat apa yang pernah dibaca. Misteri memori ingatan manusia menjadi pertanda bahwa apa yang pernah dibaca sesungguhnya tidak hilang, hanya sering tertindih oleh informasi lain yang datang kemudian. Namun informasi yang telah dibaca puluhan tahun lalu bisa muncul kembali pada suatu saat. Maka membiasakan diri untuk membaca, pada hakikatnya adalah memudahkan untuk mengingat apa yang pernah dibaca.

Kedua, pengalaman hidup (*field of experience*). Pengalaman adalah bagian dari proses belajar. Orang tua kita di masa lalu sering mengatakan, “pengalaman adalah guru paling baik.” Hal ini menunjukkan bahwa

berpengalaman merupakan proses belajar, dan proses pembentukan diri menjadi pribadi yang “sempurna”. Belajar yang hanya mengandalkan membaca, terasa kurang, perlu ditambah dengan berpengalaman. Adanya proses interaksi antar individu, individu dengan kelompok serta antar kelompok merupakan suatu bagian dari pengalaman. Berinteraksi tidak hanya melibatkan satu indra saja, namun melibatkan seluruh indera yang dimiliki oleh manusia. Bahkan melihatkan unsur afeksi, perasaan dan emosi yang terbawa, terbangun dan terbentuk. Tentu saja terjadi proses saling mempengaruhi antara para pihak yang terlibat di dalam interaksi. Apa yang dibaca di dalam buku maupun teks lain, akan mengalami proses dialektika dengan apa yang dibaca oleh orang lain. Selain itu, apa yang dibaca di dalam buku juga akan mengalami proses pengujian dengan hal-hal yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, pada saat interaksi terjadi. Sehingga terjadi dialektika, apa yang telah dibaca dengan data di lapangan. Hal ini dapat menimbulkan pengetahuan baru, dan lain sebagainya.

Bila manusia diibaratkan seperti burung, maka dia perlu dua sayap. Sayap pertama adalah membaca, dan sayap kedua adalah berpengalaman. Kedua sayap tersebut harus sama-sama berfungsi. Bila salah satu sayap rusak atau patah, maka burung tidak bisa terbang. Bila manusia hanya membaca, maka akan timpang hidupnya. Sebaliknya, bila manusia hanya melihat apa yang ada di sekitarnya, tanpa mengetahui informasi pada masa lalu, atau apa yang terjadi di tempat lain, di berbagai belahan dunia, akan sempit hidupnya.

Perpaduan antara pengetahuan yang mumpuni dan pengalaman yang komprehensif akan melahirkan manusia cendekia yang luas pemikiran dan kuat pula bahunya, namun rendah hati di dalam menjalani kehidupan. Itulah yang disebut sebagai orang yang bijaksana. Bijaksana adalah sikap paling luhur bagi manusia. Manusia yang tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, tidak gampang menghakimi orang yang berbeda dengan dirinya. Orang-orang yang tidak merasa benar dan hebat sendiri, tetapi Tuhan lah yang hebat dan memiliki segala sesuatu, termasuk ilmu yang dipelajarinya. Hal tersebut yang juga digambarkan oleh Tuhan di dalam firmanNya. *“Orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya berkata: Semua ini berasal dari Tuhan kami.”*

Mempelajari teori-teori pada hakikatnya mempelajari ilmu pengetahuan. Sebab teori dibuat oleh manusia berdasarkan apa yang telah dicandranya di dalam kehidupan sehari-hari pada masa lalu,

kemudian dibentuk menjadi rumusan kalimat yang tersusun secara baik dan masuk akal. Sehingga dapat digunakan untuk mencandra fenomena yang terjadi saat ini, dan bisa pula digunakan untuk “meramal” masa depan. Memprediksi masa depan, bukan berarti “*nujum*”. Namun bentuk perkiraan berdasarkan pengalaman yang terjadi pada masa lalu, dan perhitungan yang dibuat dengan logika dan akal sehat dan telah diuji coba kebenarannya. Masa depan yang akan terjadi bisa disimulasi, berdasarkan teori yang telah dibuat oleh para ahli di bidangnya. Bagaimana dengan teori-teori ekonomi politik dan pembangunan di dalam buku ini? Teori yang berkaitan dengan ekonomi politik dan pembangunan di dalam buku ini dapat juga berguna untuk membaca fenomena ekonomi politik dan pembangunan, termasuk bisa pula “meramal” apa yang terjadi di dalam kehidupan ekonomi dan politik serta pembangunan.



BAB I

Teori Pilihan Publik

Pengertian Teori Pilihan Publik

Teori pilihan publik (*public choice theory*) berkaitan dengan sikap, tindakan, dan perilaku pemerintah di dalam membuat keputusan yang berhubungan atau berkaitan dengan urusan dan kepentingan publik. Hal tersebut dikemukakan oleh Martin Staniland. Menurut Staniland, teori pilihan publik adalah upaya atau keputusan sektor publik atau dalam hal ini pemerintah, mengatur permintaan dan penawaran yang berkaitan dengan sektor swasta, atau masyarakat umum. Berkaitan dengan prosesnya, para pelakunya, dan sasaran yang menjadi objek keputusannya. “*Bagaimana, apa, dan untuk siapa, sektor publik; seperti penawaran dan permintaan, mengkaji pilihan untuk sektor swasta.*” (Staniland, 1985).

Hampir sama dengan Staniland, Caporaso dan Levine menyebut bahwa teori pilihan publik (*public choice theory*) sebagai hubungan dan keterkaitan antara sektor ekonomi dengan kehidupan politik. Menurut Caporaso dan Levine, teori pilihan publik merupakan implementasi dari sektor ekonomi pada bidang politik (Caporaso dan Levine, 1992). Dalam pandangan Caporaso dan Levine, apa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi bisa terjadi pula dalam kehidupan politik. Artinya, ada keterhubungan antara kehidupan ekonomi dengan kehidupan politik. Kehidupan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri, tidak terlepas dari kehidupan politik. Begitu pula dengan kehidupan politik tidak serta-merta berdiri secara otonom, terpisah dari kehidupan politik. Ada proses saling berhubungan antara keduanya, ekonomi dengan politik, dan sebaliknya politik

dan ekonomi. Dalam konteks ini, Caporaso dan Levine merupakan salah satu tokoh terkenal dalam kajian ekonomi politik.

Ahli Teori Pilihan Publik

James Buchanan

Menurut James Buchanan teori pilihan publik adalah, penggunaan metode, cara, atau alat, setelah dikembangkan dalam teori-teori ekonomi di dalam kehidupan politik, termasuk dalam pemerintahan, dan praktik politik. Hal tersebut disebut sebagai politik positif, atau lebih jelas lagi sebagai ekonomi politik konstitusional. Pilihan dan aksi politik merupakan hasil dari pilihan individu yang bersifat personal. Perilaku individu seringkali bertindak atas nama kelompok politik. Menurut Buchanan pada tahap ini individu menghitung pertukarannya sendiri dengan negara atau dengan pemilik otoritas politik. Secara konstitusional demokrasi, orang berhutang kesetiaan kepada konstitusi daripada kepada pemerintah. Ekonomi politik konstitusional melibatkan penilaian komparatif aturan konstitusional, yang mungkin diperkenalkan secara prospektif (Buchanan, 1989).

Teori pilihan publik (*public choice*) yang dikemukakan oleh Buchanan menerapkan metode ekonomi ke teori dan praktik politik dan pemerintahan. Pendekatan ini telah memberi wawasan penting tentang sifat demokrasi pengambilan keputusan. Salah satu contohnya adalah upaya dan kepentingan pribadi yang mempengaruhi keputusan kelompok. Orang yang memilih menjadi pemilih, pelobi, politisi dan pejabat, bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang mereka inginkan, dengan upaya minimum. Akibatnya cara yang digunakan dengan baik secara ekonomi, dapat dihitung sebagai satu pandangan untung dan rugi, ada harga dan efisiensi, yang bisa digunakan untuk menganalisis politik juga. Hal lain yang berkaitan dengan pilihan publik (*public choice*) adalah, pengambilan keputusan kolektif diperlukan di beberapa bidang. Namun, fakta bahwa kadang pasar bisa gagal menyediakan secara memadai dalam bidang-bidang tersebut. Namun tidak begitu dengan pemerintah. Pemerintah dapat melakukan hal-hal yang lebih baik, sebab pemerintah dalam pengambilan keputusan politik tidak mengejar keuntungan. Persaingan yang terjadi di dalam memperjuangkan kepentingan pribadi tidak bisa dihindari, hal tersebut diselesaikan dengan proses politik. Sebab pemerintah seharusnya harus memberi manfaat bagi seluruh masyarakat,

dengan cara non-finansial, dan melalui cara nirlaba. Ekonomi bukan hanya tentang uang. Ekonomi sebenarnya tentang cara menghabiskan sumber daya apapun yang tersedia. Pilihan publik (*public choice*) menerapkan konsep ekonomi sederhana ini, supaya pilihan kolektif diterapkan untuk melihat cara kerja konstitusi, pemilihan mekanisme, partai politik, kelompok kepentingan, lobi, birokrasi, parlemen, komite dan bagian lain dari sistem pemerintahan. Seperti keputusan kolektif dan politis, apakah akan menaikkan pajak properti untuk membangun jalan baru, memberi pilihan antara biaya dan manfaat, bukan hanya biaya dan manfaat finansial, tetapi, secara lebih luas, antara apapun yang harus dikorbankan dan apapun hasil yang diperoleh (Butler, 2012: 15-23).

James Buchanan memperluas pandangannya bahwa kebijakan publik muncul dari interaksi individu yang mementingkan diri sendiri. Buchanan selalu melakukan kajian dalam kerangka ekonomi politik daripada ekonomi murni. Ekonomi politik berurusan dengan pemahaman pengambilan keputusan kolektif dan kekayaan dan distribusi pendapatannya berpengaruh pada masyarakat. Menurut Formaini, teori pilihan publik tampaknya lebih masuk akal, sebab pemerintah juga merupakan kumpulan individu yang interaksinya ditentukan oleh kepentingan pribadi yang sama yang memotivasi orang di sektor swasta. Buchanan mengemukakan tradisi raksasa dalam teori politik dan ekonomi (Formaini, 2003: 2-4).

Praktik Teori Pilihan Publik

Praktik teori pilihan publik dapat dilihat dalam keputusan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai institusi atau lembaga yang memiliki kekuasaan (*power*). Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah berupa kewenangan atau otoritas (*authority*) untuk membuat dan menetapkan undang-undang bersama dengan wakil rakyat. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama wakil rakyat untuk mengatur kehidupan seluruh rakyat yang ada di dalam suatu wilayah Negara. Kekuasaan yang lain adalah, kekuasaan untuk mengatur keuangan, termasuk untuk mengambil uang dari rakyat; berupa pajak, retribusi dan lain-lain. Kemudian kekuasaan untuk mendistribusikan uang yang telah diambil tersebut kepada berbagai pihak, sesuai dengan keinginan pemerintah. Kekuasaan lain yang dimiliki pemerintah adalah menggerakkan birokrasi untuk bekerja, sesuai dengan arahan pemerintah.

Termasuk, kekuasaan untuk mengendalikan aparaturnya pemerintah, polisi dan tentara.

Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah tersebut perlu dipergunakan sepenuhnya dan sebesar-besarnya untuk melayani kebutuhan warga/ rakyat. Sebab rakyat yang memiliki kedaulatan, kedaulatan itu diberikan mandatnya kepada pemerintah, untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Atas mandat dan amanah yang diberikan tersebut, pemerintah mendapat gaji, honor, tunjangan, dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Bahkan, dengan bahasa lain, seluruh biaya dan keperluan hidup pejabat pemerintah dibiayai oleh uang dari rakyat. Dengan begitu, maka pemerintah perlu membuat keputusan, kebijakan, dan program serta kegiatan yang diorientasikan pada kepentingan dan kebutuhan publik. Tanpa mempertimbangkan untuk mendapat keuntungan (benefit).

Program pembangunan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, pada berbagai level, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, kecamatan, dan desa, tidak perlu mempertimbangkan keuntungan bagi pemerintah. Namun perlu memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat. Tidak sekadar bermanfaat namun juga memberi aspek pelayanan bagi masyarakat. Semakin besar manfaat dan pelayanan terhadap masyarakat, maka tersebut semakin baik.

Contoh yang paling nyata dari hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran tersebut tidak bisa diorientasikan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perspektif teori pilihan publik, kepentingan dan kebutuhan publik yang harus diprioritaskan, bukan keuntungan yang diraih. Misalnya pendirian Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan menggunakan anggaran negara di daerah terpencil di lereng gunung penting dilakukan, untuk melayani keperluan kesehatan masyarakat yang ada di wilayah tersebut, tanpa mempertimbangkan adanya pemasukan bagi pemerintah dari pendirian Puskesmas tersebut.

“Penyakit yang timbul di birokrasi,
Biasanya membuat mereka mati,
adalah rutinitas”

(John Stuart Mill)



BAB II

Teori Pertukaran Sosial

Pengertian Teori Pertukaran Sosial

Teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) menurut Saifuddin dalam (Wirawan, 2014: 171) adalah teori yang menjelaskan tentang suatu objek dengan *value* antar individu yang dimiliki atas dasar suatu tatanan sosial sebagai akibat dari adanya tindakan sosial yang bertukar dan memberi objek-objek yang ada. Benda atau hal-hal yang nyata maupun tidak nyata menjadi objek yang dipertukarkan. Seperti halnya rasa sakit, masalah kehidupan, harapan, pencapaian sesuatu, dan pernyataan-pernyataan antarindividu, juga menjadi ide terkait pertukaran yang dimaksud (Saifuddin, 2001: 4).

Alhasil, teori pertukaran sosial sebenarnya dengan bahasa lain, ingin menjelaskan bahwa biaya (*cost*), imbalan (*reward*) dan keuntungan (*profit*) merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap interaksi sosial. Adapun ketiganya menjadi *keyword* pada teori pertukaran sosial. Sehingga dalam hal ini dijelaskan bahwa, agar mewujudkan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, maka seseorang menganggap hubungannya dengan orang lain tersebut dengan ilustrasi bahwa perlu menyeimbangkan antara biaya-imbalan dalam hubungan, jenis hubungan serta kesempatan.

Dalam teori pertukaran sosial, tidak melakukan pengkajian pada perilaku tidak nyata serta proses yang bersifat subjektif. Anggapannya yakni terjadinya suatu hubungan semata-mata dapat terjadi ketika diperoleh keuntungan dari adanya interaksi yang dilakukan oleh dua pihak yang saling berhubungan. Dengan demikian

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai karena pihak yang saling berhubungan tersebut diberi kebebasan untuk memenuhi kepentingan pribadinya masing-masing menggunakan pertukaran yang telah mufakat. Setiap orang yang terlibat di dalam interaksi sosial berperilaku tertentu.

Menurut Cook dan Rice teori pertukaran sosial, dipengaruhi oleh adanya teori lain seperti pragmatisme, utilitarianisme, behaviorisme, dan fungsionalisme. Adapun dalam teori pertukaran sosial juga dipengaruhi oleh Behaviorisme Skinner. Behaviorisme menjelaskan bahwa lahirnya perilaku manusia yakni berasal dari adanya pemahaman terhadap kepribadian binatang. Sehingga para penganut aliran perilaku menganggap mustahil bisa mempelajari pemikiran manusia secara langsung, karenanya mereka tidak suka dengan konsep-konsep mentalitas. Seperti manusia yang kerap mencoba memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya, justru sama halnya dengan binatang yang mencari ganjaran positif dan menghindari hukuman (Hariyanto, 2012: 264).

Dalam kaitannya dengan perilaku tersebut, sosiolog behavioral mengamati kaitan antara dampak-dampak perilaku individu terhadap lingkungan serta efeknya terhadap perubahan perilaku individu itu sendiri. Hubungan tersebut menjadi penting diamati untuk mengkondisikan proses belajar dalam menciptakan akibat-akibat terjadinya modifikasi perilaku. Misalnya dugaan banyak orang terhadap perilaku bayi yang dianggap random dan abstrak. Suatu perilaku mempengaruhi lingkungan tempat dimana perilaku tersebut terealisasi, baik fisik maupun sosial, hingga pada akhirnya berperan kembali dengan berbagai cara. Adapun perilaku aktor juga dapat dipengaruhi oleh respon positif, negatif, maupun netral di kemudian hari. Apabila suatu perilaku dilakukan berulang kali, maka bisa jadi pada awal perilaku ditampakkan mendapatkan respon positif berupa apresiasi, begitu pula sebaliknya. Sehingga yang menjadi perhatian para behavioris yakni apresiasi dan kerugian. Apresiasi yang berupa penghargaan didefinisikan sebagai kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk memperkuat suatu perilaku, sedangkan kerugian menekan probabilitas terjadinya tingkah laku (Ritzer, 2012: 708-709).

Berdasarkan perspektif teori utilitarianisme, salah satu diantara hukum dasar manusia yang ada menjelaskan terkait tiap individu yang kerap berupaya meminimalisir atau bahkan menjauhi kemelaratan dan memaksimalkan kebahagiaan. Imbalan berupa kebahagiaan tersebut dapat mendorong manusia untuk bertindak. Menurut teori utilitarian,

adanya interaksi sosial akan menciptakan ganjaran, sehingga dengan kata lain ganjaran dapat diperoleh dari adanya interaksi antar-orang (Abercrombie, 1994: 156).

Aktor menjadi pusat perhatian pada teori pertukaran. Hal itu dikarenakan aktor dipandang sebagai manusia yang memiliki pilihan dan orientasi. Aktor kerap melakukan tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan sesuai dengan keinginan dan pilihannya. Adapun terdapat dua keadaan memaksa yang selalu terjadi pada setiap usaha yang dilakukan aktor. *Pertama*, keterbatasan sumber. Terdapat perbedaan sumber serta cara yang tak sama oleh aktor terhadap sumber daya lain. Aktor dapat dengan mudah mencapai tujuan apabila memiliki banyak sumber daya. Namun aktor yang sumber dayanya terbatas, untuk mencapai tujuannya akan sulit atau bahkan bisa jadi malah mustahil untuk mencapainya. *Kedua*, sumber pemaksa yakni lembaga sosial (Bagong, 2010: 264).

Interaksi pada struktur pertukaran digambarkan oleh proses pertukaran. Adapun inisiasi pertukaran terjadi karena adanya peluang aktor dari kesempatan pertukaran yang ada. Apabila terdapat respon inisiasi, maka membentuk transaksi yaitu pertukaran timbal balik antara manfaat-manfaat yang dihasilkan. Relasi pertukaran merupakan segenap rangkaian transaksi yang berkelanjutan di antara aktor-aktor yang tak berbeda. Dalam relasi pertukaran, transaksi langsung berupa negosiasi dan timbal balik. Transaksi negosiasi merupakan aktivitas dimana para aktor turut pada proses keputusan bersama. Sedangkan transaksi timbal balik, merupakan sumbangan aktor pada pertukaran yang dilaksanakan tidak secara bersamaan dan tanpa negosiasi. Kemudian, para aktor menginisiasi pertukaran tanpa memahami apakah aktor lain akan memberikan respon atau kapan respon itu akan diberikan (Syahri, 2014: 1-7).

Sehubungan dengan dilema permainan campuran, perubahan sosial dipengaruhi oleh tiga hal. *Pertama*, untuk mempertahankan hubungan, masing-masing pihak memiliki kepentingan bersama. Hubungan yang hendak dipertahankan merupakan bagian upaya untuk saling mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dalam menjaga hubungan, kadang dijumpai perasaan dilema berkaitan dengan berapa banyak yang harus diberikan sebelum mendapat ganjaran (*reward*) dari interaksi yang dilakukan. *Kedua*, terdapat kemauan mempertahankan kelangsungan hubungan.

Saat hubungan tetap dijaga, maka ganjaran (*reward*) yang diperoleh semakin sering. Saat ganjaran sering diperoleh, maka upaya untuk menjaga hubungan juga terus dilakukan. Pada saat yang sama, terdapat dilema apabila yang terjadi adalah kemerosotan nilai akibat terlalu sering atau terlalu mudah mendapat ganjaran. *Ketiga*, konsekuensi ganda yang terdapat pada tindakan sosial, yaitu tindakan untuk mencapai suatu tujuan, juga pada saat bersamaan dapat merintangangi pencapaian tujuan lain.

Ahli Teori Pertukaran Sosial

George Homans

George Homans merupakan salah satu ahli teori pertukaran sosial (*social exchange*). Menurut Homans, motif maupun perasaan dari mereka yang turut dalam proses pertukaran menjadi poin penting untuk diperhatikan dalam pertukaran sosial. Maka Homans lebih menekankan pada proses pengamatan terhadap hubungan pertukaran pada tingkat individu. Berdasarkan pemikirannya terhadap pertukaran sosial, Homans juga mengemukakan pendapatnya bahwa interaksi merupakan aktivitas yang dilaksanakan dengan berdasar pada stimulus dari aktivitas lainnya. Sedangkan perasaan adalah aktivitas yang sifatnya internal. Dalam analisisnya, Homans memberi batasan pada pertukaran tatap muka atau pertukaran langsung. Sebab, biaya (*cost*), imbalan (*reward*) dan keuntungan (*profit*) tidak dapat dihindarkan dari hubungan pertukaran (Cook and Rice, 2003: 55).

Menurut Homans, konsep tentang imbalan (*reward*) tidak berbeda dengan dukungan (*support*) sementara biaya (*cost*) sama dengan hukuman (*punishment*) dalam psikologi perilaku. Dalam banyak tulisannya, Homans melakukan analisis hubungan pertukaran sosial pada tingkat mikro. Homans mengakui bahwa munculnya kebaruan pada fakta sosial dipengaruhi oleh fakta sosial yang telah menentukan perubahan tingkah laku. Homans menyebutkan bahwa sebenarnya variabel yang sifatnya psikologi merupakan faktor utama. Reaksi langsung Homans pada fakta sosial yakni dengan menitikberatkan pada pemaparan berkaitan dengan pranata, yang diartikan sebagai pola tingkah laku sosial yang cenderung konstan dengan tujuan menjaga tingkah laku yang disetujui bersama. Motif pada teori pertukaran menganggap bahwa setiap individu memiliki keinginan pribadi. Setiap orang itu akan membutuhkan sesuatu, namun

bukan sebagai tujuan yang umum. Maka teori ini beranggapan bahwa orang melakukan pertukaran sebab motivasi dari gabungan berbagai tujuan dan keinginan yang khas. Dalam teori pertukaran, motivasi dipandang sebagai hal bersifat pribadi dan individual. Adapun motivasi nantinya akan mengarah pada budaya pribadinya. Motivasi tersebut mengarah pada perolehan suatu barang yang diinginkan, kebahagiaan, kepuasan, dan hal lainnya yang sifatnya emosional. Seseorang yang mengeluarkan sejumlah biaya akan mendapat suatu “hadiah” (*reward*), tapi malah kerap kali seseorang tidak memperhitungkan biaya yang sudah dikeluarkannya. Maka, “biaya” (*cost*) bisa disebut sebagai usaha yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kepuasan serta “penghargaan” (*reward*) yang memiliki potensi akan didapat jika melakukan sesuatu. Penekanan terhadap individu serta banyaknya konsep penghargaan, dengan beban ataupun biaya serta aktivitas Homans cenderung berfokus terhadap individu atau kelompok dua orang. Adapun asumsinya berkenaan individu dan orang lain (*person and other*) (Mighfar, 2015).

Menurut Homans, ada tiga konsep yang mengilustrasikan kelompok kecil yakni pertama kegiatan. *Pertama*, perilaku aktual yang diilustrasikan dalam tingkatan yang konkret. *Kedua*, interaksi berupa kegiatan apa saja yang memberi dan menerima rangsangan dari kegiatan orang lain. *Ketiga*, perasaan yang merupakan simbol yang sifatnya eksternal atau tingkah laku yang memperlihatkan keadaan internal. Ketiganya, mewujudkan suatu perilaku serta hubungan timbal balik. Maknanya, berbagai pola interaksi serta perasaan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi suatu kegiatan. Kemudian, kegiatan berikut perasaan juga akan dipengaruhi serta mempengaruhi interaksi. Perasaan bisa berhubungan timbal balik dengan kegiatan serta berbagai pola interaksi. Apabila terdapat perubahan pada salah satunya, maka lainnya turut berubah (Johnson, 1994: 61).

Peter Blau

Peter Blau secara umum melihat jenis yang sama dari interaksi pertukaran (*exchange interaction*), utamanya dengan menekankan bahwa tipe ganjaran (*reward*) dan beban atau ongkos (*cost*) termasuk di dalamnya. Blau memperhitungkan bahwa orang melaksanakan pertukaran itu hendak mendapatkan ganjaran (*reward*) secara maksimal dengan beban yang minimal. Bagi orang yang kurang beruntung, beban yang dikeluarkannya akan menciptakan kebahagiaan bagi orang lain yang mungkin tidak diganti, hal ini tidak seimbang. Hakikat ketidakseimbangan

menurut Blau adalah ide kunci dalam mengartikan timbulnya struktur kelompok dan sosial. Blau tampaknya mencoba untuk menguraikan bagaimana struktur sosial membuat mapan pertukaran. Selain itu Blau juga mengemukakan cara-cara stabilisasi yang menimbulkan kekuatan oposisi dan bahkan cenderung mengubah pertukaran yang telah mapan (Wirawan, 2014: 172-183).

Menurut Blau, pertukaran menjadi hal yang menarik bagi individu sebab menginginkan apresiasi bersifat internal (intrinsik) maupun eksternal (ekstrinsik). Ada dua ketentuan yang perlu ada ketika individu hendak melakukan pertukaran sosial. *Pertama*, perilaku melalui interaksi dengan orang lain berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan. *Kedua*, perilaku bertujuan mendapatkan media sarana guna mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang diinginkan dapat berupa ganjaran ekstrinsik, misalnya uang, barang, materi lain ataupun jasa. Bisa pula secara intrinsik, seperti kasih sayang, kehormatan, atau kecantikan. Blau berusaha agar teori pertukaran semakin dikembangkan dengan menghubungkan tingkah laku sosial dasar pada manusia dan tatanan masyarakat yang lebih besar, seperti kelompok, organisasi, maupun negara. Dengan kata lain, Blau hendak memberikan pusat perhatiannya terhadap pemikiran struktur sosial yang lebih luas dengan berdasar pada analisis beberapa proses sosial pada relasi, tidak hanya antar-individu di dalam masyarakat, namun juga di antara kelompok, atau organisasi-organisasi yang ada di masyarakat (Raho, 2007: 176).

Dengan begitu, maka Peter Blau juga menjelaskan pertukaran sosial, pada isu-isu kekuasaan pada rancangan hubungan dan ketergantungan kekuasaan (*power dependence*), yakni relasinya antara kekuasaan dengan ketergantungan yang timbul pada bentuk pertukaran sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, ada empat hal yang dipaparkan. *Pertama*, munculnya dilema-dilema pada proses pertukaran. *Kedua*, proses perbedaan (diferensiasi) sumber daya. *Ketiga*, perubahan kehidupan yang terorganisir berasal dari kekuatan-kekuatan penantang. *Keempat*, dengan begitu akan ada dialektika, sebagai akibat dari banyaknya kekuatan yang saling bertentangan/kontradiktoris (Hariyanto, 2012:181-182).

Mulanya, model pertukaran sosial pada teori pertukaran Blau yaitu model pertukaran timbal balik ganjaran ekstrinsik. Namun, pertukaran bisa menyeleweng dari model asalnya serta bisa diamati sebagai permainan campuran, di mana berbagai pihak yang turut pada pertukaran bisa

mempunyai kepentingan sama ataupun tidak sama (Poloma, 2003:94-95).

Blau membawa teori pertukaran sosial dari level mikro ke level makro, dari keberadaan peran aktor ke dalam peran masyarakat atau struktur sosial. Inilah yang membedakan antara Homans dan Blau, jika Homans lebih cenderung menitikberatkan pandangannya pada peran aktor, namun Blau menitikberatkan pandangannya pada struktur sosial, organisasi, dan masyarakat, berbeda dengan Homans yang titik beratnya pada level mikro.

George Ritzer

George Ritzer menyebut bahwa, orang lain sangat membutuhkan penghargaan dari orang lain, dan sebagian besar kebutuhan penghargaan didapat dari orang. Sehingga, antara orang yang satu dengan orang lain, saling ketergantungan guna memperoleh sumber daya berharga, serta antar-orang saling menyempurnakan dengan proses pertukaran (Ritzer, 2012: 515). Sudut pandang ini yang memfokuskan teoritikus pertukaran sosial, yaitu adanya saling mendapatkan sesuatu dari pihak lain, yang senantiasa dipertukarkan. Hal yang dipertukarkan bisa berupa materi, seperti uang, maupun materi dalam bentuk lain. Bisa pula hal yang dipertukarkan dalam bentuk non materi, berupa, cinta, kasih sayang, penghormatan, dan lain-lain.

Ritzer menyebut, teori pertukaran terdiri atas empat unsur dasar yang tidak berbeda pada pertukaran, yakni aktor, sumber daya, struktur, serta proses (Ritzer, 2012: 516-518). *Pertama*, aktor disebutkan untuk pelaku atau partisipan pertukaran. Aktor bisa berbentuk individu ataupun kelompok baik pemerintah, swasta/ perusahaan, maupun entitas lain yang lebih khusus. Menggunakan konsep teori pilihan rasional, aktor dilihat sebagai manusia dengan orientasi dan tindakannya yang dimaksudkan sebagai usaha pencapaian tujuan tersebut. *Kedua*, sumber daya merupakan kekayaan ataupun kecakapan perilaku yang dipunyai aktor serta aktor-aktor lainnya turut menghargai hal itu. Aktor yang bertindak sesuatu kemudian akan menanggung biaya serta memberikan hasil terhadap aktor lainnya. Hasil yang diberikan tersebut bisa bernilai positif ataupun negatif. Kepunyaan serta akses sumber daya menjadi penentu tingkat daya tawar aktor (Ritzer & Goodman 2011: 357). *Ketiga*, aktor yang terlibat di dalam pertukaran sosial mempunyai struktur yang tidak sama antara satu aktor dengan aktor lain. *Keempat*, Pertukaran

sosial mengalami proses yang terus berlangsung dan dinamis diantara para aktor.

Praktik Teori Pertukaran Sosial

Pertukaran sosial yang melibatkan motivasi dan tujuan pada aktor sosial bisa terjadi dalam perekonomian. Aktor di bidang ekonomi adalah pembeli dan penjual. Keduanya terlibat dalam proses transaksi, menukarkan barang atau jasa. Aktor ekonomi, baik penjual maupun pembeli, sama-sama memiliki tujuan, yaitu mendapat keuntungan. Pembeli ingin mendapatkan barang, sementara penjual ingin mendapatkan uang. Saat keduanya telah mendapat apa yang diinginkan, maka tujuannya telah tercapai. Namun tidak cukup hanya itu, masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli sama-sama ingin mendapatkan hal yang hendak dituju, dengan sumber daya yang seminimal mungkin. Pada saat yang sama untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Selain dalam ekonomi pertukaran sosial juga terjadi dalam kehidupan politik. Aktor politik yang terdiri dari para politisi dan pemilih, terlibat di dalam proses pertukaran. Dalam bentuk yang lebih konkret adalah, pemilih mempertukarkan suara yang diberikan pada saat pemilihan umum (pemilu) dengan sejumlah uang kepada para politisi. Proses ini biasa dikenal dengan sebutan politik uang (*money politics*). Selain itu proses pertukaran juga bisa terjadi antara politisi dengan pihak penyelenggara pemilihan. Proses ini biasa dikenal dengan membeli suara (*vote buying*). Praktiknya adalah, oknum panitia menjual suara yang tidak terpakai, karena pemilih tidak hadir, kepada politisi yang memiliki uang untuk membeli suara-suara yang tidak terpakai tersebut. Setelah politisi terpilih, maka proses pertukaran yang dilakukan adalah, menukarkan kekuasaan (*power*) yang dimiliki untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada saat pemilihan. Selebihnya digunakan kembali untuk membiayai pemilihannya pada pemilu berikutnya.

Teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) menyebut bahwa manusia melihat hubungan dengan orang lain dalam perspektif ekonomi selalu menghitung pengorbanan (*cost*) yang dikeluarkan, kemudian membandingkannya dengan penghargaan (*reward*) yang diperoleh (West & Turner, 2007: 216). Ada semacam penghitungan yang dilakukan terhadap pengeluaran dengan pemasukan yang diperoleh, pada saat proses pertukaran berlangsung.

Pada dasarnya, teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) melihat bahwa pada prinsipnya manusia melakukan tindakan atas dasar dorongan ekonomi. Sebagaimana orang yang menyediakan barang ataupun jasa, sebagai balasannya akan berharap mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan pula. Ahli teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) mempunyai anggapan sederhana bahwa interaksi sosial (*social interaction*) tak jauh berbeda dengan transaksi ekonomi. Namun, pakar pertukaran sosial juga mengemukakan pendapat bahwa pertukaran sosial (*social exchange*) tak semata-mata bisa diukur menggunakan nilai uang, barang, atau materi lainnya, karena dalam berbagai transaksi sosial saling mempertukarkan juga hal-hal nyata dan tidak nyata. Meski begitu, tetap saja terdapat model timbal balik (*feedback*) sejauh adanya orang yang memberi maupun menerima (*take and give*), atau berharap mendapatkan imbalan barang atau jasa, atau dalam bentuk lain, selain barang jasa, seperti penghargaan (*reward*), merasa dihormati dan dihargai atas apa yang telah diberikan atau dilakukan, atau imbalan lain (Poloma, 1984: 52-53).

Asumsi dasar teori pertukaran sosial (*social exchange theory*), tiap interaksi sosial memiliki unsur biaya (*cost*), imbalan (*reward*) dan keuntungan (*profit*). Sehingga, biaya, imbalan dan keuntungan menjadi kata kunci pada teori pertukaran sosial (*social exchange theory*). Manusia memandang hubungannya dengan orang lain terkait dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan, untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Suatu relasi akan terjadi apabila kedua belah pihak yang berinteraksi sama-sama mendapatkan keuntungan dari hubungan yang terjalin. Sehingga tiap pihak yang menjalin hubungan selalu diperbolehkan memenuhi kepentingan pribadi masing-masing dengan pertukaran (*exchange*) yang telah disepakati. George Ritzer menyebut bahwa, orang lain sangat membutuhkan penghargaan dari orang lain, dan sebagian besar kebutuhan penghargaan didapat dari orang. Sehingga, antara satu orang dengan orang lain, saling ketergantungan guna memperoleh sumber daya berharga, selain itu mereka juga saling memenuhi kebutuhan lewat proses pertukaran (Ritzer, 2011: 515).

Dalam teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) manusia dinilai memiliki relasi dan membangun interaksi dengan orang lain didasarkan pada motif untuk mendapatkan imbalan dari apa yang dilakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh aktor politik memberi dukungan dan

sokongan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah dengan harapan akan mendapat imbalan berupa keuntungan materi maupun non materi. Materi bisa berbentuk keuntungan secara ekonomi, keuntungan non materi bisa berbentuk adanya pengaruh secara personal di lingkungan pemerintah, dan adanya peningkatan suara partai.

Aktor politik tidak semata-mata menukarkan dana yang telah dikeluarkan dalam jumlah besar dengan materi atau dana pula, setelah calon kepala daerah yang didukung menang. Namun aktor politik mendapatkan ganjaran (*reward*) dalam bentuk lain di luar materi, yaitu adanya imbalan berupa popularitas, eksistensi, dan dampak elektoral baik secara personal pada aktor politik. Selain tentu saja adanya sikap segan dan dihormati oleh berbagai kalangan, baik sesama politisi maupun kalangan birokrat dan masyarakat umum, karena dianggap berjasa mengantarkan tokoh tertentu menduduki jabatan tertinggi di level daerah.

Menurut Peter Blau, ada dua syarat yang perlu diikuti oleh individu yang melakukan pertukaran sosial. *Pertama*, perilaku melalui interaksi dengan orang lain berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan. *Kedua*, perilaku bertujuan mendapatkan sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan yang diinginkan bisa terwujud ekstrinsik, atau hal yang berada di luar diri, seperti uang, barang, materi lain atau jasa, atau intrinsik, hal yang berada di dalam diri individu, seperti kasih sayang, dan kehormatan (Raho, 2007: 176).

Dari analisis teori pertukaran sosial (*social exchange theory*), diperoleh relevansi dengan kehadiran aktor politik sebagai pendukung pasangan calon kepala daerah. Bahwa yang dipertukarkan tidak semata-mata hal yang bersifat materi, seperti pengeluaran dalam bentuk uang, atau barang lain tapi bisa berupa non materi, berupa dukungan moral, pernyataan sikap politik atau lainnya. Yang diperoleh oleh aktor politik juga tidak semata-mata materi berupa uang atau keuntungan lain secara ekonomi, namun bisa juga dalam bentuk non materi, berupa simpati, kharisma, pengaruh di mata sesama politisi, atau birokrasi, atau pihak lain dan keuntungan politik, baik eksistensi personal sebagai politisi maupun elektoral bagi partai politik. Semakin sering aktor politik berhasil menawarkan pertukaran politik dan ekonominya, maka semakin kuat pula efek ekonomi dan politik yang diperoleh. Sebaliknya, bila aktor politik tidak berhasil dalam mempertukarkan kepentingan ekonomi dan politiknya, semakin lemah pula pengaruh ekonomi dan politik yang diraih.

Edward Aspinall dan Ward Berenschot menyebut pertukaran yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalam dunia politik sebagai pertukaran yang kontingen. Menurut Aspinall dan Berenschot (2019) mengutip (Stokes et al, 2013: 7), aktor politik yang terlibat dalam dunia politik menukarkan apa yang diberikan sebagai keuntungan bagi penerima, dengan harapan akan mendapat imbalan (*reward*) sebagai balasan (*feedback*) yang diberikan oleh aktor kepada penerima, berupa dukungan politik, pada saat yang lain, terutama di saat aktor membutuhkan dukungan secara politik (Aspinall & Berenschot, 2019: 2).

George Homans sebagai salah satu pencetus ahli teori pertukaran sosial (*social exchange theory*), menyebut bahwa dalam teori pertukaran sosial hal yang fundamental dan paling mendasar adalah, adanya interaksi individu, minimal ada dua individu yang berinteraksi. Homans mengakui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang meniscayakan adanya interaksi dengan orang lain, malah interaksi dengan orang yang menghabiskan sebagian besar waktu manusia. Interaksi dengan orang lain tersebut kemudian menimbulkan sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia (Ritzer, 2018: 334).

Proses pemilihan kepala daerah (pilkada) melibatkan banyak individu, mulai dari calon kepala daerah, wakil calon kepala daerah, tim pemenang, termasuk pihak lain yang ikut serta mendukung dan menyokong pencalonan dan kemenangan dalam hal ini aktor politik. Di antara dua individu yang memiliki relasi dan sering berinteraksi adalah calon kepala daerah dan aktor politik.

Menurut Homans, saat mengamati pertukaran sosial, yang menarik perhatian yakni motif dan perasaan dari mereka yang turut dalam proses pertukaran. Oleh karena itu Homans lebih melakukan pengamatan pada hubungan pertukaran yang terjadi pada tingkat individu. Berdasarkan pemikirannya pada pertukaran sosial, Homans mengungkapkan bahwa interaksi merupakan aktivitas yang dilaksanakan atas dasar stimulus dari aktivitas lain. Sementara perasaan adalah aktivitas yang sifatnya internal. Homans memberikan batasan pada pertukaran tatap muka atau pertukaran langsung. Pada hubungan pertukaran hal yang tak bisa dihindari yakni biaya (*cost*), imbalan (*reward*) dan keuntungan (*profit*) (Ritzer, 2011: 516).

Teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) antara George Homans dan Peter Blau memiliki sisi persamaan dan perbedaan. Persamaan keduanya ada pada titik dimana pertukaran sosial terjadi karena adanya relasi dan interaksi antara dua pihak. Perbedaan antara Homans dan Blau ada pada level aktor yang melakukan pertukaran, Homans lebih melihat pada level mikro dari aktor yaitu individu, sementara Blau melihat level aktor bisa juga makro, tidak hanya pribadi tapi juga kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan struktur dan lembaga masyarakat. Teori pertukaran sosial George Homans yang lebih dekat kepada penelitian ini, sebab aktor yang melakukan pertukaran sosial bersifat mikro, yaitu investor politik secara personal dengan calon bupati yang didukung secara personal juga, proses pertukaran keduanya juga berskala mikro.

Politik uang (*money politic*) dan pembelian suara (*vote buying*) pada kontestasi politik, seperti pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, merupakan bentuk dari praktik teori pertukaran sosial (*social exchange*). Pemilih (*voter*) menukarkan suara mereka dengan sejumlah uang dengan kontestan atau peserta pemilihan. Begitu pula dengan oknum yang terlibat dalam jual beli suara pemilih pada kontestasi politik menukarkan pengaruh dan otoritas yang dimiliki kepada peserta pemilihan yang mampu membayar uang atau materi. Hal ini terbukti dengan adanya komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerima suap dari anggota partai, Harun Masiku yang ingin jadi anggota parlemen dengan aturan dan kebijakan yang dibuat oleh komisioner KPU.

“Politisi selalu sama,
Berjanji akan membangun jembatan,
Meskipun tidak ada sungainya.”

(*Nikita Khrushchev,*
Pemimpin Uni Soviet)



BAB III

Teori Interaksi Sosial

Pengertian Teori Interaksi Sosial

Menurut Rahayu Ginintasasi, interaksi sosial bisa dimaknai sebagai hubungan sosial yang tidak statis, atau dinamis. Maksudnya yaitu hubungan sosial bisa berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol, atau melibatkan simbol. Simbol dimaknai sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang memakainya (Ginintasasi, 2015: 1-2).

Mengutip (Anwar, et al 2016: 7-8), Walgito (2007) menjelaskan bahwa interaksi sosial yaitu hubungan antara individu satu dengan individu lain, individu satu bisa memberikan pengaruh terhadap individu lain begitupun sebaliknya, hingga terjadi hubungan timbal balik. Hal itu bisa terjadi antar-individu, individu dengan kelompok maupun antar-kelompok. begitupun Basrowi (2005) menyebutkan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan tidak statis alias dinamis di mana menghubungkan antar-orang, antar-kelompok, maupun orang dengan kelompok. Selain bentuk yang sifatnya kerjasama, terdapat pula bentuk berupa tindakan, persaingan, pertikaian maupun semacamnya.

Partowisastro (2003) mengartikan interaksi sosial adalah relasi sosial yang berguna menjalin beberapa macam relasi sosial yang sifatnya dinamis, di mana relasi itu berupa antar-individu, antar-kelompok, maupun individu dengan kelompok.

Soekanto (2002) menjelaskan interaksi sosial adalah hubungan sosial bersifat dinamis, yang mencakup relasi antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Menurut Sarwono dan Meinarno (2009) interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik yang saling memberikan pengaruh antar individu, individu dengan kelompok, serta antar kelompok.

Gerungan (2006) secara spesifik menjelaskan interaksi sosial sebagai proses satu individu bisa beradaptasi secara autoplastis kepada individu lainnya, dimana dirinya dipengaruhi oleh individu yang lain. Individu yang satu bisa juga beradaptasi secara alloplastis dengan individu lain, dimana individu yang lain itulah yang dipengaruhi oleh dirinya yang pertama. Interaksi sosial adalah hubungan sosial bersifat dinamis terkait hubungan antar-orang dalam arti perorangan, juga antara kelompok manusia, begitupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia (Soekanto, 2005: 61).

Interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan antar orang, antar kelompok maupun orang dengan kelompok. Wujudnya tidak semata-mata bersifat kerjasama, namun juga dapat berupa persaingan, pertikaian dan sejenisnya (Basrowi, 2005: 138).

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial sehingga tanpa adanya interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial dimaknai sebagai pengaruh timbal balik antar individu dengan golongan di dalam upaya mereka guna memecahkan persoalan yang diharapkan dan dalam usaha mereka untuk mencapai tujuannya (Ahmadi, 2004: 100).

Bimo Walgito menyebut interaksi sosial yaitu hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, individu satu bisa dipengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terjadi hubungan yang saling timbal balik (Walgito, 2003: 57).

Dari beberapa penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik dengan saling memberikan pengaruh, mengganti, ataupun membenahi perilaku yang kerap terjadi antar-individu, individu dengan kelompok, maupun antar-kelompok.

Soerjono Soekanto menyebut ada dua syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu terdapat kontak sosial (*social contact*). Kontak sosial berasal

dari bahasa latin *con* atau *cum* yang artinya bersama-sama dan *tango* yang artinya menyentuh. Maka secara harfiah kontak yaitu bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi ketika terdapat hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial itu tidak membutuhkan adanya hubungan badaniah, karena orang bisa mengadakan hubungan tanpa harus menyentuhnya, seperti misalnya berdiskusi dengan orang yang bersangkutan. Perkembangan teknologi dewasa ini menjadikan banyak orang bisa berkomunikasi serta berinteraksi satu dengan lainnya menggunakan telepon, telegraf, radio, maupun alat lainnya yang tidak membutuhkan sentuhan badaniah (Soekanto, 2000: 64).

Abdulsyani mendefinisikan kontak sosial merupakan hubungan satu orang ataupun lebih, melakukan diskusi yang saling memahami terkait maksud dan tujuan masing-masing pada kehidupan masyarakat Syarat kedua yakni terdapat komunikasi (Abdulsyani, 2012: 154). Burhan Bungin mengartikan komunikasi sebagai upaya mengartikan apa yang dilaksanakan individu terhadap informasi, sikap serta perilaku orang lain yang berupa pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik, ataupun sikap, perilaku serta perasaan sehingga seseorang membuat berbagai reaksi terhadap informasi, sikap serta perilaku tersebut dengan berdasar pada pengalaman yang sempat dialami (Bungin, 2006: 57).

Soerjono Soekanto menyebutkan ada tiga bentuk interaksi sosial, yakni kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan bahkan juga berupa pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Hal tersebut senada juga dengan apa yang disampaikan Kimball Young. Menurutnya beberapa bentuk proses sosial diantaranya:

- a. Oposisi (*opposition*) mencakup persaingan (*competition*) serta pertentangan ataupun pertikaian (*conflict*).
- b. Kerja sama (*cooperation*) menciptakan akomodasi (*accomodation*).
- c. Diferensiasi (*differentiation*) sebagai proses di mana orang perorangan dalam masyarakat mendapat hak serta kewajiban yang tidak sama dengan orang lain dalam masyarakat atas dasar ketidaksamaan usia, pekerjaan maupun seks. Diferensiasi itu menciptakan berbagai lapisan masyarakat (Soekanto, 1987: 59).

Menurut (Rudiyanta & Syarbaini 2009: 27), interaksi sosial tidak terlepas dari sejumlah faktor psikologi yang ikut serta melandasi, di antara faktor psikologi yang menjadi landasan yaitu:

1. Imitasi, merupakan suatu kegiatan meniru orang lain yang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti gaya bicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan orang lain.
2. Sugesti, muncul apabila si penerima dalam kondisi tidak netral sehingga tidak bisa berpikir rasional. Pada umumnya sugesti asalnya dari orang yang memiliki wibawa, kharismatik, memiliki kedudukan tinggi, dari kelompok mayoritas kepada minoritas.
3. Identifikasi, merupakan kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, sifatnya lebih mendalam dari imitasi sebab membentuk kepribadian seseorang.
4. Simpati, merupakan proses dimana seseorang merasa tertarik dengan pihak lain.
5. Empati, merupakan simpati yang mendalam, bisa mempengaruhi kejiwaan, dan fisik seseorang (Gerungan, 2004: 62).

Ada tiga macam interaksi sosial, yaitu:

1. Interaksi antara individu dan individu. Interaksi individu memberi pengaruh, rangsangan, atau stimulus terhadap individu yang lainnya. Sementara individu yang menerima pengaruh akan memberikan reaksi, tanggapan atau respon. Interaksi antara individu dan individu bisa berupa aktivitas berjabat tangan, saling tegur sapa, berdiskusi ataupun bahkan bertengkar.
2. Interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi ini bisa diamati seorang orator yang berorasi di khalayak secara konkrit. Bentuk interaksi ini menyatakan kepentingan individu dihadapkan dengan kepentingan kelompok.
3. Interaksi antara kelompok dengan kelompok. Bentuk interaksi antara kelompok dengan kelompok menyatakan kepentingan individu dalam kelompok sebagai satu kesatuan, berkaitan dengan kepentingan individu dalam kelompok lainnya. Interaksi ini menunjukkan tiap tindakan individu menjadi bagian dari kepentingan kelompok (Fernanda, 2012).

Gilin dan Gilin menyatakan terdapat dua golongan proses sosial sebagai dampak interaksi sosial, yakni:

1. Proses asosiatif, yaitu suatu proses saling memahami serta kerjasama timbal balik antar individu maupun antar kelompok, proses inipun

bisa mencapai tujuan bersama. Asosiatif memiliki beberapa jenis proses diantaranya: a). Kerjasama merupakan upaya bersama individu atau kelompok guna memenuhi satu hingga beberapa tujuan bersama. Wujud kerjasama misalnya: gotong royong (kerjasama pada masyarakat pedesaan), bargaining (perjanjian tentang pertukaran barang maupun jasa), coalition (dua organisasi dengan tujuan yang tidak berbeda dan bekerja sama mencapai tujuan tersebut), co-optation (kerjasama individu dan kelompok pada sebuah organisasi atau negara guna mewujudkan stabilitas), joint-venture (kerjasama oleh dua perusahaan atau lebih dalam suatu proyek); b). Akomodasi, lumrahnya dipakai dalam dua arti, pertama sebagai proses yang menjelaskan kondisi seimbang pada interaksi sosial antar individu maupun antar kelompok pada masyarakat utamanya pada kaitannya dengan norma serta nilai sosial yang berlaku pada masyarakat tersebut. Kedua, suatu proses menenangkan terjadinya suatu pertentangan di masyarakat. Tujuan dari proses akomodasi ini untuk mencapai kestabilan. Berikut merupakan bentuk akomodasi: (1) coercion, akomodasi melalui paksaan maupun kekerasan secara fisik atau psikologis; (2) compromise, bentuk akomodasi di mana masing-masing pihak berselisih saling mengurangi tuntutan guna mencapai penyelesaian melalui pihak ketiga; (3) mediation, akomodasi melalui pihak ketiga yang bersifat netral; (4) conciliation, akomodasi dengan upaya menghadirkan keinginan dari pihak yang terlibat perselisihan; (5) toleration, akomodasi tidak formal, sebab terdapat pihak yang mencoba menghindari dari pertikaian; (6) stalemate, bentuk akomodasi di mana pihak yang berselisih memiliki kekuatan tidak jauh berbeda serta berhenti pada satu titik tertentu begitu pun masing-masing pihak menahan diri; (7) adjudication, upaya akomodasi dengan jalan pengadilan. c). Asimilasi, yakni suatu proses menggabungkan dua atau lebih budaya yang tidak sama sebagai akibat proses sosial, lalu menciptakan budaya sendiri yang tak sama dengan budaya asalnya.

2. Proses disosiatif. Proses ini sebagai proses perlawanan yang dilaksanakan individu-individu dan kelompok dalam proses sosial di antara mereka pada suatu masyarakat. Berikut adalah bentuk proses disosiatif: a) Persaingan sebagai proses sosial, di mana seseorang atau kelompok berjuang serta bersaing guna memperoleh keuntungan pada bidang-bidang kehidupan yang menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau menguatkan prasangka yang sudah ada,

akan tetapi tanpa terdapat ancaman ataupun kekerasan; b) Kontravensi merupakan proses sosial yang terdapat di antara persaingan dan pertikaian ataupun konflik. Kontravensi terjadi di mana ada pertentangan pada tataran konsep dan wacana, serta berupaya menggagalkan pencapaian tujuan dari pihak lain; c) Konflik atau pertikaian merupakan proses sosial di mana individu ataupun kelompok mempunyai ketidaksamaan dalam hal emosi, unsur kebudayaan, perilaku, prinsip, ideologi, maupun kepentingan dengan pihak lain. Perbedaan itu menjadi suatu pertikaian di mana pertikaian bisa menciptakan ancaman ataupun kekerasan fisik (Bungin, 2009: 58-63).

Charles Loomis menyebut ada ciri penting pada interaksi sosial, yaitu:

1. Jumlah pelaku lebih dari seorang, dapat berjumlah dua atau lebih.
2. Terdapat komunikasi antara para pelaku memakai simbol-simbol.
3. Terdapat suatu dimensi waktu yang mencakup masa lampau, kini dan akan datang, yang menjadi penentu sifat dari aksi yang sedang berlangsung.
4. Terdapat tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat.
5. Selain itu, ketika terjadi interaksi sosial yang berulang menurut pola tidak berbeda serta bertahan untuk waktu yang tak sebentar, maka akan tercipta hubungan sosial (Soekanto, 2005: 113).

Terjadinya suatu kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, namun juga tergantung kepada adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut. Sehingga menjadi jelas dan terang, bahwa di dalam interaksi sosial selalu melibatkan lebih dari satu orang, atau lebih dari satu kelompok/ pihak. Interaksi sosial tidak ada akan ada jika hanya ada satu orang (Narwoko, 2007: 16).

Ahli Teori Interaksi Sosial

George Simmel

Teori interaksi sosial (*social interaction theory*) tidak terlepas dari keberadaan George Simmel. Menurut (Johnson, 1986: 252), salah satu ahli terkemuka yang mempelajari proses interaksi sosial di tingkat mikro yakni George Simmel. Juga dikemukakan bahwa posisi Simmel berada di

antara dua ekstrim realisme Durkheimian dan nominalisme Weberian. Simmel menilai masyarakat, lebih dari sekadar sekumpulan individu serta pola perilakunya, tetapi masyarakat tidak independen dari individu yang membentuknya. Sebaliknya, masyarakat menunjuk pada pola-pola interaksi timbal-balik antar individu.

Lebih lanjut Simmel menyebut bentuk interaksi sosial dimaknai sebagai pola perilaku universal dan berulang-ulang melalui makna berbagai isi diungkapkan. Isi kehidupan sosial meliputi antara lain naluri erotis, kepentingan objektif, dorongan keagamaan, bantuan atau perintah, dan lain-lain. Keseluruhan isi ini mengakibatkan orang hidup bersama orang lain, bertindak terhadap mereka, bersama mereka, mempengaruhi dan dipengaruhi mereka, dan bahkan untuk melawan mereka (Miraningsih, 2013).

George Simmel terkenal dalam sosiologi kontemporer akibat sumbangsih pemikirannya terkait pola atau bentuk interaksi sosial. Simmel memaparkan bahwa salah satu minat utamanya yaitu interaksi (asosiasi) antara aktor sadar dan tujuan minatnya yaitu mengamati besarnya cakupan interaksi yang pada suatu ketika mungkin terlihat sepele tetapi pada waktu berbeda sangat penting. Ini bukannya kelanjutan minat Durkheim tentang fakta sosial, tetapi lebih pada pernyataan tentang fokus sosiologi yang skalanya lebih kecil. Pokok perhatian utama Simmel bukanlah isi melainkan bentuk interaksi sosial. Perhatian ini muncul dari keidentikan Simmel dengan tradisi Kantian dalam filsafat, yang memisahkan bentuk dan isi. Tetapi pemikiran Simmel cukup sederhana. Dari sudut pandang Simmel, dunia nyata tersusun dari peristiwa, tindakan, interaksi, dan lain sebagainya yang tak terhingga. Berdasarkan pemikiran Simmel, tugas sosiolog yaitu melakukan hal yang sama persis dengan apa yang dilakukan orang awam, yaitu menerapkan bentuk yang jumlahnya terbatas kepada realitas sosial, khususnya pada interaksi, sehingga bisa dianalisis secara lebih baik.

Herbert Blumer

Tokoh lain teori interaksi sosial adalah Herbert Blumer. Menurut Herbert Blumer, interaksi sosial terjadi pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Kemudian makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Dan terakhir yaitu makna

bersifat tidak tetap akan tetapi bisa diubah, perubahan terhadap makna bisa terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan orang apabila menemukan sesuatu. Proses tersebut disebut juga dengan proses menafsirkan (*interpretative process*).

Interaksi sosial dapat terjadi bila ada dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak antarindividu, maupun individu dengan kelompok, juga kontak antarkelompok. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial. Sedangkan komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Sumber informasi tersebut terbagi dua, yakni ciri fisik dan penampilan. Ciri fisik, adalah segala sesuatu yang dimiliki seorang individu sejak lahir yang mencakup jenis kelamin, usia, serta ras. Penampilan di sini bisa mencakup daya tarik fisik, bentuk tubuh, penampilan berbusana, serta wacana.

Praktik Teori Interaksi Sosial

Interaksi sosial mempunyai aturan yang bisa diamati melalui dimensi ruang dan dimensi waktu. Hall membagi ruangan dalam interaksi sosial menjadi empat batasan jarak, *pertama*, jarak intim, *kedua*, jarak pribadi, *ketiga*, jarak sosial, dan *keempat*, jarak publik. Selain aturan mengenai ruang, Hall juga menyebutkan aturan terkait waktu. Pada dimensi waktu ini tampak adanya batasan toleransi waktu yang bisa memberikan pengaruh bentuk interaksi. Thomas menyebut aturan dimensi situasi. Definisi situasi merupakan penafsiran seseorang sebelum memberikan reaksi. Sebelum melakukan reaksi, individu atau masyarakat terlebih dulu membaca situasi yang ada. Definisi situasi ini dibuat oleh individu juga oleh masyarakat, bisa secara terpisah maupun bersamaan.

Jarak intim di dalam interaksi antara aktor politik dan ring satu tim pemenang calon kepala daerah terjadi selama proses pencalonan dan kemenangan pasangan calon. Jarak intim terjadi terutama terjadi dalam bentuk saling mengunjungi antara aktor politik dengan calon kepala daerah maupun ring satu tim kemenangan. Ring satu tim kemenangan disini bermakna orang-orang yang selama ini dekat dengan aktor politik dan orang-orang yang dekat dengan calon kepala daerah dan wakilnya. Orang-orang ini yang selalu dilibatkan oleh aktor politik dan pasangan calon di dalam proses interaksi selama pencalonan maupun proses kemenangan. Keintiman di dalam interaksi juga terlihat di dalam materi

yang dibahas selama berinteraksi, dibahas dari yang bersifat umum, hingga yang bersifat khusus, sampai pada hal-hal yang bersifat rahasia (*secret*).

Jarak pribadi dalam interaksi aktor politik dengan calon kepala daerah dan wakilnya juga terjadi, bila dilihat dalam kegiatan yang bersifat personal. Personalitas interaksi dilihat dari kegiatan bersama yang hanya melibatkan aktor politik bersama keluarga masing-masing.

Jarak sosial bisa diamati dalam interaksi pada saat melakukan kegiatan kampanye di masyarakat, kunjungan ke basis calon pemilih dalam bentuk tatap muka dan kegiatan sosial. Secara bergantian aktor politik, calon kepala daerah atau wakilnya memperkenalkan diri, visi dan misi serta program kerja yang ditawarkan kepada calon pemilih.

Jarak publik bisa dilihat dari interaksi yang dilakukan oleh aktor politik bersama calon bupati dan calon wakil bupati yang tampil bersama di dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye pemenangan, termasuk pada saat hadir di dalam pertemuan bersama tim pemenangan, relawan dan saksi. Tak jarang, calon kepala daerah juga terlibat secara langsung dalam kegiatan yang digelar oleh relawan.

Interaksi sosial memunculkan adanya perilaku tertentu dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Masing-masing orang yang terlibat mempunyai perilaku berbeda satu sama lain. Perilaku tersebut bisa diamati pada proses pencalonan dan pemenangan. Perilaku bisa dilihat pada aktor politik, atau perilaku yang muncul dari orang-orang yang ikut bersamanya dalam proses pencalonan dan pemenangan pasangan calon, perilaku aktor politik tentu saja akan berbeda dengan perilaku orang yang bergabung bersamanya dalam proses pemenangan.

Pemerintah yang sedang berkuasa pada seluruh level, di dalam melaksanakan pelayanan dan program pembangunan selalu melakukan interaksi sosial dengan masyarakat. Salah satu bentuk interaksi sosial yang nyata dan telah dilembagakan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) yang dilaksanakan mulai level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, hingga pusat. Pelaksanaan *Musrenbang* melibatkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang diundang untuk hadir pada pelaksanaan *Musrenbang*. Tidak ada *Musrenbang* yang dilakukan secara tunggal oleh pemerintah secara terpisah. Syarat diakuinya pelaksanaan *Musrenbang* adalah adanya keterlibatan masyarakat di dalam pelaksanaannya.

“Menjaga jarak dengan kekuasaan,
Merupakan salah satu cara,
Merawat kekuasaan.”

(Mohammad Hidayaturrahman, 2021)



BAB IV

Teori Pilihan Rasional

Pengertian Teori Pilihan Rasional

Menurut (Johnson dan Keehn, 1994) sepanjang dua dekade terakhir, pilihan rasional (*rational choice*) mulai bermunculan sebagai pandangan yang mendominasi ilmu politik, sedangkan sekarang sudah memasuki cakupan disiplin ilmu tersebut, misalnya keilmuan tentang wilayah kekuasaan yang mulanya tidak menerima teori pilihan rasional (Wirawan, 2014: 190). Seperti dikemukakan oleh (Hedstrom, & Charlotta, 2008), teori pilihan rasional cenderung sebagai esensi terhadap beberapa “psikologi sosial eksperimental” serta karya-karya terbaru yang berfokus kepada banyak teori perkembangan yang memiliki kaitan dalam tingkatan sosial makro.

Definisi pilihan rasional sangat beragam. Huber (1997) mengajarkannya melalui analisa yang melihat perilaku ataupun tindakan seseorang sebagai hal yang sengaja (*purposive*). Begitu pula kebalikan, para ahli lainnya memberi pemahaman dengan begitu ketat, sehingga tidak mengikutsertakan seluruh pilihan rasional yang sifatnya sosiologis dengan memberi batasan agar para pelaku perlu dimaknai sebagai seseorang yang termotivasi oleh kepentingan diri (Mansbridge, 1980).

Para teoritis pilihan rasional menganggap intensionalitas. Penjelasan pilihan rasional (*rational choice explanations*) adalah bagian dari apa yang disebut penjelasan maksud (*intentional explanations*), di mana bukan cuma menjelaskan tiap-tiap individu yang melakukan tindakan berdasarkan suatu tujuan, namun juga memperhitungkan praktik-praktik sosial layaknya keyakinan/

kepercayaan masyarakat begitupun kemauan-kemauan orang-orang yang terlibat. *Intentional explanations* kerap bersamaan suatu pencarian dampak-dampak yang tak diinginkan (efek agregat) dari tindakan purposif para pelaku.

Selain itu, penjelasan pilihan rasional (*rational choice explanations*) mengatribusikan rasionalitas pada tindakan sosial. Rasionalitas dimaknai ketika individu melakukan tindakan serta merespon, maka mempunyai *planning* yang koheren, dan melakukan percobaan pengoptimalan kepuasan dirinya berdasarkan preferensi dirinya, dan juga sebisa mungkin meminimalisir biaya yang diperlukan. Rasionalitas merekomendasikan “asumsi keterkaitan” dengan menjelaskan bahwa individu mempunyai “urutan preferensi” dari banyak jenis pilihan yang tersedia. Berdasarkan urutan pilihan itu, banyak ilmuwan sosial menyimpulkan terdapat “fungsi nilai” (*utility function*) yang mengatribusikan satu nomor terhadap tiap pilihan berdasarkan tingkatan pada urutan preferensi. Agar dapat disebut masuk akal, urutan preferensi seseorang perlu memenuhi kriteria tertentu.

Penjelasan pilihan rasional (*rational choice explanations*) mengamati perilaku individu yang mengacu terhadap kepercayaan dan preferensi subjektif individu, tidak dalam situasi objektif yang dialami individu itu sendiri. Sehingga bisa saja terjadi tindakan rasional yang dilakukan seseorang sedangkan dia berdasar terhadap kepercayaan yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan terdapat pencarian atas alat/sarana paling baik guna memenuhi tujuan maupun keinginannya. Adapun agar dapat disebut rasional seseorang diharap dapat merampungkan informasi sebagai pembuktian terhadap keyakinannya. Namun, perampungan informasi berkelanjutan dan tidak ada akhirnya sebagai simbol ketidakrasionalan, utamanya apabila situasinya suatu urgensitas. Seperti apabila terjadi serangan militer besar-besaran, maka pencarian strategi dalam menghadapi serangan tidak akan sebentar serta bisa berakibat pada konsekuensi tidak baik.

Para teoritis pilihan rasional kerap menitikberatkan pilihan terhadap risiko dengan dua alasan; mereka berpendapat bahwa kondisi tidak pasti tidak pernah eksis, walaupun eksis, tidak bisa dipakai guna mengungkapkan tindakan orang-orang. Pada saat berhadapan dengan resiko, diasumsikan bahwa orang-orang dapat memperhitungkan “nilai yang diharapkan” terhadap setiap tindakan.

Buku “an Economic Theory of Democracy” karya Anthony Downs merupakan buku pertama yang mengeksplorasikan aplikasi penjelasan pilihan rasional (*rational choice explanations*) pada fenomena politik. anggapannya yakni para politikus dan pemilih (*voters*) melakukan tindakan secara rasional. Dasar motivasi para politikus terkait kebutuhan maupun keinginan pribadi misal pendapatan, prestise dan kekuasaan. dikarenakan atribut-atribut ini tidak bisa didapatkan melainkan apabila diangkat, maka politikus mengoptimalkan dukungan politiknya, sedangkan kebijakan-kebijakan mereka pada kenyataannya sekadar sarana memperoleh tujuan itu.

Dibandingkan holistik, teori rasionalitas sifatnya lebih individualistik, di mana teori rasionalitas melihat kejadian sosial makrostruktur sebagai hal berasal dari interaksi individu, teori rasionalitas berargumen terkait kejadian dengan skala tidak kecil itu bukan telah ada sebelumnya (*pregiven*). Teori rasionalitas beranggapan bahwa manusia memiliki kemauan mendapat sesuatu dan ingin sukses, dengan keinginan memperoleh hasil secara cepat. Berlaku pula apabila seseorang berkorban demi keinginan orang lain. Seperti prajurit yang memiliki risiko kematian jika hendak menyelamatkan orang lain.

Teori rasionalitas memiliki ciri-ciri:

1. Manusia berupaya mengoptimalkan kepuasan yang mereka peroleh dari dunia sosial. “Kepentingan” berkaitan dengan dunia sosial yang memiliki sifat objektif.
2. Tiap anggota masyarakat memiliki kuasa kontrol tawar-menawar barang berharga sosialnya. Barang berharga (*valuables*) meliputi unsur-unsur/barang-barang dengan konsekuensi material dan psikologis. Kepuasan individu dioptimalkan hingga tingkat penawaran barang berharga yang dikuasai oleh seseorang termaksimalkan, dan kebutuhan maupun permintaan barang berharga tersebut terminimalkan.
3. Interaksi bersama orang lain pada dunia sosial dimaknai sebagai serangkaian negosiasi dagang atau permainan yang sifatnya kompetitif. Tujuan dari partisipasi sosial yakni meningkatkan penawaran (persediaan) barang berharga sosial (*social valuables*) dengan proses interaksi. Hal ini melibatkan pertukaran barang berharga untuk mendapatkan *profit* atau mungkin melibatkan lebih banyak upaya untuk menggunakan penawaran agar bisa mengontrol, memaksa, dan/

atau mengeksploitasi orang lain. Dalam banyak teori rasionalitas, total biaya untuk memperoleh total keuntungan dipertahankan nol, yaitu permainan ini adalah “zero-sum game”. Ini berarti keuntungan diri sendiri otomatis mengisyaratkan adanya kerugian pihak lain.

4. Perilaku manusia dilaksanakan dengan masuk akal, sebab pertimbangannya pada manfaat/hasil serta kerugian yang diperoleh.
5. Sebab keinginan serta kepuasan manusia cenderung tetap, maka terdapat pola reaksi stabil yang memberikan penawaran pertukaran reguler yang dimengerti oleh partisipan sifatnya normatif, yakni tepat secara moral. Pola pertukaran yang stabil ini sebagai kejadian berskala besar. Untuk membalik pemahaman ini, fenomena makro struktural selalu direduksi menjadi pertukaran yang rasional di antara para individu.
6. Akan tetapi, fokus utama kepentingan pada teori rasionalitas bukanlah pada rencana/ rancangan sosial struktural yang muncul. Sebaliknya, terdapat kecenderungan yang tidak begitu spesifik dalam meneliti dan menganalisa interaksi kelompok kecil, interaksi kelompok kecil hipotesis, lalu memperluas hasil ke tingkat generalisasi empiris. Generalisasi empiris menjadi balok pembangun terhadap teori.
7. Terdapat konvergensi umum (titik temu) di antara teori rasionalitas sosiologis serta teori ekonomi dan teori permainan (*game theory*) sebab masing-masing memberikan penekanan pada perolehan maksimal profit individu di dalam penghitungan tindakan rasional (Wirawan, 2014: 190-227).

Teori pilihan rasional lebih memberikan pusat perhatiannya pada aktor. Aktor dilihat sebagai manusia yang memiliki tujuan atau memiliki maksud. Artinya aktor selalu memiliki tujuan, dan tindakannya tertuju pada usaha guna mencapai tujuan itu. Aktor pun dilihat memiliki pilihan (atau nilai, keperluan). Teori pilihan rasional tak mengacuhkan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang penting yakni kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

Meski teori pilihan rasional berawal dari tujuan atau maksud aktor, tetapi teori ini menampakkan sekurang-kurangnya dua pemaksa utama tindakan. Pertama yaitu keterbatasan sumber, setiap aktor memiliki sumber yang berbeda maupun akses yang berbeda terhadap sumber daya

yang lain. Bagi aktor yang memiliki sumber daya yang besar, pencapaian tujuan mungkin relatif mudah. Tetapi bagi aktor yang memiliki sumber daya tidak banyak, pencapaian tujuan mungkin sulit atau mustahil sama sekali.

Aktor diasumsikan sebagai individu yang memiliki tujuan, aktor juga mempunyai suatu pilihan yang memiliki nilai dasar yang digunakan aktor untuk menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya, selain itu aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Sedangkan sumber daya adalah dimana aktor memiliki kontrol serta memiliki kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor (Ritzer & Goodman, 2012: 85).

Menurut Weber, tindakan rasional berkaitan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Bahwa berawal dari adanya pilihan yang dipertimbangkan dengan rasio manusia lalu ditindaklanjuti dengan tindakan yang nyata. Weber membedakan tindakan sosial manusia, seperti tindakan rasionalitas instrumental (*zwerk rational*). Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Pertimbangan yang dimaksud antara lain untuk mengejar kepentingan rasional.

Rasionalitas adalah konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya sampai mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional menurut Weber berkaitan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan (Johnson, 1994: 220).

Menjumpai keinginan ataupun latar belakang aktor pada pelaksanaan tindakan yakni bagian dari tugas utama dari ilmu sosial interpretif. Inilah yang berdasarkan sejarah dikatakan *verstehen*. Sehingga, guna bisa menjumpai rasionalitas tindakan yang dilaksanakan negara, melakukan interpretasi keputusan, atas dasar kejadian-kejadian yang kaitannya dengan negara terkait.

Selanjutnya, argumen yang memberikan penekanan pada komponen kognitif dalam mempertimbangkan pembuatan keputusan didukung pula adanya motivasi (Shilling & Mellor, 2001) yang menyebutkan proses

belajar (kognitif) tak cuma diperoleh dari akumulasi perampungan informasi namun juga sebagai kejadian akibat pengaruh relasi dengan rekan, sanak keluarga, komunitas begitupun kekuatan-kekuatan yang lain. Sehingga bisa disebutkan bahwa dalam teori pilihan rasional menggunakan perhitungan-perhitungan kognitif yang mengedepankan pemaksimalan keuntungan bagi pihak-pihak yang menerapkannya.

Disisi lain, Marsh dan Stocker menjelaskan teori pilihan rasional menekankan pada keputusan individu. Menurut keduanya, teori ini memaparkan tindakan individu serta hasil yang diperoleh (Marsh dan Stocker, 2017: 81). Kemudian disebutkan bahwa sebelum ditetapkan, untuk menyusun kebijakan atau keputusan, aktor tetap memperhitungkan paradigma ataupun argumen individu lain. Marsh and Stoker menyebutkan terkait pertimbangan yang dilaksanakan yakni sebagai bentuk perhitungan logika dan matematika, hingga bisa diprediksi hasil yang bisa menyumbangkan banyak keuntungan terhadap aktor.

Ahli Teori Pilihan Rasional

James Coleman

James Coleman merupakan salah satu ahli teori pilihan rasional yang cukup dikenal. Awalnya teori pilihan rasional berada di pinggiran aliran utama teori ilmu sosial. Melalui usaha James Coleman, teori ini menjadi salah satu teori “hebat” pada masa kini. Disebut demikian sebab tahun 1989 Coleman membuat jurnal “*Rationality and Society*” guna menyebarkan pemahaman yang asalnya dari pandangan pilihan rasional. Selain itu, Coleman juga menerbitkan buku yang begitu berpengaruh, “*Foundations of Social Theory*” atas dasar pandangan pilihan rasional. Terakhir, Coleman menjadi “*President the American Sociological Association*” tahun 1992 dan melalui forum itu dimanfaatkan guna memacu kemajuan teori pilihan rasional dan memberikan nama “*The Rational Reconstruction of Society*”.

Teori pilihan rasional merupakan satu-satunya teori yang mungkin menghasilkan integrasi banyak paradigma sosiologi. Coleman dengan percaya menyatakan bahwa pendekatannya beroperasi mulai dari dasar metodologi individualisme serta bisa memakai teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro guna menggambarkan fenomena tingkat makro (Hechter dan Kanazawa, 1997).

Teori pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (*preferensi*). Orientasi besarnya pilihan rasional menurut Coleman memiliki ide dasar bahwa “orang-orang bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan, di mana nilai-nilai atau pilihan-pilihan yang membentuk tujuan tersebut” (Coleman, 1990: 13). Artinya Coleman menafikan tindakan yang tanpa sengaja, atau tidak disengaja.

Menurut Coleman, sistem sosial menjadi pusat perhatian sosiologi, di mana fenomena makro perlu dijelaskan oleh faktor internalnya, utamanya oleh faktor individu. Alasan memusatkan perhatian terhadap individu disebabkan intervensi guna mewujudkan perubahan sosial. Sehingga, inti dari pandangan Coleman yaitu teori sosial tak cuma berupa latihan akademis, namun juga terdapat keharusan bisa memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial melalui intervensi tersebut. Fenomena pada tingkat mikro selain yang sifatnya individu bisa menjadi sasaran perhatian analisisnya. Interaksi antar individu dipandang sebagai akibat dari fenomena yang mengemuka di tingkat sistem, yakni, fenomena yang tidak dimaksudkan atau diprediksi oleh individu (Coleman, 2009: 7).

Fokusnya tak cuma terhadap peranan seseorang pada proses penyusunan keputusan, melainkan teori pilihan rasional bisa pula dipakai pada level kelompok atau korporat. Coleman menjelaskan bahwa makna mikro pada teori pilihan rasional ini bisa dipakai guna menggambarkan perilaku kolektif, sebab terdapat pemindahan pengendalian seseorang ke pihak lainnya yang lebih banyak (Ritzer, 1997: 396). Hal ini bisa diamati dari kasus seseorang yang memerintahkan sejumlah individu yang kemudian hendak melaksanakan perintahnya. Hingga Coleman memaparkan terkait teori pilihan rasional yang bisa pula menggambarkan perilaku korporat, dengan catatan tindakan tersebut sebagai sikap dari korporat (Ritzer, 1997: 398). Pernyataan tersebut disepakati pula oleh John Scott yang mengatakan manusia memiliki peran penting pada teori pilihan rasional. Namun ia turut memandang peranan aktor lainnya, yaitu kelompok. Menurutnya, individu dengan pengaruh dominan dalam aparat kerap menggerakkan kelompok tersebut.

Sehingga, pemahaman Coleman dan Scoot mempunyai persamaan terkait peranan begitupun tindakan aktor korporat serta kelompok dengan berdasar pada teori pilihan rasional. Ada dua kondisi yang bisa

dipakai guna menggambarkan hubungan antara individu dengan kelompok berdasarkan teori pilihan rasional, 1) apabila pemahaman individu dipakai sebagai paradigma bersama oleh kelompok, 2) jika tindakan yang dilaksanakan kelompok ataupun korporat dimaksudkan guna memperoleh keuntungan bersama yang maksimal (Arjawa, 2014: 51-53).

Dari pemaparan James Coleman, satu dari beberapa sumber, yang memiliki peran pada proses penyusunan kebijakan dalam teori pilihan rasional yaitu aktor serta sumber daya. Disini, peran aktor menjalankan serta sebagai pengendali sumber daya terhadap pencari sumber daya (Ritzer 2007, 399). Maka, bisa disebutkan bahwa kendali atas sumber daya begitu bergantung terhadap kemahiran aktor terkait, berdasarkan perhitungan yang lebih menguntungkan baginya. Adapun aktor bisa berupa korporat (kelompok) maupun individu. Dari pandangan itulah lalu bisa disebutkan bahwa pemerintah sebagai aktor yang menyusun keputusan bagi tujuan negara.

Coleman menyatakan pula bahwa dalam melaksanakan suatu tindakan, individu melakukannya dengan dasar pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh. Dalam kaitannya, pertimbangan tersebut dilaksanakan guna memperoleh keputusan paling baik. Maka, teori pilihan rasional bisa dijalankan pada level masyarakat, baik sektor budaya maupun politik. Bahwa individu atau kelompok membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional.

Praktik Teori Pilihan Rasional

Anthony Downs mengeksplorasikan aplikasi penjelasan pilihan rasional (*rational choice explanations*) pada fenomena politik. Orang yang terlibat di dunia politik menjadi aktor sebagai politisi maupun pemilih dianggap bertindak rasional. Hal tersebut berkaitan dengan motivasinya melakukan hal tersebut didorong oleh keinginan untuk mendapat keuntungan, kekuasaan dan jabatan. Keseluruhan hal tersebut di atas, hanya akan dapat diperoleh jika yang bersangkutan memiliki kewenangan.

Adapun hal tersebut juga berlaku pada saat individu berkorban demi kepentingan dan keinginan orang lain. Sebagaimana halnya yang terjadi pada aktor politik pada pemilihan kepala daerah yang mendukung pasangan calon kepala daerah, meski tampak terlihat berkorban untuk calon yang didukung, namun juga ada keinginan untuk mendapatkan

sesuatu dari yang dilakukan, dengan cara mengeluarkan dana untuk orang lain.

Aktor menjadi pusat perhatian dalam teori pilihan rasional. Aktor dianggap sebagai manusia yang memiliki tujuan atau maksud. Maksudnya aktor selalu memiliki tujuan, dan tindakannya sebagai usaha guna mencapai tujuan. Aktor pun dianggap memiliki pilihan (atau nilai, keperluan). Teori pilihan rasional tak memperdulikan hal yang menjadi pilihan atau sumber pilihan aktor. Paling penting yaitu kenyataan bahwa tindakan dilaksanakan guna pencapaian tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor. Sehingga aktor akan melakukan hal-hal yang dapat mengantarkannya pada tujuan dan keinginannya.

Walaupun teori pilihan rasional berasal dari tujuan ataupun maksud aktor, akan tetapi teori ini menunjukkan adanya pemaksa tindakan, yaitu keterbatasan sumber. Setiap aktor memiliki sumber yang tidak sama maupun akses yang tidak sama terhadap sumber daya lainnya. Bagi aktor yang memiliki sumber daya yang besar, pencapaian tujuan mungkin relatif mudah. Namun bagi aktor yang memiliki tidak banyak sumber daya, untuk mencapai tujuan mungkin sulit atau mustahil. Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan pada setiap hal yang dilakukan (Ritzer & Goodman, 2012: 85).

Teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) sebetulnya menaruh pusat perhatian terhadap aktor. Aktor dilihat sebagai manusia yang memiliki tujuan dalam hidupnya. Selain memiliki tujuan, aktor juga dipandang memiliki pilihan di dalam menentukan tujuan-tujuannya. Sehingga, tindakan yang dilaksanakan aktor kerap kali dihubungkan dengan orientasinya pada keinginan mewujudkan tujuan yang sesuai pilihannya.

Aktor politik memiliki kemampuan dan akses sumber daya, berupa sumber daya material/ dana yang dikeluarkan oleh aktor untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung, dan sumber daya berupa manusia yang terdiri dari jaringan relawan dan tokoh, kepala desa, dan lainnya yang digerakkan oleh aktor untuk membantu kemenangan pasangan calon kepala daerah yang didukung. Begitu pula dengan adanya struktur tim kemenangan yang terdiri dari partai pengusung dari level kabupaten, kecamatan, desa, hingga tempat pemungutan suara (TPS). Secara keseluruhan, terjadinya proses saling

memberi maupun menerima (*take and give*) antara aktor, dengan aktor lain, seperti calon kepala daerah, tokoh, kepala desa, dan lainnya. Sumber daya yang dimiliki oleh aktor berupa dana dan jaringan, termasuk keahliannya dalam menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki, menjadikan aktor lain, dalam hal ini calon kepala daerah menghargainya dan menempatkannya berada pada posisi penting, sebagai orang yang telah membantu mengegolkan sebagai kepala daerah, dan aktor lain memberi rasa hormat, dengan melibatkannya dalam pengambilan keputusan penting di dalam lingkungan pemerintah yang dipimpin. Sebab dulunya aktor lah yang membiayai seluruh biaya pencalonan dan kemenangan dirinya, begitu pula pada periode berikutnya ikut serta menanggung biaya pencalonan, sehingga wajar jika berkenan untuk berbagi saat menjabat.

Dalam teori pilihan rasional (*rational choice theory*), aktor adalah manusia yang memiliki tujuan dan maksud, seluruh tindakan aktor tertuju pada tujuan dan maksud yang hendak dicapai. Hal ini juga terlihat dari aktor politik yang sejak awal aktif dalam melakukan komunikasi dan ajakan untuk membangun kerjasama dan koalisi.

Dalam praktik pembangunan, maka kegagalan dan keberhasilan program pembangunan ditentukan oleh aktor pembangunan. Aktor utama pembangunan adalah pemerintah pada seluruh level, dari pusat sampai desa. Maka keberhasilan dan kegagalan pembangunan ditentukan oleh pemerintah. Dalam praktiknya, pembangunan tidak semata-mata menjadikan manusia hanya sebagai objek atau sasaran saja. Namun manusia atau masyarakat adalah subjek atau pelaku pembangunan. Maka keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa tidak ada bisa dilaksanakan bila masyarakat tidak ikut serta di dalam pelaksanaan. Baik sebagai pemilih suara yang memilih (*voter*), maupun sebagai saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Keterlibatan pemilih atau warga pada kontestasi pemilihan tentu saja memiliki maksud dan tujuan tertentu. Pilihan untuk untuk serta di dalam pemilihan didorong oleh adanya tujuan yang hendak dicapai. Apakah pilihannya ditentukan oleh adanya tujuan untuk mendapatkan honor dari pekerjaan yang dijalani sebagai panitia atau saksi di TPS. Bila pula didorong oleh tujuan untuk memenangkan calon tertentu yang didukung.

“Memberi maaf lah,
Karena memberi maaf,
Lebih dekat,
Kepada Taqwa”

(Q.S: Al-Baqarah [2]: 237)



BAB V

Teori Realitas Sosial

Pengertian Teori Realitas Sosial

Piotr Sztompka membagi dua tingkatan realitas sosial (*social reality*), tingkatan individualitas dan tingkat totalitas. Tingkat individualitas meliputi individu atau anggota kolektivitas konkret (asosiasi, komunitas, kelompok, kelas gerakan, serta semacamnya). Tingkat totalitas merupakan kesatuan sosial abstrak, semacam supra individu, menggambarkan realitas sosial (masyarakat, budaya, formasi sosio-ekonomi, peradaban, sistem sosial, begitupun lainnya). Kesatuan sosial tidak dimaknai sekadar kumpulan maupun sebagai kesatuan metafisik, namun sebagai struktur dan individu sosial subjek yang otonom namun agen yang terbatas. Secara potensial dan secara aktual, terdapat dua bentuk keberadaan realitas sosial. Realitas sosial potensial ketika mendiskusikan terkait kecondongan bawaan, benih ataupun kuman masa depan, kapasitas, kemampuan, kekuatan dan sebagainya. Realitas sosial aktual ketika mendiskusikan proses, perkembangan perilaku, aktivitas, transformasi dan sebagainya. Dua pola realitas sosial tersebut bisa diadopsi tiap komponen utama kehidupan sosial. Struktur bisa dianggap hal yang berpotensi mengaktualkan dirinya (berkembang) dalam beroperasi. Agen bisa mengaktualisasikan dirinya (mobilisasi) dengan tindakan. Sehingga, dalam menyilangkan dua dikotomi (tingkat dan realitas sosial) ada empat konsep sebagai landasan model teoritis, struktur dan agen, serta operasi dan tindakan. Dimensi vertikal, menjelaskan terdapat hubungan saling melengkapi kemunculan dengan tindakan. Munculnya struktur sebab terdapat agen; walaupun struktur meliputi agen,

tetapi struktur mempunyai ciri khas serta keteraturannya sendiri. Struktur merupakan jaringan hubungan antaragen, dengan tidak mengurangi jumlah agen. Agen pun tak mengurangi lokasi strukturalnya. Agen mempunyai otonomi, integritas, serta kebebasan relatif dalam memilih serta memutuskan. Agen merupakan kesatuan yang mempunyai isi, dengan ciri serta keteraturan khusus. Begitu juga operasi struktur (berfungsinya masyarakat) perlu diamati berkaitan dengan tindakan yang dilaksanakan agen. Walaupun tindakan sebagai isi dari beroperasinya struktur, tetapi operasinya tak bisa diubah menjadi tindakan, gabungan beberapa tindakan yang berhubungan mendapatkan momentum, pola, ataupun rangkaian logikanya sendiri. Operasi struktur tak sekadar penjumlahan tindakan, melainkan melebihi itu. Struktur merupakan kehadiran statis dari agen (Sztompka, 2014: 251-252).

Tiap orang yang memiliki pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, serta lingkungan pergaulan atau sosial yang tidak sama sehingga akan memaknai realitas sosial berdasarkan konstruksinya masing-masing. Misalnya terkait demonstrasi mahasiswa, satu kelompok bisa jadi menganggap gerakan anarkis, di luar batas serta mengganggu masyarakat, buruknya di cap sebagai alat permainan elit politik tertentu. Namun, orang dari kelompok sosial lainnya, bisa jadi mengkonstruksi gerakan mahasiswa, demi memperjuangkan nasib rakyat, serta berjuang tanpa pamrih. Konstruksi yang mereka buat dilengkapi dengan legitimasi tertentu, sumber kebenaran tertentu, bahwa apa yang mereka ucapkan dan yakini itu adalah benar adanya, memiliki alasan logis yang tak lemah.

Selain plural, konstruksi sosial itu sifatnya juga dinamis. Demonstrasi mahasiswa sebagai produk dari konstruksi sosial, kerap kali muncul dalam sebuah dialektika sosial. Pada level individu, dialektika berlangsung antara faktisitas objektif dan makna subjektif demonstrasi mahasiswa bagi individu. Sedangkan pada level sosial, pluralitas konstruksi terhadap demonstrasi mahasiswa juga mengalami proses dialektis. Sebagai hasil konstruksi sosial, maka realitas tersebut merupakan realitas subjektif sekaligus realitas objektif. Pada realitas subjektif berkaitan dengan makna, interpretasi, serta hasil relasi individu dengan objek. Tiap individu memiliki latar belakang sejarah, pengetahuan, dan lingkungan yang tidak sama, yang bisa jadi menciptakan pemikiran yang juga tidak sama jika mengamati dan berhadapan dengan objek.

Begitu juga realitas memiliki dimensi objektif, sesuatu yang dialami,

sifatnya eksternal, terdapat di luar atau di dalam, tidak bisa kita tiadakan dengan angan-angan. Hal tersebut seperti bisa diamati dari rumusan, institusi, aturan-aturan yang ada, dan sebagainya. Dalam kasus demonstrasi mahasiswa, sebagai realitas objektif, gerakan mahasiswa memang ada, sesuatu yang berada eksternal di luar diri kita. Ia bisa kita lihat dari selebaran yang dibuat, aturan, orang-orang yang berdemonstrasi, dan sebagainya.

Sebaliknya, di dalamnya juga terkandung realitas subjektif, pandangan individu ketika berhadapan dan bersinggungan dalam menafsirkan demonstrasi mahasiswa. Dalam perspektif konstruksi sosial, kedua realitas tersebut saling berdialektika. Seseorang akan mencurahkan jika berlawanan dengan realita (eksternalisasi), begitu juga dapat dipengaruhi oleh kenyataan objektif yang ada (internalisasi) (Eriyanto, 2002: 14-17).

Realitas Sosial Objektif

Realitas sosial objektif merupakan gejala-gejala sosial yang ada pada kehidupan sehari-hari serta kerap kali ditemukan sebagai fakta oleh individu. Realitas objektif dipandang sebagai dunia yang objektif, diterima secara common sense, sebagai fakta serta tidak dibutuhkan verifikasi dalam membuktikannya. Seluruh realitas tersebut dianggap sebuah fakta yang diterima sebagai kebenaran serta bisa diamati, seperti umur, penghasilan serta pendidikan. Kridawati Sadhana menyebutnya dengan realitas empiris sebagai realitas objektif yang teramati di dalam inderawi. Realitas objektif dibentuk oleh pengalaman di dunia objektif yang terdapat di luar diri individu (Sadhana, 2016: 4).

Realitas Sosial Simbolik

Realitas simbolik merupakan bentuk simbolik dari realitas sosial objektif, yang khalayak ketahui dalam bentuk karya seni, fiksi, serta isi media (Bungin, 2011: 24). Realitas ini memaknai dan mengekspresikan dunia yang objektif serta melakukan penerjemahan ke dalam realitas baru. Realitas tersebut berbeda dengan realitas yang sebenarnya (realitas objektif) sebab sudah melalui berbagai saringan serta predisposisi individual. Contoh dari realitas simbolik yakni seperti tayangan berita maupun iklan di televisi, surat kabar, serta majalah. Pada tahap ini, realitas di dunia nyata diubah serta dibentuk dalam kodifikasi ataupun simbol-simbol yang mampu diterima khalayak. Suatu peristiwa yang terjadi pada dunia nyata diupayakan agar ditayangkan jurnalis dalam media

kemudian melalui berbagai proses produksi berita yang panjang menjadi gambar-gambar atau berita-berita dalam media yang bisa dipahami khalayak. Betapapun para pekerja media berupaya menerjemahkan maupun mengkopikan realitas yang sebenarnya, tetapi realitas simbolik yang ditampilkan tetap berbeda dengan realitas yang sesungguhnya. Dalam realitas simbolik terjadi proses eksternalisasi. Ada proses yang menyebabkan bahwa realitas tidak seperti adanya yang direkam, ditulis dan diberitakan oleh media.

Realitas Sosial Subjektif

Realitas subjektif merupakan realitas sosial yang asalnya dari realitas sosial objektif dan realitas sosial yang simbolik kemudian terkonstruksi dalam diri khalayak. Realitas subjektif yakni realitas yang hadir dalam benak dan kesadaran individu. Realitas tersebut bisa berasal dari realitas objektif maupun realitas simbolik, yang secara bersama-sama dapat mempengaruhi realitas subjektif seseorang sehingga setiap individu bisa jadi memiliki pemahaman dan realitas masing-masing. Segala aspek yang terdapat dalam diri individu seperti pengalaman dan latar belakang kehidupannya, termasuk pendidikan dari sejak kecil hingga dewasa dan saat individu melakukan interaksi memiliki andil guna membentuk pandangan dan pemahaman individu terhadap realitas. Proses internalisasi pada realitas subjektif, saat individu memperoleh pengetahuan, etika serta *value*, serta hal lain yang tersaji pada pemahaman individu atas realitas (Fachruddin, 2015: 35-37).

Dalam teori realitas sosial bertumpu pada interaksi individu dengan lingkungan masyarakat di mana individu berada, keduanya saling memberi pengaruh yang besar dalam menciptakan realitas sosial. Lingkungan mempengaruhi individu, dan individu mempengaruhi masyarakat.

Ahli Teori Realitas Sosial

Peter Berger dan Thomas Luckmann

Mengulas realitas sosial (*social reality*), tidak bisa terlepas dari bangunan teoritik yang sudah dipaparkan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann. Realitas sosial (*social reality*) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul "The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge" (1966). Berger dan Luckmann menjelaskan

proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.

Menurut Margaret Poloma, pemikiran Berger memandang realitas kehidupan sehari-hari, mempunyai dimensi-dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen di dalam penciptaan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subjektif). Dalam mode yang dialektis, di mana terdapat tesis, antitesis, dan sintesis. Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Baik manusia dan masyarakat saling berdialektika di antara keduanya. Masyarakat tidak pernah sebagai suatu produk akhir, tetapi tetap sebagai proses yang sedang terbentuk (Poloma, 1984: 308-310).

Seseorang bisa menjadi seorang pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal di dalam masyarakatnya, bukan pribadi yang menyendiri atau terpisah dari masyarakatnya. Dengan begitu ia akan mengalami proses dialektis dengan masyarakat di mana ia tinggal dan berada. Proses dialektis tersebut disebut sebagai momen, yang memiliki tiga tahapan.

Pertama, eksternalisasi. Usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada. Manusia tidak bisa kita pahami sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah suatu dunia dihasilkan. Dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.

Eksternalisasi merupakan bentuk eksistensi manusia yang ada pada dirinya sendiri, di mana suatu lingkungan tertutup lalu keluar untuk menunjukkan ekspresi diri pada dunia sekeliling di mana manusia tinggal dan berada. Eksternalisasi dilakukan sebab manusia secara biologis tidak mempunyai dunia-manusia dalam dirinya, maka ia menciptakan dunia manusia di luar dirinya. Dunia tersebut yang dimaknai sebagai kebudayaan. Tujuan utamanya menyediakan struktur-struktur kokoh pada manusia yang secara biologis tidak dimiliki sebelumnya, untuk menemukan jati-diri sebagai manusia. Hal tersebut terlihat dari awal proses kebudayaan, di mana manusia menciptakan bahasa, dan berdasar

juga dengan sarana bahasa itu, dia membangun suatu bangunan simbol-simbol yang menghayati semua aspek kehidupan. Ini disebut sebagai kebudayaan “nonmaterial” (produk-produk kultur secara historis).

Eksternalisasi yang dibangun manusia lalu membentuk sesuatu tak sama dari luar dirinya disebut sebagai eksternalisasi yang terobjektifikasi. Dunia yang dibangun mendapatkan sifat realitas obyektif. Sehingga karena sifatnya yang berupa realitas obyektif, maka disebut juga melegitimasi diri (self legitimating). Eksternalisasi adalah proses di mana manusia yang tersosialisasi bersamaan, menciptakan arti secara kognitif maupun afektif. Sebab, perkembangan manusia belum usai saat dilahirkan. Ia berproses melalui interaksi dengan lingkungan serta bereaksi terhadap lingkungan secara terus-menerus, baik fisik maupun nonfisik, hingga ia remaja, dewasa, tua, lalu mati. Maknanya, selama manusia hidup akan selalu berinteraksi dengan lingkungan. Sifat yang dimiliki sejak awal belum usai, dan dilakukan berkelanjutan guna menemukan dan membentuk eksistensi diri.

Kedua, objektivasi. Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil tersebut menciptakan realitas obyektif yang bisa jadi akan menghadapi penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Objektivasi manusia mengartikan bahwa manusia dapat mengobyektifikasikan bagian dirinya dalam kesadaran sendiri, menghadapi dirinya dalam gambaran yang kerap kali ada sebagai unsur-unsur obyektif dunia sosial. Dunia obyektifikasi sosial diperoleh dari pengeksternalisasian kesadaran, menghadapi objektivasi yang dieksternalisasi menjadi realitas sosial. Konkritnya objektivikasi merupakan proses di mana manusia mewujudkan banyak realitas dalam kehidupannya misalnya membangun lembaga-lembaga sosial, merumuskan nilai, istilah, bahasa maupun makna-makna yang mengaturnya. Begitu terwujud, terciptalah produk manusia yang memperoleh pengakuan serta dimiliki bersama-sama dalam masyarakat.

Saat itulah, banyak realitas berganti menjadi produk yang kemudian mengikat serta mengawasi kehidupan manusia hingga menjadi ancaman terhadap kehidupan manusia. Misal, aktivitas eksternalisasi manusia menciptakan alat guna memudahkan kehidupannya, seperti traktor untuk meningkatkan dan kemudahan dalam mengelola pertanian, atau bahasa untuk melancarkan komunikasi. Kedua produk tersebut diciptakan

untuk menghadapi dunia luar manusia. Setelah dihasilkan, kedua produk tersebut menjadi realitas yang objektif (objektivitas). Ia terpisah dengan individu penghasilnya, dan telah menjadi dirinya sendiri. Bahkan, ia dapat memaksa penghasilnya dengan logikanya sendiri. Realitas objektif traktor dapat menentukan bagaimana petani harus mengatur cara kerjanya. Ia secara tidak sadar telah didikte oleh traktor yang dibuatnya sendiri termasuk cara kerja traktor dan kebutuhan operasional traktor. Begitu pula bahasa, pola pikir manusia kemudian ditentukan oleh bahasa yang dibuatnya sendiri. Bahkan, mereka dapat bersengketa hingga perang akibat bahasa. Realitas objektif tersebut tidak sama dengan kenyataan subjektif individual. Realitas objektif menjadi kenyataan empiris, dapat dihadapi tiap individu maupun kelompok.

Ketiga, internalisasi. Proses internalisasi berupa penyerapan ke dalam kesadaran dunia yang terobjektifikasi sedemikian rupa hingga struktur dunia luar manusia menjadi penentu struktur subjektif kesadaran itu sendiri. Melalui internalisasi masyarakat kemudian berperan sebagai pelaku formatif terhadap kesadaran individu. Sejauh internalisasi sudah ada, kini individu mengerti banyaknya unsur dunia yang terobjektifikasi sebagai fenomena internal terhadap kesadarannya berbarengan ketika mengartikan unsur-unsur tersebut sebagai fenomena realitas eksternal. Proses menginternalisasikan dunia yang terobjektifikasi secara sosial merupakan proses yang juga menginternalisasikan identitas yang ditetapkan secara sosial. Maka internalisasi mengisyaratkan bahwa faktisitas objektif dunia sosial itu menjadi faktisitas subjektif. Individu mendapati lembaga-lembaga sebagai data dunia subjektif di luar dirinya, namun saat ini menjadi data kesadarannya sendiri. Itulah yang disebut dengan internalisasi.

Internalisasi merupakan kegiatan kembali menyerap dunia objektif dalam kesadaran subjektif sedemikian rupa sehingga individu terpengaruh struktur sosial ataupun dunia sosial di luar dirinya. Banyak macam unsur dari dunia yang sudah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus juga sebagai gejala internal bagi kesadaran. Manusia menjadi produk masyarakat akibat adanya internalisasi. Salah satu wujud internalisasi yakni sosialisasi. Berger menyatakan sosialisasi sebagai kekuatan masyarakat dalam mendidik manusia agar menjadi makhluk yang sesuai dengan lingkungan di sekitar tempatnya berada.

Internalisasi itu diantaranya berupa sosialisasi, bagaimana satu generasi menyampaikan nilai-nilai budaya yang ada pada generasi berikutnya. Generasi berikutnya diberikan pengetahuan agar hidup sesuai dengan nilai budaya yang mendasari struktur masyarakatnya. Generasi baru dibentuk oleh makna-makna yang telah di objektivaskan, mengidentifikasi diri dengannya. Tetapi tidak mempunyainya dengan sekadar mengetahuinya, ia juga mengungkapkannya.

Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, bukan juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, ia dibentuk/ dikonstruksi. Pemahaman semacam ini, menganggap realitas berwajah ganda/ plural. Tiap orang bisa memiliki konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Berdasarkan perspektif konstruksi sosial yang dibangun oleh Berger, kenyataan bersifat plural, dinamis dan dialektis, tidak bersifat tunggal, yang statis dan final, melainkan realitas yang sifatnya dinamis dan dialektis. Kenyataan itu sifatnya plural, sebab terdapat relativitas sosial karena dari adanya pengetahuan dan kenyataan. Sesuatu yang riil bagi seorang biarawan, tidak riil bagi seorang pengusaha, pengetahuan seorang penjahat tak sama dengan pengetahuan kriminolog (Azka, 1994: 16-17).

Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial berkaitan pula dengan kehadiran individu, baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas mempunyai arti. Realitas tersebut dikonstruksi dan diartikan secara subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas secara objektif. Seseorang mengkonstruksi realitas sosial dan rekonstruksinya dalam dunia realitas, memantapkan realitas tersebut atas dasar subjektivitas individu lain pada institusi sosialnya.

Institusi masyarakat diciptakan, dipertahankan dan diubah berdasarkan tindakan dan interaksi manusia. Walaupun masyarakat dan institusi sosial tampak nyata secara objektif, tetapi semua dibangun dalam definisi subjektif dengan proses interaksi. Objektivitas bisa terjadi apabila diberikan penegasan berulang kali oleh orang lain yang mempunyai makna subjektif yang tak berbeda. Pada tingkat generalitas tertinggi manusia membangun dunia dengan arti simbolik yang universal, yakni paradigma hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial begitupun memaknai berbagai bidang kehidupannya.

Institusionalisasi muncul bersamaan dengan munculnya tipifikasi (proses mengklasifikasikan sesuatu menjadi tipe-tipe tertentu) oleh orang-orang tertentu yakni aktor. Tipifikasi ini disebut institusi. Institusi selalu dibagi oleh sesama anggota kelompok sosial. Tiap institusi melakukan pemilihan mekanisme kontrolnya masing-masing. Mekanisme kontrol ini kerap kali dilengkapi dengan sanksi. Setiap anggota berkewajiban meraih penghargaan sosial jika menaati realitas dalam institusinya ataupun menanggung risiko memperoleh konsekuensi hukuman apabila menyalahi kontrol yang ada. Ada asas penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) bagi anggota masyarakat.

Realitas sosial adalah kehidupan manusia yang terbentuk akibat proses yang terus-menerus, yakni gejala sosial sehari-hari, dimana dalam pengertian sehari-hari disebut “pengalaman bermasyarakat”. Atau dengan kata lain, realitas sosial itu tersirat dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui tindakan sosial seperti komunikasi lewat bahasa, bekerjasama lewat organisasi-organisasi sosial. “Pengalaman bermasyarakat” inilah sebenarnya esensi masyarakat itu. Realitas sosial seperti ini ditemukan dalam pengalaman intersubjektif (intersubjektivitas), merujuk pada struktur kesadaran umum menuju kesadaran individu dalam kelompok yang saling berinteraksi. Maka jika ingin mengetahui, mempelajari, menjelaskan dan memahami esensi masyarakat, diperoleh dengan mempelajari “pengalaman bermasyarakat” atau realitas sosial (Berger, 1966: xv).

Praktik Teori Realitas Sosial

Dalam teori realitas sosial akan terwujud hubungan sosial, atau kontak sosial, ketika terdapat interaksi sosial yang diulang-ulang menurut pola yang sama dan bertahan untuk waktu yang lama (*social contact*) (Soekanto, 2005: 113). Terjadinya kontak sosial bukan semata-mata tergantung dari tindakan, namun tergantung pula dari respon terhadap tindakan itu sendiri. Sehingga menjadi jelas dan terang, bahwa di dalam interaksi sosial selalu melibatkan lebih dari satu orang, atau lebih dari satu kelompok/ pihak. Interaksi sosial tidak ada akan ada jika hanya dan satu orang (Narwoko, 2007: 16).

Perilaku aktor politik pada dinamika pemilihan kepala daerah menampakkan sikap yang baik, dengan cara membantu calon yang tidak memiliki kemampuan dari segi dana. Ritzer dan Goodman menyebut

bahwa aktor selalu berusaha untuk menampilkan kesan yang diinginkan dirinya dari orang lain. Sehingga ia akan berusaha untuk menampakkan sebagian perilaku dan sikapnya di depan orang lain, dan akan menyembunyikan sebagian lagi. Dengan kata lain, ada sejumlah perilaku yang ditampakkan aktor kepada orang lain, tapi perilaku tersebut bisa tidak ditampakkan pada orang selain orang-orang tersebut (Nasrullah, 2014: 94).

Inilah yang oleh Erving Goffman disebut dengan panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*backstage*) berdasarkan teori dramaturgi. Aktor selalu memiliki dua sisi dan bagian dalam hidupnya. Ruang bargaining dan negosiasi dengan eksekutif di ruang tertutup merupakan panggung belakang, sementara interaksi dirinya dengan konstituen, pendukung dan tim suksesnya merupakan panggung depan. Panggung belakang, merupakan identitas asli dari aktor, karena penampilannya apa adanya, asli tanpa aksesoris dan riasan, sementara di panggung depan, semua harus terlihat baik, penuh dengan riasan dan aksesoris (Suyanto & Amal, 2010: 175).

Di dalam proses interaksi sosial, oleh Anthony Giddens aktor disebut seringkali tidak hanya menyimpan berbagai pertimbangan rasional dalam diri dan pikirannya, tetapi juga ada banyak yang dikemukakan dalam ucapan dan tindakan. Seringkali aktor melakukan tindakan dalam bentuk diam-diam dalam mengaktualisasikan apa yang dianggapnya sebagai tindakan yang rasional tersebut. Setiap perilaku dan tindakan aktor memiliki tujuan yang disengaja (*intensional*) atau *purposive*. Tujuan itu yang akan terus memandu sikap, perilaku dan tindakan aktor. Sebagai aktor, dia akan berharap orang lain akan memahami sikap, perilaku dan tindakan yang dilakukan aktor, lebih jauh, dia berharap, orang lain akan bersikap, bertindak dan berperilaku yang bisa membantu tujuannya (Maliki, 2012: 305-307).

Peter Burke menyebut bahwa perilaku sosial tidak berdiri sendiri, namun sangat dipengaruhi oleh budaya di mana individu yang bersangkutan tinggal dan berasal. Artinya, perilaku sosial merupakan hal yang terbentuk oleh lingkungan tempatnya bergaul dan berinteraksi. Proses berinteraksi merupakan proses belajar beradaptasi terhadap kebiasaan yang telah ada sebelumnya, kemudian ditiru dan dipraktikkan (Burke, 2015: 66).

Hal ini senada dengan Pip Jones yang lebih cenderung menyebut bahwa perilaku sosial manusia sebagai perilaku yang dipelajari. Selanjutnya perilaku tersebut termasuk dalam teori struktural konsensus, yang secara jelas menyebut bahwa proses terbentuknya struktural konsensus dengan adanya sosialisasi, dan interaksi. Selanjutnya Jones menyebut bahwa para ahli yang setuju dengan teori konsensus ini menyebutnya dengan kebudayaan (Jones, 2009: 8).

Dalam ekonomi salah satu realitas sosial adalah uang. Uang diciptakan oleh manusia untuk membantu memudahkan manusia melakukan transaksi ekonomi. Uang diharapkan dapat dikendalikan oleh manusia untuk membantu semua keperluan yang dimiliki. Awalnya uang berfungsi sebagai alat tukar dengan barang yang hendak dibeli, atau jasa yang hendak digunakan. Namun dalam perjalannya uang kemudian mengatur kehidupan manusia. Uang yang mengatur bagaimana manusia bisa tidur, bisa makan, bisa berpakaian, berpikir dan seterusnya. Uang yang merupakan eksternalisasi dari kehidupan manusia, telah menjadi objek tersendiri yang terpisah dari manusia. Dengan kata lain uang mengalami objektivasi yang kemudian menginternalisasi manusia. Tak jarang maka kemudian ada paradigma, uang adalah segala-galanya, atau segalanya tidak berarti tanpa uang.

“Sesungguhnya, aku takut,
jika di daerah kekuasaanku,
ada keledai yang jatuh,
karena kondisi jalan yang buruk”

(Umar bin Khattab)



BAB VI

Teori Politik

Pengertian Teori Politik

Politik sejak awal dikemukakan sesungguhnya merupakan sesuatu yang baik, mulia dan bernilai tinggi. Sebuah idealita, cita-cita yang ingin mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, sebagaimana yang dikemukakan penggagas terdahulu tentang politik, Aristoteles. Aristoteles menyebutkan, politik merupakan kegiatan mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik (Surbakti, 1992: 3).

Aristoteles secara jelas menyebut bahwa politik berdimensi menciptakan kehidupan bersama, bukan kehidupan personal atau kelompok, tetapi kehidupan bersama (*living together*) yang memiliki makna kemajuan (progresif) sebagai lawan dari stagnan. Maka disebutlah manusia adalah makhluk berpolitik (*homo politicon*), dengan berpolitik akan tercipta kehidupan manusia yang lebih baik. Hampir senada dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, ahli lain yang berbicara mengenai politik juga menitikberatkan politik pada persoalan perbuatan manusia yang berorientasi pada kehidupan bersama (kolektif) bukan kehidupan individual. Menurut (Talcott Parson, 1966) politik merupakan aspek atas segala perbuatan yang berkaitan dengan usaha kolektif, bagi tujuan-tujuan yang sifatnya juga kolektif (Karimi, 2012: 26).

Politik sebetulnya menjadi satu kata kunci menciptakan kehidupan bersama (kohesivitas) di antara anggota masyarakat, dengan kehadiran politik, maka persoalan yang sifatnya individual menjadi teralienasi dalam kehidupan bersama, karena yang dikedepankan adalah semangat kolektif, kebersamaan di antara

sesama warga masyarakat. Begitu pula dengan mereka yang terjun ke dalam dunia politik praktis, perlu menjadi hubungan bersama dengan pemilih maupun masyarakat secara umum.

Masih senada dengan ahli lain, Peter Merkl juga secara umum menyebut politik sebagai jalan guna mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik bagi masyarakat, berupa terwujudnya keadilan. Menurut Merkl, politik adalah upaya yang dilakukan oleh manusia guna mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (Merkl, 1967: 13).

Budiardjo memaknai politik secara lebih operasional dengan mengatakan bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik itu diperlukan adanya aturan yang diterima oleh mayoritas warga. Menurut Miriam Budiardjo, politik merupakan upaya menentukan peraturan-peraturan yang bisa diterima oleh sebagian besar warga, serta menggiring masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis (Budiardjo, 2008: 15).

Sedangkan Abdul Halim lebih melihat politik sebagai seni (*art*). Yaitu seni mengontrol kekuasaan yang di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan, pertentangan, bahkan juga konflik. Menurut Abd. Halim, politik adalah seni mengatur kolektivitas, yang terdiri dari beragam individu tak sama, melalui serangkaian undang-undang yang disepakati bersama, untuk tujuan bersama aman, makmur, sejahtera (Halim, 2014: 3).

David Easton melihat politik sebagai satu-kesatuan sistem yang tidak terpisahkan, dan keseluruhan interaksi yang berkaitan dengan nilai dan pembagiannya berdasarkan wewenang yang diperoleh oleh pihak yang memiliki kewenangan (otoritas) atas nama rakyat atau publik. Publik memberi masukan (*input*) kepada pemilik otoritas untuk dijadikan kebijakan yang berkaitan dengan publik (Easton, 1988: 5).

Namun di antara ahli yang menyebut politik tidak linier dengan apa yang dikemukakan oleh para ahli lain adalah Harold Laswell yang mengemukakan politik pada tataran praktis. Lasswell mengatakan, politik itu berhubungan dengan siapa memperoleh apa, kapan mendapatkan dan bagaimana cara atau upaya untuk mendapatkan (*who gets what, when and how*). Jelaslah dalam politik ada yang namanya pragmatisme dan transaksional, jika dilihat dalam perspektif Laswell (Noor, 2007: 53).

Politik erat kaitannya dengan kekuasaan, apakah itu cara meraih kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan Lasswell, atau bagaimana membagi dan mendistribusikan kekuasaan, atau bagaimana cara

mempertahankan kekuasaan dan melanjutkan kekuasaan yang telah diraih. Hoogerwerf memaknai politik sebagai pertarungan kekuasaan. Sementara Hans Morgenthau memaknai politik sebagai pertarungan atau pertarungan untuk meraih kekuasaan (*struggle of power*). Andrew Heywood memaknai politik sebagai seni memerintah, kompromi dan kekuasaan (Warjio, 2016: 87).

Harold Laswell (1936) merupakan ahli politik beraliran behavioralis, yang menggeser persoalan politik pada masalah etis dan humanis. Dalam konteks politik kontemporer, persoalan politik telah meluas terkait distribusi keadilan, hubungan negara dengan masyarakat, hingga penghargaan kepada hak-hak kaum minoritas. Politik dimaknai tidak hanya melihat sisi vertikal ke atas untuk mendapatkan kekuasaan semata, namun juga terkait sisi horizontal yang mengutamakan kesetaraan (*equity*), yang melahirkan paradigma keadilan sosial di dalam politik (Yustiningrum, 2007: 53).

Dari penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa politik terbagi menjadi dua. Politik yang baik dan politik yang buruk. Politik yang baik adalah politik yang dipergunakan kemaslahatan terbanyak rakyat. Adapun politik yang buruk adalah politik yang dipergunakan untuk kesenangan segelintir orang.

Ahli Teori Politik

Al-Mawardi

Al-Mawardi dikenal sebagai tokoh politik yang cukup berpengalaman di dalam politik Islam dan Barat. Dalam sejarahnya, Al-Mawardi berjasa di dalam melakukan rekonsiliasi antara Dinasti Abbasiyah dengan kelompok Buwaihi. Al-Mawardi termasuk tokoh politik yang mengemukakan kontrak sosial. Salah satu karya fenomenal dalam pemikiran politik Al-Mawardi adalah *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Al-Mawardi memiliki nama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, lahir dan besar di Basrah, Irak. Kondisi politik dimana Al-Mawardi besar saat itu penuh gejolak. Hal tersebut yang menempa corak pemikiran politik Al-Mawardi, yang tidak hanya mampu menghasilkan pikiran-pikiran cerdas di bidang politik. Namun ia juga mampu menjadi salah satu aktor politik yang mencerahkan. Di tengah pertarungan politik yang sengit, Al-Mawardi mampu menjadi pejabat politik (Al-Mawardi, 1994: 55).

John Locke

John Locke merupakan filsuf Inggris yang terkenal dengan tulisannya “Two Treatises on Civil Government” tahun 1690. Locke mengkritik kekuasaan absolut raja-raja Inggris. Kekuasaan yang absolut menurut Locke menyebabkan konsentrasi kekuasaan pada segelintir orang. Hal tersebut menimbulkan persoalan pada kekuasaan yang dijalankan. Locke kemudian mengemukakan gagasan pemisahan kekuasaan pada segelintir orang. Ide dan pemikiran Locke kemudian dicetuskan dalam tiga macam kekuasaan, yakni; eksekutif, legislatif serta federatif. Masing-masing macam kekuasaan itu dikendalikan oleh orang yang tidak terpisah. Harapannya akan lahir pembagian kekuasaan (*share of power*) (Kranenburg dan Sabaruddin, 1980: 102).

Praktik Teori Politik

Harold Laswell menegaskan bahwa politik juga terkait dengan siapa, memperoleh apa, kapan dan bagaimana. Menurut Harold Lasswell, politik yaitu aktivitas masyarakat yang berkisar pada masalah-masalah “siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana” (*who gets what, when and how*) (Noor, 2007: 53).

Pengertian cakupan politik demikian memang tidak salah. Pada kenyataannya, persoalan politik selalu berkaitan dengan siapa yang sedang mengejar untuk mendapat apa. Lalu kapan dan bagaimana yang dikejar itu bisa didapat. Sebagai misal, siapa saja yang ingin menjadi ketua partai? Kemudian kapan dan bagaimana kursi ketua partai itu dapat diraih? Dengan cara yang legal atau tidak legal menurut hukum positif atau tidak? *Timing* nya tepat atau tidak? Dan sebagainya.

Peristiwa politik memang sarat dengan hal-hal seperti di atas. Siapa yang ingin menjadi anggota parlemen, gubernur, bupati, menteri, presiden, dan sebagainya selalu menarik untuk dikaji. Kemudian kelompok-kelompok politik mana saja yang mendukung siapa tersebut. Siapa yang dimaksud di sini dapat bermakna orang dalam pengertian individual maupun kelompok.

Siapa mendapatkan apa (*who gets what*). Ini merupakan bagian dari penjelasan yang cukup rumit di dalam persoalan politik. Mendapatkan apa ini adalah bagian dari sesuatu yang paling dinamis di dalam politik. Ada banyak hal terkait dengan mendapatkan apa di dalam politik, dengan

dimensi yang paling luas, mencakup hal-hal yang bersifat tampak dan maupun tersembunyi.

Aktor atau pihak akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dilakukannya, sebagai konsekuensi dari tindakan manusia yang selalu memiliki motif untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan melakukan sesuatu. Aktor politik jelas mendapatkan banyak hal dari kegiatannya melakukan investasi politik. Hal yang jelas di dalam politik adalah mendapatkan kekuasaan (*power*). Kekuasaan dimaknai sebagai kapasitas atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gary Yukl (1994) yang memaknai kekuasaan sebagai potensi yang dimiliki orang seseorang untuk mempengaruhi dan merubah sikap serta perilaku orang lain, baik satu orang maupun lebih (Pramudibyanto, 2017: 52). Bila mengacu kepada pengertian kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan tersebut, maka aktor politik adalah orang yang paling berkuasa di dalam mengendalikan seluruh sumber daya dan sistem yang ada selama proses pemilihan kepala daerah.

Tidak semata-mata siapa yang akan mendapatkan kekuasaan, tapi bisa jadi bermakna bagi-bagi jatah kekuasaan (*share of power*), dalam kekuasaan yang dikenal dengan yang namanya koalisi. Siapa mendukung siapa, kemudian, dia mendapatkan apa dari dukungan yang diberikan kepada orang yang telah mendapatkan kekuasaan. Seorang pengusaha yang mendukung politisi menjadi calon kepala daerah, bisa dikategorikan pada hal ini, jika pada saat politisi yang didukung benar-benar telah menjadi kepala daerah, maka dirinya sebagai pendukung, penyokong, sekaligus donatur kemudian mendapatkan sejumlah proyek pemerintah yang dijabat oleh politisi yang sebelumnya didukung. Mencari kawan yang tepat dalam politik adalah pekerjaan penting dan utama.

Dalam politik juga terkait dengan momentum atau waktu (*when*), artinya orang yang hendak mendapatkan kekuasaan dalam dunia politik harus pandai membaca situasi, kondisi dan peristiwa yang terjadi. Jangan sampai salah melangkah, sebab di antara hal penting dalam politik adalah momentum, kapan muncul, tampil, atau harus tiarap. Dalam persoalan momentum ini dikenal “menjadi pelopor, atau pengekor tapi berkesan.” Tak kalah penting adalah cara (*how*) bagaimana mendapatkan kekuasaan itu, apakah cara yang bermartabat atau cara yang tidak beretika.

Kapan (*when*).Terkait dengan waktu dan momentum, menjadi penting di dalam politik. Politik terkadang identik dengan momentum. Pemilihan kepala daerah adalah momentum yang tepat untuk mendapatkan kekuasaan, sebuah periode peralihan kekuasaan selama lima tahun, dan jika berlanjut kepada periode kedua menjadi 10 tahun.

Bagaimana (*how*). Bagaimana cara mendapat kekuasaan tentu saja bisa dengan cara mencalonkan diri untuk kepala daerah yang memimpin satu pemerintahan di daerah, bisa juga dengan cara mendukung seseorang yang akan mencalonkan dirinya sebagai calon kepala daerah. Calon kepala daerah yang dipilih tentu saja mempertimbangkan peluang menangnya paling besar. Selain peluang menang paling besar, tentu saja adalah, calon yang bersangkutan memang memiliki tingkat penerimaan (akseptabilitas) tinggi terhadap berbagai kepentingan dan masukan dari aktor politik. Kedua hal tersebut perlu dipertimbangkan secara matang dan detail, sebab bisa jadi ada orang yang memiliki peluang menang cukup besar, tapi belum tentu bisa menerima masukan dan kepentingan pendukungnya pada saat yang bersangkutan sudah menjabat dan menjalankan pemerintahan.

Koalisi di dalam pemerintah merupakan wujud nyata dari dunia politik. Kelompok atau partai politik yang terlibat dalam koalisi pemerintahan pada hakikatnya adalah kelompok yang hendak mendapat kekuasaan dan berbagi kekuasaan, serta mempertahankan kekuasaan. Mendapat kekuasaan dengan menjadi bagian rezim pemerintah yang berkuasa. Berbagi kuasa dengan mendapat jatah pejabat, seperti menteri dan lainnya. Dengan kursi, maka banyak program dari kementerian yang digunakan untuk meraih potensi ekonomi yang digunakan untuk menggerakkan mesin partai, dan mendulang suara pada pemilihan umum berikut. Keterlibatan dalam pemilihan umum, merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kekuasaan, dan tetap eksis sebagai kekuatan politik yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan tersebut menjadi modal untuk dapat kembali berkoalisi dengan penguasa yang menang pada kontestasi pemilu.

Begitu seterusnya, kekuasaan yang telah diraih di level nasional, dipergunakan untuk meraih kekuasaan di level daerah, baik sebagai kepala daerah maupun pimpinan di badan legislatif atau perwakilan rakyat daerah. Dengan memiliki kekuasaan di lembaga tersebut, maka kesempatan untuk mendapatkan akses ekonomi juga akan terbentuk

dengan sendirinya. Ikut serta menentukan proses pengambilan kebijakan pembangunan di daerah, di pemerintah daerah maupun di dewan perwakilan rakyat daerah.

“Kekuasaan itu seperti candu,
Tidak akan berhenti untuk diburu,
Bagi para pemujanya”

(Mohammad Hidayaturrahman)



BAB VII

Teori Kubus Kekuasaan

Pengertian Teori Kubus Kekuasaan

Teori kubus kekuasaan (*power cube theory*) terpusat pada tindakan aktor yang terbagi dalam tiga dimensi, yaitu proses pengambilan keputusan oleh aktor, proses pengambilan keputusan yang bersifat subyektif dan adanya kontrol terhadap kegiatan politik. Selanjutnya John Gaventa mengemukakan teori kubus kekuasaan (*power cube theory*) pada tiga sisi, sisi tahap (*level*), sisi ruang, dan sisi bentuk. Sisi level dari teori kubus kekuasaan bersifat vertikal yang terdiri dari level lokal, nasional dan global. Adapun sisi ruang (*space*) terdiri dari ruang tertutup (*closed*), ruang yang diperkenalkan (*invited*) dan ruang yang diakui (*claimed*). Sedangkan sisi bentuk (*forms*) mencakup bentuk yang terlihat (*visible*), tersembunyi (*hidden*) dan tidak terlihat (*invisible*). Ketiga teori kubus kekuasaan ini, disebut sebagai kubus, karena tidak terpisah antara satu dengan yang lain, tetapi berkaitan dan memiliki keterhubungan. Bahwa apa yang tampak (*visible*) bisa jadi merupakan hal yang tersembunyi (*invisible*) dan pada saat yang lain bisa jadi itu sebetulnya tertutup (*closed*) pada dimensi lokal, namun pada dimensi nasional atau global bisa jadi adalah sesuatu yang terbuka. Begitu seterusnya. Aktor politik yang berada di panggung politik dan kekuasaan, atau sedang dalam proses memperebutkan kekuasaan, maka berkaitan dengan kekuasaan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Sehingga karena hubungan yang saling terkait di antara tiga dimensi tersebut, disebutkan sebagai kubus kekuasaan (*power cube*). Kekuasaan yang bertumpu pada aktor yang berkuasa atau berperan dominan di dalam proses kekuasaan (Halim 2014: 55).

Ahli Teori Kubus Kekuasaan

John Gaventa

Pencetus teori kubus kekuasaan (*power cube theory*) sebetulnya adalah Steven Lukes, namun John Gaventa murid Lukes yang lebih mempopulerkan teori kubus kekuasaan. Gaventa menilai bahwa setiap orang memiliki kekuasaan, sekaligus juga dipengaruhi oleh kekuasaan. Kekuasaan merupakan kekuatan aktor, pada saat pihak lain tidak memiliki kekuasaan, maka otomatis tidak berdaya. Untuk mendapatkan kekuatan, maka aktor perlu mendapatkan kekuasaan, dalam proses memperebutkan kekuasaan untuk mendapatkan kekuatan tersebut tidak jarang terjadi konflik di antara sesama aktor. Padahal, dalam praktiknya kekuasaan sebetulnya dapat dibagi oleh aktor kepada jaringan yang ada di dalam lingkaran aktor, dengan berbagai bentuk dan formula. Kekuasaan yang dibagikan kepada jaringan itu, menjadi kekuasaan yang dibangun atas dasar sinergi akan melahirkan kemitraan dan kolaborasi (Gaventa, 2006: 23-24).

John Gaventa merupakan guru besar dan peneliti pada bidang sosiologi politik di Institut Studi Pembangunan dan Direktur program penelitian Aksi untuk Pemberdayaan dan Akuntabilitas (A4EA) Universitas Sussex Inggris. Pada tahun 2011-2014, Gaventa menjadi Director of the Coady International Institute dan Vice President of International Development di StFX University di Kanada. Sebelum itu Gaventa menjadi Director of Research di Institute of Development Studies (IDS) Inggris dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sebelumnya, ia adalah anggota tim Kekuatan, Partisipasi dan Perubahan Sosial di IDS, dan Direktur Pusat Penelitian Pengembangan Kewarganegaraan, Partisipasi dan Akuntabilitas, yang berbasis di IDS Inggris.

Praktik Teori Kubus Kekuasaan

Teori kubus kekuasaan (*power cube theory*) memiliki tiga sisi, sisi tahap (*level*), sisi ruang (*space*), dan sisi bentuk (*form*). Sisi level dari teori kubus kekuasaan bersifat vertikal yang terdiri dari level lokal, nasional dan global. Adapun sisi ruang terdiri dari ruang tertutup (*closed*), ruang yang diperkenalkan (*invited*) dan ruang yang diakui (*claimed*). Sedangkan sisi bentuk mencakup bentuk yang terlihat (*visible*), tersembunyi (*hidden*) dan tidak terlihat (*invisible*). Ketiga teori kubus kekuasaan ini, disebut

sebagai kubus, karena tidak terpisah antara satu dengan yang lain, tetapi berkaitan dan memiliki keterhubungan. Bahwa apa yang tampak (*visible*) bisa jadi merupakan hal yang tersembunyi (*invisible*) dan pada saat yang lain bisa jadi itu sebetulnya tertutup (*closed*) pada dimensi lokal, namun pada dimensi nasional atau global bisa jadi adalah sesuatu yang terbuka.

Pada sisi level kekuasaan, jelas aktor politik berada di level lokal dengan keterlibatannya pada politik lokal yaitu pemilihan kepala daerah. Begitu pula dengan pengaruh politik dan kekuasaan yang diperolehnya juga berada di lingkup lokal, yaitu lingkup daerah. Adapun sisi ruang (*space*) terdiri dari ruang tertutup (*closed*). Ada ruang yang tertutup yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain, kecuali hanya oleh aktor politik dan kepala daerah yang terpilih, yaitu pembicaraan mengenai konsesi dan kesepakatan-kesepakatan untuk menentukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan di daerah yang dipimpin oleh kepala daerah terpilih, yang didukung oleh aktor politik.

Ruang tertutup juga terjadi pada saat proses pemilihan kepala daerah, terutama pada saat terjadi eksekusi pembelian suara calon pemilih (*vote buying*) dan politik uang (*money politic*). Tim yang melakukan eksekusi kepada tokoh di level desa, adalah tim yang tidak dikenal oleh publik, tim itu yang bergerak secara rahasia (*secret*) menemui simpul-simpul yang selama ini sudah didekati dan memiliki kesepakatan untuk membantu kemenangan melalui politik uang.

Adapun ruang yang diperkenalkan (*invited*) bisa dilihat dari tim kemenangan yang memang terbuka untuk umum yang terdiri dari tim kemenangan yang terdiri dari pengurus dan kader partai politik yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Tim ini yang secara formal membuat dan menyusun kegiatan kampanye terbuka. Sisi lain dari ruang yang diperkenalkan adalah kegiatan sosialisasi dan kampanye terbuka yang dilakukan oleh tim kemenangan di depan publik, yang menghadirkan calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, dan aktor politik. Kegiatan kampanye yang diperkenalkan juga dilakukan di media massa, dalam bentuk pemberitaan maupun dalam bentuk debat publik yang digelar di depan umum.

Sedangkan ruang yang diakui (*claimed*) dari sisi ruang kekuasaan aktor politik dapat dilihat dari pengakuan publik yang besar terhadap kemenangan pasangan calon kepala daerah yang didukung. Aktor politik

diakui sebagai pihak yang memiliki kekuatan yang dapat memenangkan calon kepala daerah yang didukung. Sebab, secara hitungan politik, calon kepala daerah yang didukung tidak terlalu kuat untuk dapat menang. Buktinya, sebelumnya, calon yang bersangkutan pernah mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, tidak didukung aktor politik, kalah pada pemilihan kepala daerah. Namun karena didukung oleh aktor politik dapat menang. Kemenangan tersebut diakui sebagai kekuatan aktor politik. Kemenangan calon kepala daerah yang didukung aktor politik bisa mencapai 90 persen atas dukungan dari aktor politik.

Sedangkan sisi bentuk (*forms*), teori kubus kekuasaan (*power cub theory*) memiliki tiga dimensi, yaitu terlihat (*visible*), tersembunyi (*hidden*) dan tidak terlihat (*invisible*). Pertama, pada sisi yang terlihat (*visible*), aktor politik cukup menonjol karena menjadi endorser bagi pasangan calon kepala daerah, dan di berbagai tempat dan kesempatan sering mengajak calon pemilih untuk mendukung calon kepala daerah yang didukung. Begitu pula, aktor politik membentuk tim pemenangan yang memang terbuka untuk umum yang terdiri dari tim pemenangan yang terdiri dari pengurus dan kader partai politik yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Tim ini yang secara formal membuat dan menyusun kegiatan kampanye terbuka. Sisi lain dari ruang yang diperkenalkan adalah kegiatan sosialisasi dan kampanye terbuka yang dilakukan oleh tim pemenangan di depan publik, yang menghadirkan calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, dan aktor politik. Kegiatan kampanye yang diperkenalkan juga dilakukan di media massa, dalam bentuk pemberitaan maupun dalam bentuk debat publik yang digelar di depan umum.

Kedua, aspek yang tersembunyi (*hidden*), bisa dilihat dari pendekatan kepada kelompok “preman”. Kelompok nonformal yang memiliki pengaruh. Yaitu kelompok nonformal di tingkat desa yang biasanya menjadi pelindung (*backing*) urusan keamanan di tingkat desa, atau biasanya banyak terlibat dalam pengamanan desa secara umum, dan kadang pula terlibat dalam pengamanan pemilihan kepala desa (*pilkades*). Pendekatan kepada kelompok ini biasanya dilakukan secara tersembunyi dan tertutup. Aktor politik pernah mengumpulkan sebanyak 200 orang, untuk diajak mendukung calon kepala daerah yang didukung aktor politik. Aspek lain yang tersembunyi dari aktor politik adalah, kegiatan penggalangan dukungan dari tokoh desa. Tokoh desa didekati dengan

cara tersembunyi. Meski begitu, tokoh desa memegang peranan penting dalam memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah. Alasannya, tokoh desa sudah memiliki pengalaman bertarung di desa pada saat pemilihan kepala desa, sehingga paham bagaimana cara mendapatkan suara di desanya. Selain itu, tokoh desa sudah memiliki massa pendukung yang menjadi modal untuk diajak mendukung calon kepala daerah. Sehingga keberadaan tokoh desa tetap diperlukan oleh aktor politik untuk membantu pemenangan pasangan calon yang didukung.

Ketiga, aspek yang tidak terlihat (*invisible*), tidak terungkap seluruhnya ke publik. Salah satu bentuk aspek tersembunyi adalah politik uang (*money politics*) di dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga pelaksanaan pemberian dan eksekusinya harus tepat sasaran. Meski ada larangan untuk hal tersebut, namun bahwa pragmatisme politik mendorong setiap pasangan calon melakukan politik uang, hal tersebut juga sejalan dengan pemikiran masyarakat yang bersikap pragmatis dalam memilih kepala daerah. Politik uang bisa berupa barang/ materi, selain tentu saja uang. Jika dalam bentuk uang, jumlah uang yang diberikan kepada pemilih sebesar Rp 25 ribu-Rp 50 ribu untuk setiap pemilih. Biasanya, pola eksekusi politik uang tidak melalui jalur resmi tim pemenangan yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi melalui jaringan atau relawan yang tidak terdaftar secara resmi ke KPU. Tim resmi seringkali tidak mengetahui pelaksanaannya seperti apa, sehingga jika terjadi sesuatu di lapangan tim pemenangan akan terlepas dari tanggung jawab.

Selain itu yang tidak terlihat secara kasat mata dari aktor politik adalah motifnya. Pada satu sisi aktor politik saat tampil di depan publik menyampaikan bahwa dukungannya kepada calon kepala daerah. Namun pada sisi lain, motif yang mendorongnya untuk mendukung pasangan calon juga diketahui dari orang dekatnya adalah bermotif ekonomi untuk mendapatkan sumber daya ekonomi di daerah melalui kegiatan dan proyek yang asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun proyek yang asalnya dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan praktik teori kubus kekuasaan (*power cub theory*) yang memiliki dimensi yang dapat dipotret dari berbagai sudut panjang. Ada dimensi yang terbuka, ada yang tertutup. Kegiatan kampanye dilihat sebagai kegiatan pilkada yang terbuka. Namun

kegiatan yang berkaitan dengan politik uang (*money politic*) dan jual beli suara (*vote buying*) berada di ruang yang tertutup, tidak sembarang orang bisa terlibat di dalamnya, dan tidak dapat diketahui oleh banyak orang. Hanya melibatkan orang-orang tertentu saja, dan hanya diketahui oleh segelintir orang.

“Kekuasaan tidak nikmat,
Bila dibagi-bagi.
Lebih nikmat,
Jika dirasakan bersama”

(Mohammad Hidayaturrahman)



BAB VIII

Teori Investasi Politik

Pengertian Teori Investasi Politik

Investor politik tidak bisa dipisahkan dari akar utama ekonomi politik. Ekonomi politik muncul pertama kali pada abad ke-16 yang digagas oleh penulis Perancis dengan nama Antoine de Montcheitien (1575-1621) dalam bukunya yang berjudul *Treatise on Political Economy*. Namun Ekonomi politik memperoleh bentuk pada 1776 dengan ditulisnya buku oleh ekonom Adam Smith berjudul *The Wealth of Nations*. Tokoh lain yang mengembangkan ekonomi politik yaitu David Ricardo dengan tulisannya *Essay on the Influence of a Low Price of Con on the Profit of Stock* tahun 1815. Tokoh-tokoh ini melihat ekonomi politik dari sudut pandang mikro, yaitu teori nilai kerja. Selain melihat ekonomi politik dari sudut pandang nilai kerja Adam Smith juga melihat individu dan kebutuhannya. Kemudian masuk ke wilayah makro, lebih luas lagi, yaitu tentang masyarakat dan negara. Ada pula tokoh lain yang bicara mengenai ekonomi politik, yaitu Robert Malthus dengan karyanya berjudul *Principles of Political Economy* (1820) dan *Definitions of Political Economy*. Tokoh lain yang membahas ekonomi politik adalah John Stuart Mill yang terkenal dengan bukunya yang berjudul *Principles of Political Economy With Some of Their Application to Social Philosophy* (1848). Masa ini ekonomi dan politik masih menyatu (Deliarnov, 2006: 1-2).

Charles Lindblom dan Robert Dahl mempelopori bersatunya kajian mengenai ekonomi dan politik. Meski keduanya telah memiliki bidang kajian yang lebih spesifik, terutama dengan semakin dinamisnya perkembangan dalam perekonomian dan

perpolitikan. Lindblom dan Dahl menerbitkan buku yang judulnya “politics, economics and welfare” pada tahun 1953. Melalui tulisan di buku tersebut, keduanya berusaha untuk menjelaskan hubungan atas interaksi yang semakin menonjol antara fenomena ekonomi dan politik, dan bisa juga tidak terpisah dalam kajiannya (Philipus dan Aini, 2004: 20).

Pada tahun 1970-an ekonomi dan politik kemudian menjadi bahasan yang menyatu kembali terutama dengan munculnya tokoh seperti Kenneth Arrow, Oslon, William Riker, James Buchanan, Gordon Tullock yang mengembangkan ekonomi politik baru (*new political economics*). Mereka memiliki dua variasi mengenai ekonomi politik baru, yaitu teori pilihan rasional (*rational choices theory*) dan pilihan publik teori (*public choice theory*), kedua teori ini berorientasi pada ekonomi kelembagaan (Deliarnov, 2006: 2).

Ekonomi politik dimaknai secara tidak terpisah, sebagai interrelasi di antara aspek, proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi, seperti: produksi, investasi, harga, perdagangan, konsumsi, distribusi, dan lain-lain (Caporaso & Levine, 1992: 79).

Jelaslah, bagi Caporaso dan Levine, bahwa ekonomi politik mengulas dan membahas hubungan atau keterkaitan berbagai aspek yang terkait dengan ekonomi dan politik. Artinya, setiap aspek yang ada di dalam ekonomi dan politik selalu memiliki keterhubungan yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, dapat dijelaskan pula bahwa setiap proses di dalam ekonomi memiliki hubungan dengan proses politik. Begitu pula proses politik memiliki hubungan dengan ekonomi. Proses politik berpengaruh kepada proses ekonomi, dan proses ekonomi berpengaruh terhadap proses politik.

Begitu pula dengan institusi atau aktor (pelaku) ekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktor politik, dan aktor politik tidak akan jauh dari aktor ekonomi, kedua aktor tersebut memiliki ketersambungan atau keterkaitan satu sama lain. Inilah yang menjadi objek kajian dari komunikasi politik, bagaimana hubungan, keterkaitan dan interaksi di antara keduanya bisa terjadi dan bagaimana dampaknya.

Intinya, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, dalam praktiknya akan sangat terkait dengan politik, apakah proses politik, aktor politik maupun kebijakan politik. Kebijakan politik tentu saja akan terkait secara langsung, karena orang yang memiliki kekuasaan (*power*) dalam

jabatan politik tertentu, terlebih lagi pada level negara, maka memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengendalikan dan mendistribusikan apa yang terkait dengan produksi, perdagangan, konsumsi dan lain-lain.

Menurut Anthony Downs, ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. Politik di dalam demokrasi bisa dilihat sebagai cara merumuskan kebijakan untuk mendapatkan suara, untuk selanjutnya mendapatkan pendapatan, kekuasaan dan kekuatan. Dalam demokrasi, penguasa bertindak untuk mendapatkan keuntungan dan bersaing dengan pihak lain untuk mendapatkannya. Maka dengan begitu, politik sama halnya dengan ekonomi (Downs, 1957: 137-148).

Maka, secara sederhana investor politik dimaknai sebagai orang atau kelompok termasuk badan usaha yang melakukan kegiatan investasi, menanamkan uang dalam jumlah besar, pada berbagai kegiatan politik, untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan secara langsung untuk menjadi kandidat, pengurus organisasi politik, maupun dengan cara mendukung pihak lain untuk mendapatkan kekuasaan politik (Hidayaturrahman, 2020: 36). Pengertian ini mengacu kepada pengertian investasi yang berkaitan dengan sejumlah indikator seperti adanya kegiatan menanamkan uang, adanya potensi keuntungan dan kerugian bagi investor, bila untung adanya retensi/ pengembalian modal.

Ahli Teori Investasi Politik

Thomas Ferguson

Tidak banyak ahli yang memiliki konsentrasi dan pemikiran mengenai teori investasi politik. Salah satu ahli yang memiliki pemikiran adalah Thomas Ferguson. Terkait dengan investasi politik, Thomas Ferguson mengemukakan pendapatnya dalam tulisan berjudul “Teori Investasi Persaingan Partai dan Logika Sistem Politik Berbasis Uang.” Menurut Ferguson, pentingnya investasi di dalam analisis Popkin dan kawan-kawan, terletak pada kemungkinan secara konsisten juga bisa berpindah ke partai politik. Dalam teori investasi, ada pihak investor besar yang bekerjasama dan bersatu untuk memajukan kandidat yang biasa mewakili kepentingan mereka. Investor semacam itu tidak memperdulikan atau tidak memperhatikan pemilih, melainkan lebih memperhatikan dan memperdulikan kepentingan mereka sendiri. Ada partai yang didominasi oleh investor besar yang mencoba untuk menguasai suara pemilih (Ferguson, 1995: 29-32).

Praktik Teori Investasi Politik

Investasi politik dilakukan oleh pihak, baik pribadi maupun korporasi untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mendapatkan kekuasaan pada berbagai level, baik di level nasional maupun daerah, bisa dengan cara dirinya langsung masuk ke dalam kontestasi politik, maupun dengan cara mendukung pihak lain untuk mendapatkan kekuasaan politik, baik menjadi presiden, wakil rakyat, kepala daerah, dan kepala desa. Investasi politik merupakan kegiatan yang berkaitan tidak hanya dengan usaha yang dilakukan oleh orang/pihak yang memiliki uang atau modal untuk mendapatkan kekuasaan semata, namun juga berhubungan dengan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan setelah mendapatkan kekuasaan. Kemudian uang tersebut diputar untuk mempertahankan kekuasaan, dan mendapatkan yang lebih besar.

Pemberi dana pada calon kepala daerah yang sedang bertarung pada kontestasi pemilihan adalah investor politik. Begitu pula dengan kelompok korporasi atau perusahaan yang memberi sumbangan dalam jumlah besar kepada calon presiden dan partai politik adalah investor politik. Disebut investor politik, karena dana yang dikeluarkan cukup besar, dan mengharapkan adanya imbalan terhadap kegiatan investasi yang dilakukan. Bisa dalam bentuk kemudahan perizinan, proyek pemerintah, atau dalam bentuk dispensasi dalam hal-hal tersebut, dan lain sebagainya. Ada benefit yang dapat diperoleh dari kegiatan investasi yang dilakukan, sebagai *return*.

“Politik seperti bisnis,
Dilakukan karena menghasilkan.
Bahkan bagi awam,
Politik yang merugikan,
Bagi Politisi,
Tetap Menguntungkan”

(Mohammad Hidayaturrahman)



BAB IX

Teori Motivasi

Pengertian Teori Motivasi

Beberapa makna dan definisi yang dikemukakan para ahli untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan motivasi. Ada yang mendefinisikan motivasi sebagai proses yang menguatkan, memberi arah dan membuat orang tekun di dalam mencapai tujuan (Robbins & Judge, 2015:127). Motivasi juga dimaknai sebagai kekuatan di dalam diri manusia yang mendorong dan menggerakkannya untuk melakukan sesuatu atau memenuhi kebutuhan dasar (Yorks, 2004: 21).

Herzberg mengkategorikan motivasi menjadi dua faktor, yaitu motivator dan higienis. Motivator merupakan faktor intrinsik, yang ada di dalam diri manusia, hal tersebut meliputi prestasi dan pengakuan, yang selanjutnya menghasilkan kepuasan. Adapun hygienes atau kebersihan adalah faktor ekstrinsik yang berada di luar diri manusia. Hal ini termasuk gaji dan keamanan pekerjaan. Terpenuhinya gaji dan keamanan selama bekerja akan menghasilkan ketidakpuasan. Adapun teori motivasi menurut (Vroom, 1964) didasarkan pada keyakinan bahwa upah akan mengarah pada kinerja dan kinerja akan mengarah pada penghargaan. Semakin besar upah atau hadiah, semakin besar kemungkinan akan termotivasi. Sebaliknya, semakin kecil hadiah atau upah semakin kecil kemungkinan akan termotivasi. Teori motivasi menurut (Skinner, 1953) menyebut perilaku yang mendapat ganjaran positif akan diulang dan perilaku yang mendapat sanksi akan dihindari (Lindner, 1998: 1).

Sondang Siagian menyatakan bahwa teori motivasi merupakan konsekuensi dari adanya hubungan atau interaksi manusia dengan lingkungan dan situasi yang melingkupinya. Setiap situasi akan mempengaruhi motivasi seseorang, sehingga setiap situasi menentukan motivasi manusia. Pada saat situasi berubah maka berubah pula motivasi seseorang. Seseorang bisa termotivasi rajin membaca jika tinggal di lingkungan yang suka membaca, begitu pula sebaliknya, jika tinggal di lingkungan yang tidak suka membaca, maka akan ikut malas membaca (Siagian, 1995: 137).

Stephen Robbins menjelaskan motivasi sebagai proses untuk menghasilkan intensitas dan ketekunan seseorang dalam upayanya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Semakin kuat intensitas seseorang maka semakin dekat pula tujuan yang hendak diraih. Sehingga orang yang termotivasi tentu saja membutuhkan ketekunan di dalam usahanya untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan (Robbins, 2003: 208).

Ahli Teori Motivasi

Abraham Maslow

Teori motivasi berakar dari teori kebutuhan yang dikemukakan Abraham Maslow. Menurut (Maslow, 1943) seperti yang dikutip oleh James R. Lindner, manusia memiliki hirarki kebutuhan yang secara berurutan perlu dipenuhi yaitu kebutuhan fisik (fisiologis), kebutuhan akan rasa aman (keselamatan), kebutuhan untuk mendapat kehidupan sosial (sosialisasi) seperti kasih sayang dan persahabatan, kebutuhan untuk bersenang-senang (ego), dan kebutuhan untuk mengekspresikan kemampuan diri (aktualisasi diri). Maslow berpendapat bahwa kebutuhan manusia harus dipenuhi mulai dari tingkat yang lebih rendah yaitu tingkat fisik. Pemenuhan kebutuhan itu yang akan menjadi motivasi untuk melakukan sesuatu.

Abraham Maslow menyebut kebutuhan manusia dari tingkat rendah sampai tingkat paling tinggi. Sehingga jika hendak memotivasi orang, maka perlu diketahui pada level mana orang tersebut ingin dipenuhi kebutuhannya. Kebutuhan paling rendah seperti kebutuhan fisik seperti makan dan minum serta rasa aman dapat dipenuhi dari faktor eksternal manusia atau orang lain. Sementara kebutuhan yang berkaitan dengan internal atau di dalam diri manusia seperti kasih sayang dan aktualisasi diri dapat muncul dari dalam diri manusia sendiri.

David McClelland

Teori motivasi berbasis kebutuhan juga dikemukakan oleh McClelland. McClelland memetakan kebutuhan pada tiga, prestasi, kekuasaan dan afiliasi. Menurut McClelland, ketiga hal tersebut yang memotivasi manusia untuk melakukan sesuatu. Kebutuhan prestasi mencakup pada keinginan untuk berusaha keras sukses dan mengungguli orang lain. Kebutuhan untuk berkuasa akan memotivasi manusia untuk melakukan apapun untuk dapat meraih kekuasaan sebesar mungkin. Dan kebutuhan afiliasi hanya akan terpenuhi dengan menjadi hubungan baik dengan orang lain (Kadji, 2012: 3-7).

Motivasi berprestasi sebagaimana yang dikemukakan McClelland juga linier dengan apa yang disampaikan oleh (Schunk, Pintrich & Meece, 2008) yang menyebut bahwa aktivitas seseorang untuk mencapai tujuan dan mempertahankan atau mengembangkan apa sudah sudah diraih merupakan bagian dari motivasi berprestasi. Hal tersebut juga dikemukakan oleh (Nicholl, 1984) yang menyatakan bahwa motivasi berprestasi merupakan motivasi yang bertujuan untuk mengembangkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang maksimal. Seseorang memiliki motivasi yang tinggi, saat memiliki prestasi yang tinggi pula. Motivasi berprestasi merupakan motivasi yang ditujukan guna mengejar prestasi (Purwanto, 2012: 220).

Praktik Teori Motivasi

Motif seringkali tidak tunggal melainkan multi, beragam dan bisa bersamaan. Meski tentu saja dalam praktiknya motif yang mendorong individu untuk melakukan satu hal, cenderung dinamis. Bisa jadi satu motif di awal yang mendorong perilaku seseorang bergeser ke motif lain, karena proses dan terjadinya interaksi dengan orang lain, atau dengan lingkungan sekitar. Motif adalah hal dinamis.

Aktor politik yang melakukan kegiatan pada pemilihan kepala daerah memiliki latar belakang yang mendorongnya untuk terlibat mendukung dan menyokong salah satu pasangan calon kepala daerah. Motif aktor politik terlibat dalam mendukung salah satu pasangan kepala daerah tidak tunggal (*mono motivation*) melainkan beragam (*multi motivation*). Motivasi tersebut meliputi motif politik elektoral, atau tujuan politik untuk mendapatkan suara, selain itu ada pula motif ekonomi, untuk

mendapatkan keuntungan material, baik berupa uang maupun peluang ekonomi dari sumber daya yang ada di daerah, motif ekonomi politik juga terlihat dari aktor, yaitu dengan semakin kuatnya pengaruhnya dan kekuatan aktor politik di lingkungan birokrasi pemerintah, dengan begitu akan memudahkan untuk melakukan kontrol dan pengendalian terhadap berbagai program dan kegiatan yang memiliki relasi dengan kekuasaan dan perekonomian. Ada pula motif keinginan membangun daerah di mana aktor politik berasal, dengan memilih calon yang memiliki rekam jejak dan latar belakang yang baik.

Mengacu pada teori motivasi McClelland, maka motivasi aktor politik di dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dianalisis dengan tiga hal, yaitu prestasi, kekuasaan dan afiliasi. *Pertama*, motif prestasi. Bagi kader partai, adalah sebuah prestasi saat mampu memajukan kadernya untuk menjadi kepala negara, kepala daerah atau wakilnya. Selain itu, menaikkan perolehan suara partai di suatu daerah dan mendudukkan sebanyak mungkin orang yang diinginkan di parlemen juga menjadi prestasi tersendiri. Maka menjadi tidak heran saat aktor politik memiliki motif untuk berprestasi di dalam konteks pemerintahan daerah dengan mendukung calon tertentu untuk menjadi kepala daerah.

Hal tersebut akan tercapai jika pasangan calon yang didukung menang memimpin daerah. Maka menjadi penting motif berprestasi aktor politik pada saat memutuskan untuk mendukung pasangan calon kepala daerah, terlebih lagi yang membiayai pencalonan tersebut ingin pasangan calon yang didukung menang. Maka yang dilakukan sebelum mendukung adalah, memilih figur kandidat yang peluang menangnya paling besar di antara figur lain. Kalkulasi menang kalah tersebut, atau lebih tepatnya adalah kalkulasi kecenderungan menang daripada kalah menjadi pertimbangan utama, di antara pertimbangan lain-lain.

Adapun motif kekuasaan politik ekonomi bisa dilihat dari adanya unsur keuntungan dari sisi pengaruh di lingkungan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak, yang juga berdampak pada adanya kesempatan kerjasama yang menguntungkan secara ekonomi dari pengaruh tersebut. Atau sebaliknya, adanya kepentingan secara ekonomi yang berdampak secara langsung maupun tidak terhadap pengaruh kekuasaan di lingkungan pemerintah dimana kepala daerah yang didukung dan disokong oleh aktor politik sedang menjalankan kekuasaan.

Motivasi menggerakkan manusia untuk melakukan apa saja dalam kehidupan, tanpa motivasi manusia tidak akan tergerak untuk melakukan sesuatu. Motivasi “*inheren*” dengan perkataan, tindakan dan perilaku manusia. Maka, secara jelas, motivasi menjadi kekuatan yang mendorong seseorang untuk bekerja dan mencapai apa yang diinginkan (Wahyudi, 2012: 4). Motivasi merupakan proses merangsang diri atau menstimulasi dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu (Hutabarat, 2016: 297). Jelas bahwa motivasi tidak bisa dipisahkan dari tindakan manusia.

Adapun motivasi di dalam kegiatan politik, Klaas Beniers dan Robert Dur menjelaskannya dengan menyebut bahwa motivasi politisi penting sekali dalam pengambilan atau pembuatan pilihan keputusan, yang tentu saja motivasi tidak selalu tunggal tapi bisa beragam. Motivasi dalam melakukan tindakan atau perilaku selanjutnya akan sangat mempengaruhi insentif yang diberikan oleh orang lain. Motivasi memang sesuatu yang abstrak, sehingga kadangkala tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun motivasi dapat diketahui dari perkataan, atau tindakan yang berkaitan dengan apa yang mendorong tindakan yang dilakukan atau perkataan yang diucapkan (Hasibuan, 2007).

Kedua, motif kekuasaan. Aktor politik mendukung calon kepala daerah didorong motif kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi. Kekuasaan dalam bentuk ekonomi yaitu adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, saat calon kepala daerah yang didukung bisa menang dan memimpin daerah. Motif kekuasaan ekonomi bisa ditelusuri salah satunya dari keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya sebagian besar milik pemerintah daerah, dan pemilihan direksi melibatkan kepala daerah yang sekaligus menjadi kuasa pemilik modal (KPM) di tubuh BUMD.

Adapun motif kekuasaan politik ekonomi bisa dilihat dari adanya unsur keuntungan dari sisi pengaruh di lingkungan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak, yang juga berdampak pada adanya kesempatan kerjasama yang menguntungkan secara ekonomi dari pengaruh tersebut. Atau sebaliknya, adanya kepentingan secara ekonomi yang berdampak secara langsung maupun tidak terhadap pengaruh kekuasaan di lingkungan pemerintah daerah, di mana kepala daerah yang didukung aktor politik sedang menjalankan kekuasaan. Aktor politik akhirnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kepala daerah terpilih yang memungkinkan adanya kesepakatan di dalam mengatur

dan menjalankan pemerintahan di daerah, termasuk penempatan orang-orang tertentu di dalam jajaran struktur pemerintahan. Ada semacam peluang dan kesempatan yang dimiliki saat calon kepala daerah yang didukung terpilih kepala daerah.

Ketiga, motif afiliasi. Motif afiliasi aktor politik di dalam mendukung calon kepala daerah juga terlihat jelas, pada rekan koalisi yang dipilih, yang mempertimbangkan kelompok/ partai yang memiliki garis kesamaan atau kedekatan. Meski berbeda tentu saja memungkinkan untuk berkomunikasi dan bermitra serta membangun relasi yang baik. Hal tersebut menjadi pintu masuk (*entry point*) bagi aktor politik untuk membangun konsolidasi dengan jaringan yang sudah terbangun komunikasi pada saat dirinya mendukung calon kepala daerah.

Menjalankan usaha di bidang tertentu berkaitan dengan teori motivasi. Tidak ada orang yang membuka usaha tidak ada motif untuk rugi. Motivasinya tetap saja ingin untung. Keuntungan yang menjadi pendorong manusia di dalam melakukan kegiatan membuka usaha. Tanpa adanya motivasi untuk untung, tidak mungkin manusia mau capek-capek membuka usaha, dan menghabiskan dana hanya untuk kegiatan semata. Namun tetap dimotivasi oleh adalah keinginan untuk mendapat keuntungan.

“Dunia diciptakan,
Cukup untuk seluruh makhluk hidup.

Namun tidak cukup,
Bagi satu orang serakah.

Bahkan, jika ditambah
dengan sebanyak yang ada”

(Nabi Muhammad SAW)



BAB X

Teori Partisipasi

Pengertian Teori Partisipasi

Ketika diamati dari asal katanya, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang artinya pengambilan bagian, pengikutsertaan (Partan & Al-Barry, 2006:655). Partisipasi artinya seseorang atau kelompok masyarakat yang ikut serta dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010:46).

Mubyarto mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu untuk tercapainya keberhasilan setiap program yang dibuat, sesuai dengan kemampuan setiap orang, tanpa harus mengorbankan kepentingan orang yang berpartisipasi (Mubyarto, 1997:35). Sementara itu, menurut Arimbi, partisipasi sebagai diartikan sebagai partisipasi yang berlangsung dalam dua arah (*feedforward information and feedback information*). Berdasarkan makna tersebut, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus bisa dimaknai bahwa partisipasi masyarakat sebagai komunikasi antara pihak pemerintah selaku pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut (Laily, 2015:187).

Definisi tentang partisipasi juga dijelaskan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi. Partisipasi juga diartikan bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat secara umum dapat ikut

serta terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. (Djalal dan Supriadi, 2001: 201-202).

Tilaar mengartikan partisipasi sebagai bentuk dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi, diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat (Tilaar, 2009:287). Pada pengertian ini, Tilaar memaknai demokrasi pembangunan yang tumbuh dari bawah.

Pengertian partisipasi menurut Poerwadarminta yaitu beberapa orang yang ikut serta pada suatu kegiatan. Formalnya, dimaknai sebagai ikut dalam wewenang secara mental maupun emosional menyumbang terhadap proses penyusunan keputusan, keterlibatan secara pribadi orang yang berketerkaitan guna memenuhi tanggung jawabnya, guna membantu tiap program berdasarkan kemahiran tiap orang dengan tidak mengorbankan kepentingan diri sendiri hingga berhasil. Jnanabrota Bhattacharyya mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama (Hardjasoemantri, 1993:7).

Keith Davis mengartikan partisipasi tidak semata-mata bentuk fisik dan lahiriah atau materi semata, namun juga sebagai keterlibatan mental/ pikiran serta emosi/ perasaan individu pada kondisi kelompok dalam memotivasi memberi sumbangan pada kelompok tersebut dalam upaya mewujudkan tujuan bersama begitupun ikut bertanggung jawab dalam upaya yang dilakukan. Korten menyebut partisipasi sebagai suatu tindakan yang mendasar untuk bekerjasama yang membutuhkan waktu dan usaha, agar menjadi mantap dan hanya berhasil baik serta terus maju apabila terdapat kepercayaan. Partisipasi juga sebagai gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan suatu pelaksanaan dari gejala sesuatu yang memusatkan pada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya (Gultom, 2001:11).

Nelson dan Bryant membedakan partisipasi pada terlibatnya kelompok maupun masyarakat yang merupakan satu kesatuan, bisa dikatakan partisipasi kolektif, sementara terlibatnya individu pada aktivitas kelompok bisa dikatakan partisipasi individual. Partisipasi

disebut juga sebagai partisipasi vertikal serta horizontal masyarakat. Dikatakan partisipasi vertikal sebab terdapat pada kondisi tertentu, di mana masyarakat terlibat ataupun mengambil bagian terhadap suatu program pihak lainnya, dalam hubungannya di mana masyarakat menjadi bawahan, pengikut maupun klien. Dikatakan partisipasi horizontal, sebab di waktu tertentu masyarakat tidak mustahil memiliki kemampuan berprakarsa, dimana setiap anggota/ kelompok masyarakat melaksanakan partisipasi horizontal satu dengan lainnya, baik untuk berusaha bersama, maupun untuk melaksanakan aktivitas dengan pihak lainnya. Partisipasi demikian tentu saja menjadi tanda awal tumbuhnya masyarakat yang bisa berkembang dengan mandiri (Bryant & White, 1982).

Partisipasi seseorang dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antara faktor yang bisa mempengaruhi partisipasi adalah status sosial, kegiatan, dan keadaan alam sekitar. Status sosial mencakup pendidikan, pendapatan, kebiasaan dan kedudukan sosial dalam sistem sosial. Aktivitas merupakan kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan oleh kelompok yang dapat berupa organisasi masyarakat dan tindakan kebijaksanaan. Sedangkan alam sekitar merupakan faktor fisik atau lingkungan tempat tinggal (Sastropoetro, 1986: 27).

Partisipasi dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, di mana kepemimpinan menjadi penentu faktor pertama metode pengendalian usaha. Selain itu, jenjang pendidikan yang layak kemudian memberikan kesadaran lebih tinggi serta memberi kemudahan bagi pengembangan identifikasi tujuan program. Komunikasi, gagasan-gagasan, kebijaksanaan serta rencana-rencana bisa mendapat dukungan jika tidak sulit untuk diketahui serta dipahami khalayak (Mikkelsen, 2003: 17).

Beberapa unsur penting yang tercakup dalam pengertian partisipas, seperti dikemukakan oleh (Ahmadi & Supriyanto, 2004) yaitu:

1. Pengkajian pada partisipasi tidak semata-mata keikutsertaan secara fisik namun juga pikiran dan perasaan (mental dan emosional).
2. Partisipasi bisa berfungsi mendorong seseorang yang memberikan sumbangan kemahirannya pada kondisi kelompok sehingga daya.
3. Kemahiran berfikir begitupun inisiatif bisa muncul dan didasarkan pada tujuan kelompok.
4. Pada partisipasi berisi pemahaman seseorang agar ikut serta begitu pula tanggung jawab pada kebanyakan kegiatan organisasi.

Ini mengartikan semakin tinggi rasa keterlibatan psikologis individu dengan tugas yang diserahkan padanya, semakin tinggi juga rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas.

Terdapat banyak hal terkait partisipasi seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh (Gultom, 2001:27), yaitu:

1. Partisipasi seseorang sebagai satu alat mendapatkan informasi terkait situasi, kebutuhan serta sikapnya terhadap suatu program.
2. Individu dapat semakin memahami seluk beluk program serta merasa memiliki program itu.
3. Partisipasi yaitu hak demokrasi ketika individu terlibat didalamnya.

Dari penjelasan tersebut bisa dipaparkan terkait kemampuan serta kemauan berpartisipasi asalnya dari yang bersangkutan (individu ataupun kelompok masyarakat), sementara kesempatan untuk berpartisipasi peluangnya berasal dari pihak lain. Ketika terdapat kemauan namun tak dibersamai dengan kemampuan individu ataupun kelompok masyarakat, walaupun organisasi/ pemerintah sudah menyediakan peluang, partisipasi pun tak dapat terealisasi. begitu pula, apabila ada kemauan serta kemampuan namun tak ada ruang ataupun kesempatan oleh organisasi/ pemerintah bagi individu atau kelompok masyarakat, maka partisipasi pun tak bisa terealisasi juga.

Berdasarkan proses keterlibatan partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi dua. Seperti yang dikemukakan oleh Sundariningrum dalam (Sugiyah, 2001:38), yaitu:

1. Partisipasi langsung. Partisipasi yang terjadi ketika individu menampilkan aktivitas tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi ketika setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Dengan kata lain, individu terlibat secara aktif di dalam kegiatan.
2. Partisipasi tidak langsung. Partisipasi yang terjadi ketika individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Hessel mengutip Nelson menyebut partisipasi terbagi dalam dua macam atau kategori; *Pertama, partisipasi horizontal*. Partisipasi horizontal merupakan partisipasi antara sesama warga, atau anggota masyarakat, di

mana masyarakat memiliki kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan. Setiap anggota ataupun kelompok masyarakat melaksanakan partisipasi horizontal satu dengan lainnya. *Kedua, partisipasi vertikal.* Partisipasi vertikal, merupakan partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, di mana pada hubungannya masyarakat sebagai pengikut/ klien. Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan (Tangkilisan, 2005: 323).

Jadi, seseorang bisa tergolong telah berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan ketika individu tersebut benar-benar berperan secara utuh dengan mental dan emosinya, bukan sekadar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Begitu pula rasa tanggung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, sebagaimana merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Partisipasi terkait dengan rasa tanggung jawab sebagai suatu kualitas dari masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tatkala yang bersangkutan secara sadar, bebas memilih dan menyetujui semua hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas.

Sastropetro menyebutkan definisi partisipasi yaitu keterlibatan yang sifatnya spontan disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok guna mencapai tujuan bersama, serta beberapa bentuk partisipasi masyarakat mencakup partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk dana, partisipasi dalam bentuk material, maupun partisipasi dalam bentuk informasi (Isbandi, 2007: 21).

Ada tiga bentuk partisipasi menurut Holil, dalam (Isbandi, 2007: 21), antara lain:

- a. Partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk melaksanakan upaya-upaya yang bisa menunjang keberhasilan suatu program.
- b. Partisipasi dalam bentuk uang merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar upaya terhadap pencapaian suatu program. Partisipasi ini bisa sumbangan berupa uang, namun tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan.

- c. Partisipasi dalam bentuk harta benda merupakan partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Partisipasi melibatkan lebih banyak mental dan emosi daripada fisik semata, sehingga pribadinya diharapkan lebih banyak terlibat daripada fisiknya sendiri. Partisipasi bisa dalam dua bentuk, secara sukarela atau yang diharuskan. Partisipasi yang didorong oleh mental dan emosi atas dasar kesadaran sendiri, disebut sebagai partisipasi “sukarela”. Sedangkan partisipasi dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi memotivasi orang untuk turut bertanggung jawab dalam suatu kegiatan, sebab yang disumbangkannya berdasarkan kesukarelaan sehingga timbul rasa bertanggung jawab kepada organisasi (Deviyanti, 2013:382).

Ahli Teori Partisipasi

Cohen dan Uphoff

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi seseorang dalam suatu program disebabkan banyak hal. *Pertama*, dari segi basisnya, yakni partisipasi akibat adanya desakan (*impetus*) serta akibat insentif. *Kedua*, segi bentuk yakni terjadinya partisipasi dengan terorganisir, terdapat arahan dari pemimpin kelompok, serta partisipasi yang dilaksanakan individu itu sendiri secara langsung. *Ketiga*, segi keluasannya, yakni terjadinya partisipasi yang mengorbankan waktu serta justru meningkatkan kesibukan di luar kepentingan pribadinya. *Keempat*, dari segi efektivitasnya, yakni berperan partisipan dengan harapan menyumbangkan masukan/ saran ataupun kontribusi yang tentunya bermanfaat bagi dirinya. Berdasarkan banyaknya segi partisipasi, jika diamati dari prakarsa terjadinya partisipasi dapat dibagi dua bentuk, yakni partisipasi yang datangnya dari atas (*top down*), serta partisipasi yang datangnya dari bawah (*bottom up*) (Sastropetro, 1986: 122-123).

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi dapat pula dibedakan menjadi empat jenis. *Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi tersebut utamanya terkait penentuan alternatif bersama masyarakat kaitannya dengan gagasan ataupun ide menyangkut kepentingan bersama. Bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan antara lain menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. *Kedua*,

partisipasi dalam pelaksanaan mencakup kegiatan menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi serta penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang sudah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas bisa diamati dari luaran (output), sedangkan dari segi kuantitas dapat diamati dari persentase keberhasilan program. Individu yang telah berpartisipasi mendapat manfaat dari keterlibatannya. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini kaitannya dengan pengimplementasian program yang direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi tujuannya mengetahui pencapaian program yang direncanakan sebelumnya (Astuti, et al 2011: 61-63).

Praktik Teori Partisipasi

Partisipasi dalam bentuk keterlibatan secara fisik maupun nonfisik, material maupun nonmaterial, dana dan lain-lain. Partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dari tanggung jawab sebagai warga negara di negara demokrasi, terlebih lagi di negara yang menganut demokrasi langsung, seperti yang terjadi di Indonesia. Partisipasi tidak hanya merujuk pada kehadiran di hari pencoblosan semata, namun partisipasi bisa dalam bentuk yang beragam, termasuk ikut serta dalam menyelenggarakan dan menyukseskan kontestasi politik di level pusat maupun daerah. Partisipasi di dalam pilkada dengan berbagai bentuk tentu saja didorong oleh berbagai motif yang setiap orang berbeda satu sama lain. Partisipasi bisa beragam bisa menjadi panitia pemilihan, menjadi pengawas, bisa menjadi tim pemenang, atau bisa pula menjadi calon kepala daerah atau menjadi calon anggota legislatif. Partisipasi lain adalah memberikan bantuan dana kepada calon.

Salah satu praktik teori partisipasi adalah membayar pajak dan retribusi. Membayar pajak dan retribusi yang dilakukan oleh warga merupakan partisipasi pasif warga terhadap pembangunan negara. Disebut partisipasi pasif karena tanpa melakukan apapun sudah memberi sumbangsih berupa uang dari uang yang dibelanjakan secara otomatis. Terlebih lagi tanpa meminta persetujuan. Saat ketentuan dan kebijakan pajak telah ditetapkan, maka secara otomatis warga dianggap sudah tahu

dan menerima kebijakan tersebut. Uang dari pajak yang dibayarkan oleh warga secara pasif tersebut, kemudian digunakan oleh pemerintah untuk berbagai keperluan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Cukuplah membuat kerusakan,
seribu orang membangun,
Satu yang merusak.

 Maka bagaimana,
Jika satu yang membangun,
Seribu yang merusak?”

(Tqbal)



BAB XI

Teori Peran

Pengertian Teori Peran

Soerjono Soekanto mengungkapkan pengertian peranan yaitu aspek dinamis kedudukan (status). Ketika individu memenuhi hak serta kewajibannya berdasarkan kedudukannya, artinya ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 1990:268). Dengan demikian, peranan bisa didefinisikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku individu mencakup norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat (Cohen, 1992:76).

Peranan berkaitan dengan pekerjaan, seseorang diharap dapat melaksanakan kewajiban berkaitan dengan peranan yang dipegang. Maka, peranan juga dimaknai seperangkat harapan yang ditujukan kepada seseorang yang berada pada kedudukan sosial tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peranan juga ditentukan oleh norma yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam menjalankan peran, orang yang memiliki peran tertentu di dalam masyarakat berkewajiban melaksanakan hal-hal yang menjadi harapan masyarakat. Misalnya peranan dalam keluarga, maupun peranan lainnya (Berry, 1981: 99-101).

Robert Linton menggambarkan pemegang peranan, atau yang disebutnya sebagai aktor yang terlibat dalam interaksi sosial, bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh lingkungan yang bisa berbentuk budaya. Sesuai dengan hal ini, harapan terhadap pemegang peran merupakan pemahaman bersama yang menuntut untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mempunyai peranan tertentu misalnya sebagai mahasiswa,

diharapkan supaya berperilaku sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban. Glen Elder menekankan peran pada harapan masing-masing atau setiap anggota masyarakat untuk berperilaku berdasarkan kategori yang berlaku pada masyarakat tersebut (Risnawati, 2016:115).

Harapan terhadap peranan terdapat dua. *Pertama*, harapan dari masyarakat kepada pemilik peran. Hal ini juga bermakna, pemilik peran memiliki kewajiban tertentu yang harus dijalankan oleh pemegang peran. *Kedua*, harapan milik pemegang peran terhadap masyarakat maupun terhadap orang-orang yang berelasi dengannya saat melaksanakan peranan. Hal ini berarti pemegang peranan memiliki hak terhadap orang yang berhubungan dengannya. Maka peranan dipandang sebagai bagian dari struktur masyarakat yang saling berhubungan.

Alvin Bertrand menjelaskan bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan pemangku status atau kedudukan tertentu (Taneko, 1986:220). Menurut Dougherty & Pritchard, teori peran memberi suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku dalam organisasi. Mereka menyebutkan peran tersebut melibatkan pola pembuatan produk sebagai lawan dari perilaku ataupun tindakan. Selanjutnya, Dougherty & Pritchard mengemukakan relevansi suatu peran yang bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai serta pengamat, seperti supervisor bila di perusahaan, terhadap produk yang dihasilkan. (Bauer, 2003:58).

Scott et al menyebut lima aspek penting dari peran, antara lain:

- a. Peran sifatnya impersonal: bukannya individu, tetapi posisi peran itu sendiri yang menentukan harapannya.
- b. Peran berhubungan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yakni perilaku yang diharapkan pada suatu pekerjaan tertentu.
- c. Peran sukar dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*).
- d. Peran bisa cepat dipahami dan mencapai banyak perubahan perilaku utama.
- e. Peran dan pekerjaan (*jobs*) tidak sama. Seseorang yang melaksanakan pekerjaan bisa saja memiliki peran lain di luar pekerjaan yang dikerjakannya. (Kanfer, 1987: 197).

Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada individu berdasarkan posisi sosial yang diberikan secara formal maupun

informal. Peran berdasarkan ketentuan serta harapan menjelaskan hal yang harus dilakukan oleh individu pada situasi tertentu, supaya bisa memenuhi harapan mereka sendiri atau yang diharapkan oleh orang lain menyangkut peran tersebut (Hermansyah, 2015: 352-353).

Peranan berhubungan dengan kedudukan (status). Ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya artinya sudah menjalankan suatu peranan. Keduanya, antara peranan dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan (status). Tiap individu memiliki berbagai peranan yang asalnya dari interaksi sosial. Hal ini sekaligus bermakna bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat, serta apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang bertindak pada batas-batas tertentu termasuk merespon perbuatan orang lain. Pemegang peranan akan menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Maka, peranan diatur oleh norma yang berlaku di masyarakatnya. Peran menuntut adanya perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki peranan tertentu. Setiap orang mungkin memiliki sejumlah peran yang beragam. Maka pemegang peran diharapkan dapat mengisi setiap peran sesuai dengan peran tersebut. (Horton, 1999:118).

Peranan meliputi:

- a. Peranan mencakup norma-norma yang dikaitkan dengan posisi ataupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan pada definisi ini menjadi serangkaian aturan yang mengatur seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep terkait hal yang bisa dilaksanakan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan bisa disebut juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2005: 269).

Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Agar bisa berinteraksi satu sama lain, orang-orang membutuhkan cara tertentu untuk mengantisipasi perilaku orang lain. Seseorang memiliki peran, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Masing-masing peran menginginkan perilaku yang tidak sama, antara satu dengan yang lain (Agustina, 2009: 42).

Peranan merupakan sekumpulan tingkah laku, atau perilaku yang berhubungan dengan posisi tertentu seseorang di dalam masyarakat. Peranan yang tak sama membuat jenis tingkah laku yang tak sama pula. Maka bisa jadi perilaku seseorang akan sesuai pada suatu situasi tertentu, namun pada situasi yang lain perilakunya tidak sesuai. Maka seseorang memiliki kebebasan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang dimiliki, untuk menjalankan kewajibannya. Setiap orang bisa mempunyai peran pada beberapa situasi. Bisa jadi pada satu situasi seseorang menjadi ayah, namun pada situasi lain bisa menjadi menjadi anak, dan lain-lain (Sarbin & Allen, 1968).

Menurut (Biddle dan Thomas, 1966) peran terbagi menjadi empat yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian, atau tugas di dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. Adanya kecenderungan tindakan tertentu yang terlihat pada saat seseorang menjalankan perannya.
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku. Orang yang menjalankan perannya, ditentukan juga oleh kedudukan (status) yang dijalankan, berupa hak dan kewajiban.
4. Kaitan antara orang dan perilaku. Orang yang menjalankan peranan akan berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Ahli Teori Peran

Robbins dan Judge

Robbins dan Judge, menyebut peran berkaitan dengan tiga hal. *Pertama*, adanya konflik di dalam peran (*role conflict*). Adanya konflik di dalam peran mewujudkan harapan yang mungkin sulit untuk dipenuhi atau dipuaskan. Harapan terhadap peran yang berbeda-beda juga dapat menghasilkan konflik peran. Konflik peran merupakan suatu kondisi seseorang yang berusaha untuk patuh pada satu kewajiban dari peran yang dijalankan. Pada saat yang sama, terdapat kesulitan untuk memenuhi kewajiban dari peran lainnya. Bahkan, pada kondisi yang ekstrim, akan terjadi situasi di mana ada harapan pada peran yang saling berlawanan. Konflik peran adalah suatu kondisi, individu yang dihadapkan pada harapan yang berlainan dari peran yang dijalankan (Robbins dan Judge, 2015).

Kedua, peran yang tidak pasti (*role ambiguity*). Peran ambigu merupakan ketidakpastian tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemegang peranan untuk menjalankan perannya. Peran ambigu merupakan kondisi suatu pekerjaan yang memiliki ketidakpastian dalam suatu tindakan yang dilakukan terhadap perilaku pihak lain, termasuk juga kepastian dalam menjalankan kewajiban yang diharapkan. Peran ambigu terjadi apabila harapan dari suatu peran tidak dapat dimengerti dengan jelas, dan pemegang peran tidak percaya dengan apa yang harus dilakukan.

Ketiga, peran berlebih (*role overload*). Peran berlebih merupakan jumlah tuntutan yang banyak, bahkan cenderung berlebihan terhadap seseorang yang memiliki peran tertentu. Peran berlebih terjadi karena kurangnya kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki oleh individu untuk memenuhi kewajiban yang diharapkan. Peran berlebih juga bisa terjadi karena terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada waktu yang sama. Peran berlebih dirasakan ketika seseorang menjalankan peranan melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Maka, peran berlebih terjadi pada saat seseorang memiliki terlalu banyak tuntutan, sementara waktu yang dimiliki untuk menyelesaikan terlalu sedikit (Cook et al, 2003).

Praktik Teori Peran

Sebagaimana disebutkan bahwa peran berkaitan dengan tindakan seseorang di dalam interaksi sosial yang berkaitan dengan harapan terhadap pemegang peran. Setiap orang yang memiliki peran berperilaku sesuai perannya. Maka, dalam praktik kehidupan politik, perilaku masing-masing orang yang terlibat di dalam pencalonan dan kemenangan calon kepala daerah tak sama antara satu dengan yang lain. Terdapat perilaku yang semata-mata bergabung karena ingin membantu kemenangan, ada juga perilaku yang dibarengi dengan motif untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi maupun politik, dan beragam perilaku lainnya.

Kedudukan orang dalam perilaku dapat dilihat dari teori peran yang menyebut bahwa perilaku orang ditentukan oleh peran orang yang bersangkutan. Peran tersebut menuntun orang berperilaku sebagaimana perannya. Seorang aktor politik akan berperan sebagai orang yang dermawan dengan banyak dana.

Peran merupakan suatu pengharapan orang lain terhadap seseorang yang berada pada status tertentu. Alvin Bertrand memaparkan terkait

peranan merupakan pola tingkah laku yang diharapkan pemangku status ataupun kedudukan tertentu. (Taneko, 1986: 220). Dokter misalnya, diharapkan agar berperilaku sesuai dengan peran tersebut, yang mengobati orang sakit. Status sebagai dokter tersebut membuatnya harus mengobati pasien yang datang kepadanya, perilaku tersebut sudah ditentukan oleh harapan lingkungan dan orang sekitar (Sarwono, 2002: 89).

Perilaku dengan status orang di dalam proses pemilihan kepala daerah memang selalu berkaitan. Bagi orang yang berlatang belakang pragmatis, maka di dalam sikap dan tindakannya selama proses pemilihan kepala daerah juga akan selalu pragmatis. Begitu seterusnya. Dengan kata lain, perilaku individu berdasarkan pada konsep perannya terhadap masyarakat sekitar. Bagaimana individu mengkonsep masyarakat, begitulah ia berperilaku. Berdasarkan definisi tersebut, peranan bisa dikatakan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang mencakup norma-norma yang diungkapkan dengan posisi pada masyarakat. Pendapat lainnya menyebut bahwa peran merupakan suatu perilaku yang menjadi harapan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (Cohen, 1992: 76).

Menurut Robert Linton, terdapat interaksi yang dilakukan oleh aktor bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan pada pemilik peran merupakan pemahaman bersama yang menuntut untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut (Risnawati, 2016: 115).

Aktor politik sebagai pemain di dalam pemilihan kepala daerah yang mendukung pasangan kepala daerah ikut terlibat dalam permainan politik yang umum (jamak) terjadi di dalam kontestasi pilkada. Tidak ada satupun calon kepala daerah atau pasangan calon kepala daerah tidak membutuhkan pendukung. Kebiasaan tersebut membuat kelaziman pada sikap dan permainan aktor politik terlibat di pemilihan kepala daerah. Kelaziman di dalam politik tersebut menjadi satu kesepahaman di antara para aktor yang terlibat, baik sebagai aktor utama atau yang didukung sebagai calon maupun pihak lain yang ikut terlibat menjadi tim pemenangan, relawan, maupun jaringan lain. Pemahaman terhadap hal tersebut membuat seluruh pihak menjadi berharap bahwa aktor politik

yang akan membiayai kebutuhan dana pencalonan dan kemenangan pasangan calon yang didukung, mulai dari kebutuhan personal sampai tim kemenangan, dan lain-lain.

Senada dengan Robert Linton, menurut (Kahn, 1964) teori peran (*role theory*) memberi perhatian utama pada sifat individu/ personal sebagai pelaku sosial, atau aktor yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat (Shaw & Costanzo, 1970). Peran aktor politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi penting maknanya dalam teori peran. Dengan begitu akan terlihat betapa pentingnya peran aktor di dalam seluruh proses pemilihan kepala daerah bagi pasangan calon kepala daerah yang didukung. Aktor politik begitu sentral perannya di dalam menjalankan proses pencalonan dan kemenangan pemilihan kepala daerah. Ada semacam kewenangan (*authority*) untuk menentukan siapa yang akan dijadikan bagian dari tim kemenangan, dan bagaimana mengelola tim kemenangan.

Teori peran (*role theory*) memiliki kaitan atau hubungan dengan teori lain. Salah satunya yang terjadi dalam dunia teater/ drama yang biasa disebut dengan lakon. Erving Goffman dalam teori dramaturgi berkaitan dengan aktor memiliki dua wajah yang terefleksi dalam dua panggung, yaitu panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan adalah tempat di mana aktor menampilkan sesuatu yang sudah dirangkai, baik tampilan personalnya maupun apa yang disampaikannya. Sedangkan di panggung belakang, ada serangkaian proses untuk menghadirkan cerita, dan tampilan aktor yang tidak sama dengan apa yang ditampilkan di depan. Di depan serba rapi, bagus dan menawan, di panggung belakang, tampilan yang amburadul dan kacau balau masih terjadi (Suyanto & Amal, 2010: 175).

Sebagaimana aktor pada lakon drama, aktor politik dalam pemilihan kepala daerah juga senantiasa menampilkan sisi baik sebagai orang yang dermawan, suka membantu orang lain, dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang didukung bersama dengan seluruh relawan, jaringan dan tim kemenangan. Di hadapan semua itu aktor politik tampak sangat baik dan hampir nyaris tanpa kendala. Bahwa di belakang panggung kehidupan selama proses mendukung calon kepala daerah terdapat dinamika yang sifatnya internal, dan tidak ada orang yang mengetahui kecuali hanya orang dekatnya, bisa jadi sangat mungkin terjadi, dan tidak mustahil terjadi, sebagaimana yang terjadi pada lakon drama yang menyisahkan

kisah lain di belakang panggung (*backstage*).

Selanjutnya, posisi aktor dalam dunia teater itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, di mana perilaku aktor di dalam drama tidak bisa berdiri sendiri. Kehadiran aktor di depan panggung karena ada kondisi dan orang lain yang menyebabkan hadirnya aktor. Sehingga hasilnya, bahwa perilaku yang diharapkan daripada aktor tidak berdiri sendiri, tapi selalu ada dalam kaitannya dengan orang lain, atau ada aktor lain yang berhubungan dengan orang/ aktor tersebut (Soekanto, 1984: 237).

Posisi aktor politik sebagai aktor dalam pemilihan kepala daerah tidak berdiri sendiri, atau ada tanpa ada sebab sama yang menyebabkan kehadirannya. Kehadiran aktor politik pada pemilihan kepala daerah memang karena ada hubungan dengan orang lain yang juga membutuhkan terhadap keterlibatan dan dukungan aktor politik. Dapat dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana adalah, kehadiran aktor politik, karena memang ada pihak yang menghendaki kehadirannya, baik kondisi maupun aktor lain. Dalam hal ini berlaku hukum sebab-akibat (kausalitas), aktor politik ada, karena ada sebab yang menghendaki.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Glen Elder yang membantu memperluas pemakaian teori peran. Pendekatannya yang bernama “life-course” mengartikan tiap masyarakat memiliki harapan kepada tiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu berdasarkan kategori-kategori tertentu di masyarakat, baik berdasarkan kategori yang berlaku dalam masyarakat tersebut (Risnawati, 2016: 115).

Masyarakat secara tidak langsung juga menghendaki keberadaan aktor politik, terutama jika dilihat dari sikap pragmatis masyarakat dan permisif terhadap politik uang. Munculnya satu suara sama dengan lima puluh ribu rupiah, menunjukkan bahwa setiap calon yang hendak dipilih di pemilihan kepala daerah harus berani melakukan pembelian suara atau eksekusi politik uang (*money politic*), sebesar Rp 25 ribu sampai dengan Rp 50 ribu. Atau bisa juga dalam bentuk barang yang nominalnya hampir sama dengan angka tersebut, seperti kerudung dan minyak goreng.

“Bila ada satu kelompok
menyerang kelompok lain,
itu dianggap perbuatan kriminal.
Namun bila ada satu negara
menyerang negara lain,
itu dianggap perbuatan heroik”
(*Mohammad Hidayaturrahman*)



BAB XII

Teori Modernisasi

Pengertian Modernisasi

Menurut Wilbert Moore, modernisasi merupakan proses perubahan secara total pada kehidupan masyarakat yang selama ini tradisional ke dalam kehidupan modern. Kehidupan modern ditandai dengan semakin massifnya masyarakat menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan modern memacu kemajuan ekonomi, memakmurkan warga negara dan menstabilkan kehidupan politik (Moore, 1967). Modernisasi berarti perubahan yang dilakukan secara sengaja, atau dirancang secara sengaja dari kehidupan tradisional kepada kehidupan yang modern. Modernisasi ditandai dengan adanya industrialisasi. Yaitu menjadikan sumber daya yang selama ini berbasis pertanian, dikembangkan menjadi industri (Rosana, 2011).

Modernisasi pada sektor pertanian bisa dilihat dari peralatan yang digunakan untuk bertani. Dulunya peralatan pertanian menggunakan peralatan tradisional seperti kapak dan cangkul, juga alat bajak menggunakan hewan. Namun kemudian diubah dengan menggunakan mesin traktor dan seterusnya. Modernisasi juga terjadi pada hasil dari produk pertanian. Bila dulunya langsung dikonsumsi setelah dipanen, namun kini diproses di pabrik-pabrik yang mengolah hasil pertanian menjadi berbagai komoditas.

Dalam perjalanannya yang mengalami industrialisasi tidak hanya pertanian, namun hampir seluruh sektor dalam kehidupan manusia mengalami proses industrialisasi. Dunia pendidikan yang dulunya bersifat tradisional, kemudian mengalami industrialisasi. Guru ngaji

yang mengajar secara sukarela, kini berubah menjadi lembaga-lembaga pendidikan yang mengarah pada orientasi bisnis (*business oriented*). Hal ini semakin kuat dengan banyaknya perusahaan yang mendirikan sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya pengelolaan lembaga pendidikan dijalankan sebagaimana industri dengan manajemen perusahaan. Begitu pula dengan sektor kesehatan, dan sektor lain yang telah mengalami modernisasi. Terlebih lagi pada sektor perikanan, kehutanan dan sektor yang berbasis pada sumber daya alam.

Ahli Teori Modernisasi

Harrod & Domar: Modal dan Investasi

Roy Harrod dan Evsey Domar merupakan dua orang ahli ekonomi yang membicarakan ekonomi pembangunan, dan menekankan peran penyediaan modal dan investasi. Harrod dan Domar memiliki pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan akan berhasil dengan baik bila adanya modal yang besar, dan tingginya investasi. Semakin tinggi investasi dan putaran modal di satu negara, maka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat (Harrod & Domar 1947).

Max Weber: Semangat Kapitalisme dan Etika Protestan

Tokoh lain teori modernisasi adalah Max Weber. Weber merupakan seorang sosiolog Jerman yang menekankan tentang nilai budaya termasuk peran agama dalam pembentukan kapitalisme. Menurut Weber, agama memiliki peran yang menentukan dalam mempengaruhi tingkah laku individu. Tingkah laku individu tersebut yang kemudian melahirkan semangat pada kapitalisme. Weber melihat hal tersebut terjadi di Eropa (Giddens, 2003).

David McClelland: n-Ach

Tokoh lain dalam teori modernisasi adalah David McClelland. McClelland dikenal sebagai seorang ahli psikologi sosial. McClelland mendasarkan teorinya pada aspek psikologi individu. Menurut McClelland, proses kemajuan ekonomi dan pembangunan didorong oleh adanya motivasi yang disingkat dengan n-Ach. Yang dimaksud dengan n-Ach adalah kebutuhan untuk berprestasi yang didorong oleh keinginan untuk berafiliasi, berprestasi tinggi, dan kebutuhan untuk berkuasa (McClelland, 1965).

Alex Inkeles dan David Smith: Manusia Modern

Alex Inkeles dan David Smith merupakan tokoh modernisasi yang menekankan pada manusia sebagai faktor utama penopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Menurut Inkeles & Smith, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, ditentukan oleh keberadaan manusia modern. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tanpa kehadiran manusia modern, menjadi kurang (Inkeles & Smith, 1974).

Hoselitz: Faktor-Faktor Non-Ekonomi

Bert F. Hoselitz merupakan tokoh teori modernisasi yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada faktor nonekonomi, dalam hal ini adalah kewirausahaan. Menurut Hoselitz, permasalahan pertama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah mengenai kewirausahaan (Hoselitz, 1988).

Rostow: Lima Tahap Pembangunan

Walt Whitman Rostow atau yang dikenal dengan W.W. Rostow atau hanya Rostow, merupakan tokoh paling fenomenal di dalam teori modernisasi. Banyak pemikirannya mengenai lima tahap pembangunan yang sejalan dengan teori modernisasi banyak dianut di berbagai negara di dunia. Menurut (Rostow, 1960), ada lima tahap modernisasi. *Tahap pertama*, masyarakat tradisional. Pada tahap ini masyarakat berada dalam kondisi yang tradisional. Masyarakat mengelola potensi perekonomian yang ada secara tradisional. *Tahap kedua*, prakondisi untuk lepas landas. Proses ini ditandai dengan kemampuan masyarakat yang telah memiliki pendidikan dan skill. *Tahap ketiga*, lepas landas. Pada tahap ini masyarakat sudah menggunakan teknologi dan berada pada masa industrialisasi. Masyarakat secara umum bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan teknologi modern. *Tahap keempat*, bergerak ke kedewasaan. Pada tahap ini, masyarakat sudah bisa melakukan produksi secara massal, dengan teknologi yang telah dikuasai. Setiap masyarakat memiliki kelebihan yang bisa mencukupi kekurangan di masyarakat lain. Hal ini menyebabkan terjadinya globalisasi, dan adanya export dan import. *Tahap kelima*, Konsumsi massal. Pada periode ini konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, namun juga pada aspek lain.

Praktik Teori Modernisasi

Modernisasi merupakan teori yang saat ini paling dominan dan banyak dianut oleh negara di dunia. Meski begitu ada sejumlah negara dan komunitas masyarakat yang tidak menerima keberadaan modernisasi, karena dianggap menciptakan banyak persoalan global. Beberapa di antaranya adalah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang yang ada di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Selain itu, modernisasi mendorong terjadinya kerusakan lingkungan alam, terutama karena ekstraksi terhadap sumber daya alam yang dilakukan secara massif, untuk memenuhi kebutuhan industri di negara-negara maju dan modern.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan teori modernisasi. Hal ini terlihat jelas sejak Orde Baru Indonesia melakukan industrialisasi pada sektor-sektor yang berkaitan kebutuhan bangsa. Indonesia pada era Orde Baru benar-benar menggenjot aspek industri pada seluruh sektor kehidupan, tidak hanya ekonomi tapi juga pada sektor pendidikan dan lain-lain. Pada sektor ekonomi yang berbasis agraris atau pertanian. Orde Baru memiliki target setiap kecamatan yang ada di Indonesia memiliki minimal satu pabrik. Pabrik tersebut dianggap dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Dengan banyaknya warga yang bekerja di pabrik-pabrik yang ada menyebabkan banyak warga yang memiliki pendapatan. Dengan pendapatan yang dimiliki oleh warga, maka ada efek lanjutan yang akan berdampak positif. *Pertama*, pemasukan negara bertambah, dengan pajak yang dibayar oleh warga yang telah memiliki pendapatan. *Kedua*, warga yang memiliki pendapatan tidak hanya menjadi mandiri karena dapat memenuhi kebutuhan biaya hidup dan keluarga, namun juga dari pendapatan yang diperoleh dapat ditabung, dan diinvestasikan pada kegiatan usaha kecil. Pekerja di pabrik dan kantor dapat membuka usaha kecil baru seperti usaha makanan, minuman, jasa cuci, dan lain sebagainya. Usaha yang dibuat oleh pekerja tersebut kemudian membuka lapangan kerja baru bagi pihak-pihak yang dekat dengan mereka, bisa keluarga, bisa tetangga, bisa teman, bisa pula orang lain. Setidaknya untuk usaha tersebut bisa merekrut dua hingga tiga orang tenaga kerja, artinya ada dua hingga tiga keluarga yang dapat ditingkatkan kemampuan ekonominya. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak tetesan ekonomi hingga ke bawah (*trickle down effect*).

Pemerintah pada masa Orde Baru dengan pembangunan tinggal landas, pada dasarnya menjalankan teori modernisasi yang dikemukakan oleh Rostow yang mensyaratkan ada tahap lepas landas bagi masyarakat yang hendak menuju modernisasi di dalam pembangunan. *Pertama*, menarik investasi. Orde Baru melakukan upaya penarikan investasi, termasuk investasi dari luar negeri. Hal ini yang membuat banyak perusahaan asing masuk dan menanamkan modalnya di Indonesia pada berbagai sektor yang ada. Tidak hanya pada sektor industri manufaktur, namun juga pada sektor yang bergerak di ekstraksi sumber daya alam, seperti migas, batubara, kehutanan, tambang emas dan lain-lain.

Kedua, pembangunan industri. Modernisasi memang secara langsung tidak bisa dipisahkan dari industrialisasi. Masyarakat yang awalnya merupakan masyarakat pertanian dan kelautan, secara pasti kemudian diubah menjadi masyarakat industri. Hal ini terlihat jelas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan upaya membangun satu pabrik untuk satu kecamatan. Terutama untuk kota-kota besar dan daerah sekitarnya.

Ketiga, mendorong pendidikan. Pendidikan dasar dan menengah dikuatkan. Hal ini dilakukan untuk melahirkan warga yang memiliki keahlian (*skill*) dan kompeten pada era modern. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah Orde Baru dengan program pembangunan di bidang pendidikan dengan program pemerataan sekolah di tingkat dasar. Orde Baru membangun banyak sekolah dasar, dengan program Inpres atau Instruksi Presiden. Setelah itu Orde Baru menjalankan program “Wajar” atau wajib belajar sembilan tahun, yaitu sekolah hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Setelah itu pemerintah Orde Baru menggenjot pendidikan kejuruan dengan menggalakkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai wilayah di Indonesia.

“Modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri-ciri negara barat yang stabil.”

(Wilbert E. Moore)



BAB XIII

Teori Dependensi

Pengertian Teori Dependensi

Dependensi secara bahasa artinya tergantung. Teori dependensi memiliki makna ketergantungan. Secara istilah dependensi bermakna adanya ketergantungan satu negara dengan negara lain. Pembangunan berbasis dependensi berarti pembangunan suatu negara yang tergantung kepada negara lain. Secara umum ketergantungan bermakna negatif, sebab bisa membuat satu negara yang tergantung sangat membutuhkan negara lain yang menjadi tempat bergantung (Frank, 1984).

Namun, dalam praktiknya, ada negara yang memang sangat tergantung kepada negara lain. Seperti misalnya negara-negara yang berada di wilayah sub sahara, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari padang pasir. Kondisi alam tersebut membuat negara-negara di wilayah tersebut, tidak bisa menanam kebutuhan makanan pokok. Sehingga makanan pokok harus didatangkan dari negara lain. Dengan demikian, maka ada ketergantungan negara yang mendatangkan kebutuhan pokok tersebut kepada negara yang memasok makanan pokok (Nuhung, 2014).

Begitu pula dengan negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang bisa dijadikan untuk menjadi sumber utama pembangkit energi negaranya, mengalami ketergantungan kepada negara-negara yang memiliki sumber daya alam, yang dapat digunakan untuk pembangkit energi. Maka negara yang tidak memiliki sumber energi tersebut, mengalami ketergantungan kepada negara yang memiliki sumber utama pembangkit energi. Begitu pula dengan

negara yang memiliki kebutuhan utama yang tidak dimiliki memiliki ketergantungan kepada negara lain.

Ketergantungan lainnya adalah, negara yang tidak memiliki modal/ uang untuk membangun perekonomiannya sangat tergantung kepada negara-negara yang memiliki modal besar. Ketergantungan negara yang tidak memiliki modal/ uang adalah dalam bentuk hutang/ pinjaman kepada negara-negara “donor” yang memiliki banyak uang. Bila pula mengalami ketergantungan kepada lembaga-lembaga donor internasional yang memiliki uang, seperti Bank Dunia (World Bank), dan International Monetary Fund (IMF) (Bahri, 1998).

Ahli Teori Dependensi

Raul Prebisch

Menurut Prebisch, kemakmuran atau kekayaan negara-negara maju mengorbankan negara-negara miskin. Salah satu bentuk pengorbanan terhadap negara miskin adanya, pemberlakuan substitusi impor yang dilakukan oleh negara kaya pada produk dalam negeri mereka. Sehingga pada akhirnya, tetap saja bahwa globalisasi yang menjadikan pasar bebas, tidak menguntungkan negara-negara miskin. Pada hakikatnya antara negara kaya dengan miskin tidak bisa berjalan setara (Wardana & Meiwanda, 2017).

Andre Gunder Frank

Berkembangnya teori dependensi tidak bisa dilepaskan dari tokohnya bernama Andre Gunder Frank. Menurut Frank, teori dependensi merupakan bentuk ketidakmampuan suatu negara untuk bisa melalui tahap perkembangan. Sehingga yang terjadi adalah keterbelakangan. Keterbelakangan harus dirubah dengan cara revolusi, yang menghasilkan sistem sosialisme sebagai kebalikan dari kapitalisme (Fakih, 2002).

Theotonia De Santos

Tokoh utama dari teori Dependensi adalah Theotonio Dos Santos. Theotonio Dos Santos mengartikan ketergantungan sebagai “suatu kondisi historis yang membentuk struktur tertentu dari ekonomi dunia sedemikian rupa sehingga menguntungkan beberapa negara dengan merugikan negara lain dan membatasi kemungkinan pengembangan ekonomi bawahan.” (Santos, 1970).

Antonio Gramsci

Menurut Gramsci, ketergantungan menyebabkan terjadinya hegemoni. Hegemoni satu negara terhadap negara lain. Hegemoni merupakan bentuk penguasaan secara ekonomi dan politik suatu negara kepada negara lain. Penguasaan tersebut secara terus-menerus hendak dipertahankan (Gramsci, 1971).

Praktik Teori Dependensi

Ketergantungan negara-negara dunia ketiga (*third countries*), atau termasuk di Indonesia terhadap negara maju (*welfare state*) bisa dalam dalam berbagai bentuk ketergantungan. Dalam pandangan teori dependensi, ketergantungan tersebut melahirkan ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan hubungan dan interaksi antara negara pinggiran (*peripheral countries*) dengan negara pusat (*centris countries*). Dalam praktiknya, negara pusat mendominasi dengan pinggiran. Negara pusat bahkan, sering disebut menjadi “penjajah” bagi negara pinggiran.

Ketergantungan yang menimbulkan ketidaksetaraan secara terus-menerus. Ketergantungan yang tercipta dalam hubungan satu negara dengan negara lain, dapat dilihat sebagai ketergantungan yang terjadi pada jangka panjang, bila tidak terjadi selamanya. Apabila negara yang bergantung masih memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh negara tempat bergantung. Namun bila negara yang tergantung tidak lagi memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan, maka dapat ditinggalkan. Pada akhirnya, kondisi ketergantungan tetap saja merugikan negara yang tergantung pada negara lain. Secara perlahan, namun pasti, kondisi tersebut menciptakan polarisasi negara-negara pusat (*central countries*) dan negara-negara pinggiran (*peripheral countries*) (Carter & Rogers, 2008).

Indonesia mengalami ketergantungan ke negara dalam bentuk ketergantungan beberapa hal. *Pertama*, ketergantungan bahan baku, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok warga, maupun untuk kebutuhan industri yang dibutuhkan. Indonesia tergantung kepada negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pokok warga Indonesia. Dalam bentuk yang paling nyata adalah banyak komoditas dan kebutuhan pangan yang diimpor dari negara lain. Seperti misalnya impor beras, gula dan garam. Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas, namun realitanya Indonesia mengimpor beras dari Vietnam yang luas lahan pertaniannya tidak lebih besar dari Indonesia. Begitu

pula dengan garam, Indonesia menjadi negara pengimpor garam. Padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai yang panjang, dan termasuk negara yang memiliki garis pantai terpanjang.

Kedua, ketergantungan terhadap modal, untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, termasuk gaji pegawai. Indonesia adalah negara yang tergantung kepada modal, terutama modal asing untuk membiayai program pembangunan, termasuk juga untuk membiayai aparatur pemerintah. Ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, tidak hanya dalam bentuk investasi dari luar negeri, namun juga dalam bentuk ketergantungan terhadap utang luar negeri. Dari tahun ke tahun utang luar negeri Indonesia terus bertambah, hingga jumlahnya mencapai Rp 6.000 triliun lebih pada tahun 2022. Hutang sebesar tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebesar Rp 600 triliun dana APBN digunakan untuk membayar utang setiap tahunnya.

Ketiga, ketergantungan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Indonesia masih tertinggal di dalam pengembangan teknologi. Hal tersebut secara sederhana bisa dilihat dari jaringan listrik dan telekomunikasi yang hingga kini masih belum mampu tersebar secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tentu saja membuat pembangunan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau aliran listrik dan tidak memiliki akses data (4G), mengalami kendala dalam pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kesehatan, termasuk pendidikan. Indonesia sangat tergantung kepada teknologi yang diimpor dari negara maju. Demikian pula dengan sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih belum memadai. Dilihat dari tingkat pendidikan misalnya, pada tahun 2021 rerata, penduduk Indonesia hanya kelas satu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini kemudian direspon oleh pemerintah untuk mengimpor dosen dari berbagai perguruan tinggi di luar negeri, untuk mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Ketergantungan Indonesia menyebabkan berbagai konsekuensi yang berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. *Pertama*, ketergantungan memiliki gejala yang dapat dilihat pada kondisi yang mempengaruhi pada keseluruhan sistem yang berjalan. Ketergantungan merupakan dampak langsung dari kapitalisme global. Ketergantungan seperti ini adalah ketergantungan pada sistem perekonomian yang dikendalikan oleh negara maju, terutama dengan

mata uang yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia.

Kedua, ketergantungan berpengaruh pada kehidupan politik. Negara yang memiliki ketergantungan kepada negara lain juga berpengaruh terhadap aspek politik negara tempat bergantung. Hal ini salah satu kondisi yang menyebabkan, demokrasi menjadi sistem yang banyak dianut negara di dunia. Demokrasi merupakan bentuk sistem politik yang memiliki kesamaan nafas dengan kapitalisme. Pada praktiknya, negara-negara yang menganut kapitalisme menjadi sponsor sistem politik demokrasi.

“Ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidakimbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut. Kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidakimbang.”

(Theotonio Dos Santos)



BAB XIV

Teori Kritis

Pengertian Teori Kritis

Teori kritis, masih terus menjadi pembicaraan dan perdebatan. Ada yang menilai teori kritis masih belum terlalu konkret dan jelas rumusnya. Bahkan ada yang menilai, teori kritis rumit dan sulit untuk dipahami, sehingga sulit pula untuk membuat suatu definisi yang jelas mengenai konsep teori kritis. Selain itu, substansi teori kritis sulit untuk ditentukan karena mempunyai batasan ruang lingkup yang kurang jelas. Maka dari itu, usaha untuk membuat suatu rumusan mengenai inti dari teori kritis diperlukan suatu usaha kajian yang mendalam terhadap pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Meski begitu tetap saja teori kritis tetap bisa dipahami pada dua esensi utama. *Pertama*, berkaitan dengan identitas. Masalah identitas yang dimaksud adalah individu atau pribadi yang menggunakan cara pandang *one dimensional man*, serta memandang manusia hanya sebatas objek. *Kedua*, berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam institusi kultural. Masalah institusi kultural adalah masalah yang terjadi dalam bidang agama dan pengembangan ilmu pengetahuan. Teori ini memandang bahwa ilmu yang berkembang pada masa ini menyebabkan terjadinya dikotomi antara orang yang diutamakan (kapitalis) dan merek yang dikesampingkan (Suhelmi, 2001).

Terdapat tiga ciri utama teori kritis. *Pertama*, selalu berusaha melakukan perubahan yang mendasar dalam masyarakat dengan melakukan konstruksi terhadap tafsiran realitas. *Kedua*, berusaha melakukan pendekatan historis terhadap segala peristiwa. *Ketiga*, bersifat komprehensif terhadap segala keadaan yang terjadi

dalam masyarakat. Terdapat tiga hal mendasar dan utama dalam proses pembentuk dari teori kritis. *Pertama*, selalu berpikir kritis dan curiga terhadap realita. *Kedua*, memperhatikan aspek historis dan masyarakat. *Ketiga*, tidak mendikotomi antara teori dan praktik, antara fakta dan nilai. Selain itu, bila ditelaah lebih jauh, teori kritis sangat mengkritisi pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk memperkuat kedudukan penguasa. Sehingga tercipta masyarakat yang tidak emansipatoris (Samekto, 2005).

Ahli Teori Kritis

Bila diperhatikan secara seksama, ada tiga tokoh utama teori kritis, yaitu Max Horkheimer (1895-1973), Theodor W. Adorno (1903-1969), dan Herbert Marcuse (1898-1979). Selain ketiganya ada satu tokoh lain yang tak kalah terkenal yaitu Jürgen Habermas (1929). Habermas merupakan generasi kedua dari teori kritis yang banyak membangkitkan kembali teori kritis. Ia bergabung di Institut Penelitian Sosial, Universitas Frankfurt, kemudian dibangun lagi oleh Horkheimer dan Adorno, pada dekade pasca Perang Dunia Kedua. Meski bukan merupakan bagian atau kelanjutan dari Marxisme, teori kritis memiliki referensi Hegel dan Marx yang disistematisasikan Horkheimer beserta rekan-rekannya di *Institute for Social Research* di Frankfurt. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Habermas dan rekan-rekannya di *University of Frankfurt*.

Meski teori kritis berkembang pesat di Jerman, namun kelahiran teori kritis tidak bisa dipisahkan dengan kondisi dan perubahan yang terjadi di Amerika. Pada saat itu produksi media hiburan dikontrol oleh korporasi-korporasi besar tanpa ada campur tangan negara. Hal ini memunculkan budaya massa komersial sebagai ciri masyarakat kapitalis dan kemudian menjadi fokus studi budaya kritis. Horkheimer dan Adorno merespon kondisi tersebut dengan membuat kajian dan mengembangkan diskusi tentang apa yang disebut industri kebudayaan, sebutan untuk industrialisasi dan komersialisasi budaya di bawah produksi kapitalis.

Theodor Adorno

Dalam teori kritis, Theodor Adorno adalah tokoh kunci. Nama lengkapnya adalah Theodor Wiesengrund Adorno. Ia lahir di Kota Frankfurt, Jerman tahun 1903. Ia merupakan “seorang filosof, komposer, penulis esai, dan teoritis sosial. Pada usia 15 tahun, Adorno mengikuti pertemuan studi mingguan bersama Siegfried Kracauer, yang diakuinya

jauh lebih berpengaruh pada perkembangan intelektualnya daripada guru-gurunya di bangku kuliah. Pada tahun 1921, Adorno belajar di universitas di Frankfurt, mempelajari filsafat, sosiologi, musik, dan psikologi.” Ia berjumpa dan berteman dengan Max Horkheimer dan Walter Benjamin saat kuliah. Tahun 1924, “Adorno menyelesaikan doktor di bidang filsafat. Pada tahun 1927, dia kembali ke Frankfurt, setelah sempat tinggal di Wina untuk belajar musik, dan bergabung dengan Horkheimer di Institut Penelitian Sosial yang didirikan pada tahun 1924, yang kemudian dirujuk sebagai Mazhab Frankfurt. Lembaga ini bertujuan menggabungkan filsafat dan ilmu sosial menjadi teori sosial kritis. Sebagai pemikir Adorno keberatan terhadap filsafat sistematis dan meragukan apakah pemikiran yang sebenarnya dapat transparan. Hal ini berasal dari keberatannya terhadap berpikir metodologis. Filsafat sistematis dan pemikiran metodologis memiliki kecenderungan untuk sampai pada kesimpulan yang hanya mengkonfirmasi asumsi yang terkandung dalam premis-premisnya. Adorno adalah pemikir anti-Hegel dan sekaligus, sepenuhnya Hegelian. Dia tidak setuju terhadap posisi filosofis Hegel yang bercorak totalitarianisme. Adorno meyakini bahwa pemikiran konseptual muncul dari kebutuhan terhadap adaptasi dan, karenanya, selalu membawa benih-benih dominasi di dalamnya.”

Artikel Adorno “Situasi Sosial Musik,” yang muncul dalam edisi pertama majalah yang diproduksi oleh Institut Penelitian Sosial Frankfurt, mencakup berbagai hasil sosiologis dan termasuk dalam edisi pertama jurnal tersebut. Esai ini penting sebab analisa musik menjadi awal dari refleksi sosiologis Adorno, tujuannya menyingkap kandungan sosiologis dalam tekstur karya estetis. Berkelanjutan pada temuan mediasi sosial, yang artinya saling keterpengaruhannya antara yang universal dan partikular; masyarakat dan individu”. Teori kritis Adorno berkaitan dengan keterkaitan antara isu-isu masyarakat secara keseluruhan dan cara-cara nyata di mana orang menjalani kehidupan mereka dalam masyarakat itu. Menggunakan pengertian masyarakat sebagai titik awal, subjeknya adalah individu. Sebuah teori menjadi “kritis dengan menegasikan ketidakadilan, egoisme, dan alienasi yang dihasilkan oleh kondisi sosial di bawah ekonomi kapitalis. Pasca perang dunia, Adorno mengembangkan cara berpikir yang disebut dialektika negatif yang menolak segala bentuk pemikiran afirmatif tentang etika dan politik. Sementara Horkheimer semakin tertarik pada teologi.

Jürgen Habermas

Habermas yang bergabung dengan Institut Penelitian Sosial Frankfurt pasca perang dunia, memulai pemikirannya. Pemikiran Habermas berbicara tentang pengembangan konsep nalar yang lebih komprehensif, yakni nalar yang tidak tereduksi pada instrumen teknis dari subjek individu, yang kemudian memungkinkan terbentuknya masyarakat emansipatif dan rasional. Usaha ini melahirkan tesis tentang keterkaitan antara pengetahuan dan kepentingan manusia. Tentang hal ini, Habermas mempostulasi keberadaan tiga kepentingan manusia yang berakar”. Tiga kategori minat ada dalam hidup; kepentingan teknis (teknis), kepentingan praktis (praktis), dan kepentingan emansipatoris. Kepentingan teknis (teknis) adalah yang paling umum (emansipatoris). Pemahaman ketiga kepentingan ini diperlukan sehubungan dengan pembentukan otoritas yang mampu dan mengendalikan dari organisasi dominan dan apa yang dicarinya (Morrison, 2002).

Habermas menekankan alasan yang mendasari untuk memperbaiki penyimpangan. Ia menegaskan dasar rasional kehidupan bersama cuma bisa didapatkan apabila hubungan sosial teratur berdasarkan prinsip validitas konsekuensi politis bergantung pada kesepakatan yang dicapai dalam komunikasi yang bebas dari dominasi. Konsep Habermas terkait teori kritis mengalami kristalisasi pada tahun 60-an dalam karyanya, filsafat ilmu sosial, “*On the Logic of the Social Sciences dan Knowledge and Human Interests*”. Habermas menulis kritikan positivisme dalam ilmu-ilmu sosial, di mana menyebutkan pandangan positivistik sesuai untuk ilmu-ilmu alam dengan tujuan akhirnya yaitu mengontrol alam. Ilmu budaya (*cultural sciences*), layaknya sejarah dan antropologi, lebih sesuai didekati secara interpretatif. Namun apabila berdiskusi ilmu-ilmu sosial, Habermas percaya bahwa kepentingan teknis, seperti dalam ilmu alam, dan praktis, serta ilmu budaya, harusnya ada di bawah kepentingan emansipatoris. Maka, yang perlu dilaksanakan ilmuwan sosial yaitu memahami situasi subjektif yang terdistorsi secara ideologis, memahami kekuatan yang mengakibatkan situasi tersebut, serta menunjukkan bahwa kekuatan ini dapat diatasi dengan kesadaran individu ataupun kelompok (Habermas, 2007).

Praktik Teori Kritis

Sebuah analisis yang luas dan mendalam tentang realitas didefinisikan sebagai hipotesis. Secara historis, teori kritis dan konsep sekolah atau Mazhab Frankfurt tidak dapat dipisahkan. Pusat penelitian sosial Universitas Frankfurt, yang didirikan oleh neo-Marxis Jerman dan berlokasi di Frankfurt, Jerman, adalah sumber teori kritis. Pada 1961 teori kritis menarik perhatian publik dalam domain filsafat sosial dan sosiologi, termasuk di bidang ekonomi (Bernstein, 1994).

Debat sosial epistemologis Karl Popper dan Adorno adalah salah satu konflik intelektual paling terkenal di abad ke-20. Ini merupakan salah satu debat intelektual terpenting abad ke-20. Di kedua sisi debat Popperian atau Adorno, ada pula perdebatan yang tidak kalah serunya antara Hans Albert dan Jürgen Habermas, yang juga selalu berselisih satu sama lain. Sejak itu, perdebatan positivis dalam sosiologi Jerman terus berlangsung. Habermas selanjutnya juga dikenal sebagai ahli dan pelopor teori kritis (Dermawan, 2013).

Untuk memahami teori kritis, Habermas adalah seorang ahli yang telah berhasil menggabungkan pemikiran analitis dan dialektis. Menurut teori kritis Marxisme, cabang Marxisme terjauh dari komitmen ideologis Karl Marx adalah teori kritis (*Frankfurt Schule*). Sebagai teori kritis masyarakat, "*Eine Kritische Theorie der Gesellschaft*" (teori kritis masyarakat) mengacu pada metodologi dan karakteristik Mazhab Frankfurt. Orang-orang bebas dari kendali teknokrasi modern. Menurut pandangan ini, ketika mereka dapat memperbaiki dan merekonstruksi teori yang sesuai (Sholahudin, 2020).

Meskipun mendapat pengaruh dari teori sosial Karl Marx, teori kritis melampaui kerangka konseptual Marxisme. Beberapa tokoh teori kritis tidak mau diidentikkan dengan Marxisme, atau menolak beberapa konsep utama Marxisme dalam prosesnya, dan mengambil pandangan baru terhadap tantangan dalam masyarakat industri modern selain menjadi kreatif. Tokoh teori kritis yang banyak menguasai dan memahami Marxisme adalah Marx Horkheimer. Namun Horkheimer juga tidak sepenuhnya setuju dengan pemikiran Hegel dan Marx.

Dalam praktiknya, teori kritis melahirkan budaya post-modern. Post modern merupakan pengejawantahan dari kehidupan yang tidak lagi menganut asas-asas modernitas di dalam kehidupan sosial dan budaya,

namun melampaui itu. Jika pada era modern, masyarakat digambarkan sebagai masyarakat yang tertib berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing, maka dalam kehidupan postmodern, masyarakat bisa menjalankan banyak fungsi. Seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil Negara, tidak bekerja semata-mata hanya sebagai abdi Negara. Namun pada saat yang sama dia bisa mengembangkan kehidupan ekonominya dengan membuka usaha tertentu, dengan berjualan makanan, menjalankan usaha rumahan (*home industry*) dan lain-lain. Dengan aktivitas ekonomi yang dijalankan aparatur sipil Negara (ASN) akan membuat kehidupan ekonominya lebih meningkat, tanpa harus meninggalkan pekerjaan sebagai abdi Negara. Pekerjaan tersebut bisa dijalani di luar jam kerja.

Teori kritis adalah teori yang mendasarkan kehidupan manusia pada ide. Seperti yang disebut oleh Michael Pink, masyarakat sekarang hidup pada era ide. Pemilik perusahaan raksasa, bukan lah mereka yang memiliki aset banyak terbanyak seperti pada masyarakat modern, yang ditandai dengan industrialisasi, yang memiliki banyak mesin produksi yang akan berkuasa. Namun era sekarang adalah era di mana orang yang paling diterima idenya oleh publik, dia yang akan menguasai dunia, termasuk dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Teori kritis yang menjelma dalam bentuk dunia “postmo” berawal dari kelahirannya pada aspek seni dan budaya. Dimana bentuk bangunan dan lainnya, tidak lagi dalam bentuk yang rapi seperti umumnya era modern. Namun kadang seperti tidak beraturan dan tidak mudah untuk dipahami. Namun dalam perjalanannya tetap menarik untuk dilihat. Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi istilah anti kemapanan. Teori kritis yang terus meluas pada kehidupan sosial politik dan ekonomi melahirkan berbagai penentangan terhadap lembaga-lembaga yang mapan. Dalam teori kritis, lembaga-lembaga mapan, termasuk negara, dianggap sebagai pihak yang menjadi penyebab terjadinya persoalan dalam kehidupan. Hal ini misalnya terjadi pada protes terhadap “Wall Street.” Kelompok tertentu yang menentang terhadap kemapanan kelompok elit di Amerika dan penguasa ekonomi, berupaya untuk memprotes kedaulatan Wall Street dalam mengendalikan perekonomian Amerika dan global.

“Satu-satunya pengetahuan,
yang dapat benar-benar mengarahkan
tindakan,
adalah pengetahuan yang membebaskan
dirinya,
dari kepentingan manusia belaka,
dan didasarkan pada gagasan.

Dengan kata lain,
pengetahuan yang telah
mengambil sikap teoritis.”

(Jürgen Habermas)



BAB XV

Teori Pemberdayaan

Pengertian Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal kata berdaya, atau memiliki kemampuan dan daya (*power*). Pemberdayaan bermakna memiliki kemampuan atau kekuatan dengan diberdayakan (*empowerment*). Pemberdayaan bisa memiliki makna sederhana, yaitu, diberi kemampuan (*to give power*). Diberi kemampuan dengan tiga cara. *Pertama*, diberi uang/ modal (*to give money*). Pemberdayaan bisa dilakukan dengan cara memberi uang/ modal kepada sasaran pemberdayaan. Uang tersebut digunakan untuk membiayai usaha yang dijalankan. Cara ini dilakukan bagi segmen/ kelompok masyarakat yang memiliki keahlian tertentu. Misalnya kelompok pemuda yang memiliki keahlian perbengkelan, dan memiliki kemauan untuk membuka usaha perbengkelan.

Kedua, diberi keahlian (*to give skill*). Pemberdayaan bisa juga dilakukan dengan memberi atau mentransfer keahlian (*skill*). Pemberian keahlian (*skill*) biasanya diberikan kepada kelompok yang memiliki daya secara fisik dan mental, sehingga berpotensi untuk diberdayakan. Misalnya anak-anak muda yang secara fisik sehat dan mental yang menganggur, tidak memiliki pekerjaan. Namun kelompok tersebut memiliki keinginan untuk berdaya. Maka terhadap kelompok seperti itu diberi keahlian (*skill*), dengan cara dilatih, dididik, baik secara formal, maupun informal. Dengan memiliki keahlian anak-anak muda tersebut bisa bekerja pada industri yang ada di kota atau tempat tinggal mereka.

Ketiga, diberi keahlian dan modal. Pemberdayaan model ini dilakukan secara bersamaan, memberi keahlian dengan memberi modal. Pertama kali dilakukan adalah memberi skill atau melatih objek/sasaran sehingga memiliki keahlian. Setelah memiliki keahlian, objek/sasaran bisa dibuat mandiri dengan membuka usaha secara mandiri. Untuk membuka usaha secara mandiri, mereka memerlukan modal yang digunakan untuk membuka usaha. Setelah membuka usaha, maka kelompok ini menjadi mandiri dan berdaya dengan usaha yang dijalankan. Salah satu pekerjaan selanjutnya adalah pada, konsistensi objek/sasaran pemberdayaan yang telah memiliki usaha secara mandiri.

Maka, pemberdayaan memiliki relevansi dengan kekuasaan (*power*). Seseorang disebut “berdaya”, karena memiliki kemampuan, keterampilan atau kemampuan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat membahas mengenai pemberdayaan.

- a. Menyediakan kebutuhan dasar mereka sehingga mereka dapat tercukupi kebutuhan utama/dasar mereka. Dengan begitu, mereka akan mendapat kebebasan, bebas dari kelaparan. Bebas dari kelaparan akan membuat mereka memiliki kebebasan pula untuk mengekspresikan ide, dan pemikiran, sehingga mampu berkarya;
- b. Memiliki akses ke sumber daya yang memungkinkan mereka memperoleh lebih banyak uang sambil tetap mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan;
- c. Berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan (Wisseman et al; Hasbullah et al; Tindjafe et al).

Pemberdayaan mengacu pada proses di mana individu mengembangkan informasi, keterampilan, dan otoritas yang mereka butuhkan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang-orang yang mereka sayangi. Menurut Swift dan Levin tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Istilah “pemberdayaan” menggambarkan proses redistribusi kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Ada struktur yang bergerak di masyarakat untuk melakukan proses pemberdayaan. Pemberdayaan tidak terjadi secara otomatis, dan begitu saja. Ada upaya terstruktur dan disengaja untuk mewujudkannya (Suharto, 2010).

Individu yang berjuang untuk keluar dari kondisi dan situasi miskin dan meraih kesejahteraan, bisa dengan jalan pemberdayaan. Artinya

memiliki keinginan untuk berdaya. Sehingga dengan begitu, individu tersebut dalam terlibat di dalam serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau pemberdayaan anggota masyarakat yang lebih lemah dan lebih rentan. Setelah diberdayakan, maka individu tersebut dapat dan mampu mencari nafkah secara mandiri, kemudian ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan. (Irmawati, Salim, and Fitra, 2021).

Ahli Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat telah berkembang pesat dalam beberapa puluh tahun terakhir. Pemberdayaan seperti model baru di dalam pembangunan, yang banyak digunakan oleh berbagai lembaga, bahkan negara. Ada beragam model pemberdayaan yang diterapkan oleh ahli di dalam melaksanakan program pemberdayaan, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks.

Jim Ife

Pemberdayaan didefinisikan oleh Jim Ife dalam bukunya *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Menurut Ife, pemberdayaan menyediakan warga sumber daya, kesempatan untuk belajar tentang masa depan mereka sendiri. Memberi pengetahuan dan keterampilan yang akan meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan tentang mereka sendiri. Selanjutnya merancang masa depan dan berpartisipasi dalam upaya untuk mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Seperti yang didefinisikan oleh Jim Ife, istilah “pemberdayaan” terkait erat dengan dua konsep kunci: “kekuatan” dan “individu yang kurang beruntung” (ketidaksetaraan). Akibatnya, ada empat cara berpikir tentang pemberdayaan: pluralis, elitis, strukturalis, dan post strukturalis (Ife, 1995).

Empat gagasan pengembangan masyarakat dirinci dalam buku Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*. Selanjutnya, pemberdayaan dipandang sebagai metode untuk membantu individu dan kelompok yang kurang mampu dalam masyarakat sehingga mereka dapat menjadi lebih berharga. Kerja pemberdayaan yang dilakukan dirancang untuk membantu masyarakat dengan mengajari orang-orang tentang bagaimana menggunakan bakat, hobi, dan bagaimana menggunakan media yang terkait dengan aksi politik, dan bagaimana sistem (aturan main) bekerja (Zubaedi, 2013).

Alhasil, kapasitas masyarakat untuk bersaing secara sehat, tanpa ada yang menang atau kalah, semakin menguat. Untuk kedua kalinya, pemberdayaan dilihat dari perspektif elitis sebagai upaya untuk mempengaruhi elit, seperti pejabat terpilih, pemimpin perusahaan, dan orang kaya, baik dengan aliansi dengan elit tersebut atau dengan menentang mereka yang berkuasa dan mengejar perubahan di antara mereka (Zakaria, 2018).

Perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda pertempuran jangka panjang, karena tujuannya untuk menghapuskan segala macam ketimpangan struktural. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembebasan yang membutuhkan transformasi struktural dan penghapusan penindasan struktural agar berhasil. Penting juga untuk dicatat bahwa perspektif pascastrukturalis melihat pemberdayaan sebagai upaya untuk mengubah wacana, daripada tindakan atau praksis individu. Dengan demikian, belajar bagaimana menghasilkan pemikiran baru dan analitis dipandang sebagai langkah menuju pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan mencakup fokus pada komponen pendidikan yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Membangun atau memodifikasi sistem dan organisasi yang memungkinkan akses yang adil ke sumber daya dan layanan, serta kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan masyarakat, merupakan komponen kunci dari pemberdayaan. Upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran melalui proses pendidikan dirancang untuk memberdayakan murid dalam berbagai topik. Upaya sedang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada anggota masyarakat yang paling rentan untuk membantu mereka menjadi lebih kuat. (Zubaedi, 2013).

Praktik Teori Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan banyak dilakukan dan dipraktikkan di Indonesia, termasuk di pelosok wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kegiatan pemberdayaan perlu dilakukan dengan langkah yang hati-hati dan tidak asal-asalan. Bila tidak dilakukan dengan cermat, malah dapat berujung pada “memperdayakan” bukan pemberdayaan. Program pemberdayaan malah dapat “diperdaya” untuk kepentingan tertentu. Hal ini yang banyak membuat program pemberdayaan tidak berjalan efektif, tidak berhasil memberdayakan.

Pemerintah misalnya membuat banyak program, termasuk bantuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun hasil yang diharapkan dari program tersebut banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Jumlah dana yang digelontorkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah tidak bisa mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Banyak program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah, malah disalahgunakan oleh penerima maupun pihak yang menjadi pelaksana di lapangan. Oknum pelaksana biasanya menyalahgunakan program pemberdayaan dengan mengutip biaya tertentu kepada penerima program atau bantuan. Sedangkan penerima seringkali menyalahgunakan dengan menjual bantuan program pemberdayaan bila berupa barang. Bila berupa modal atau uang, tidak menggunakan atau membelanjakannya sesuai dengan peruntukan, tetapi malah untuk membeli berbagai peralatan rumah tangga dan hiburan.

Salah satu implikasi paling utama di dalam praktik pemberdayaan adalah upaya untuk membantu pihak atau kelompok yang tidak berdaya, marginal, terpinggirkan (Hatu, 2010). Tetapi hal ini tidak cukup, sebab niat baik dan keinginan untuk membantu pihak yang tidak berdaya, bila tidak diiringi dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi, juga manajemen yang baik, kegiatan pemberdayaan malah bisa sia-sia. Memang kegiatan membantu bisa bermakna pemberdayaan. Namun bisa juga hanya sebatas beramal saja (*charity*). Strategi beramal (*charity strategy*) memang merupakan salah satu pendekatan di dalam pembangunan. Hal ini dilakukan bagi mereka yang memang tidak lagi memiliki modal dan kemampuan untuk berdaya. Seperti misalnya kaum difabel. Meski tidak semua difabel tidak berdaya, pada kasus tertentu, banyak kaum difabel yang justru lebih memiliki kompetensi dan keahlian tertentu dari yang bukan difabel. Banyak kaum difabel yang bisa menguasai hafalan al-Qur'an 30 juz, dan mampu melantunkan ayat-ayat al-Qur'an dengan indah, lebih baik daripada yang bukan difabel. Ada pula difabel yang menguasai seni bermusik, ahli komputer dan lain sebagainya. Namun secara umum difabel dapat menjadi pihak yang menjadi sasaran *charity strategy*.

Selain difabel, yang dapat menjadi sasaran *charity strategy* adalah kelompok yang secara usia telah senja (*jompo*), dengan kemampuan fisik yang sangat lemah. Begitu pula dengan indera yang dimiliki telah tidak berfungsi dengan baik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak bisa. Untuk kelompok seperti dalam kondisi tersebut,

memang perlu didekati dengan *charity strategy*, artinya seluruh kebutuhan hidupnya ditanggung dan biaya secara langsung, terutama oleh negara. Jumlah kelompok tersebut cukup banyak di Indonesia. termasuk amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka, mulai dari makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, termasuk juga layanan kesehatan. Kelompok ini memang tidak bisa diberdayakan dengan program apapun, sebab dari segi fisik tidak bisa lagi berdaya. Sehingga satu-satunya pendekatan program pembangunan adalah *charity strategy*.

Banyak individu, kelompok, dan organisasi di masyarakat yang bergerak secara sukarela untuk membantu warga yang tidak berdaya. Hal ini sebagian didorong oleh keinginan untuk membantu mereka, dan mengharap balasan pahala dari kebaikan yang dilakukan, dengan balasan surga. Semangat seperti ini perlu diapresiasi, sebab di antara warga negara, tidak terlalu banyak yang peduli untuk melakukan hal tersebut. Tetapi perlu menjadi catatan, bahwa bantuan tersebut tidak hanya berhenti sebatas pemberian bantuan semata-mata, karena dapat menciptakan ketergantungan terhadap bantuan, tanpa mau bekerja keras dan berusaha untuk mandiri. Lebih buruk lagi, dapat menciptakan sebagai pihak yang hanya menerima bantuan secara terus-menerus, dan tidak berusaha untuk mandiri. Selamanya minta dikasihani dan kurang motivasi untuk menjadi berdaya.

Perlu strategi pemberdayaan yang lebih memungkinkan untuk membuat kaum yang tidak berdaya menjadi berdaya. Dalam istilah amal Islam (*islamic charity*) perlu ada upaya untuk membuat penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Dalam waktu tertentu ada target dari kegiatan pemberian bantuan, yang bisa merubah penerima bantuan, kemudian menjadi pemberi bantuan. Begitu seterusnya, sehingga dana yang diberikan untuk program tersebut dapat bergulir.

Sebelum program pemberdayaan dilakukan, perlu dilakukan analisis secara seksama dan mendalam terkait dengan beberapa hal berikut:

Pertama, sasaran. Kelompok yang menjadi sasaran penerima program pemberdayaan perlu dicermati secara baik. Apakah memang memiliki keinginan kuat, atau motivasi yang kuat untuk berdaya. Bila kelompok sasaran penerima program pemberdayaan tidak memiliki motivasi kuat untuk berdaya, ada baiknya program pemberdayaan ditinjau ulang. Salah

satu kunci keberhasilan dalam pemberdayaan adalah, motivasi yang muncul dari sasaran/ objek pemberdayaan. Sebesar apapun dana yang diberikan kepada sasaran/ objek pemberdayaan, bila objek/ sasaran pemberdayaan tidak memiliki motivasi kuat untuk berubah dan berdaya, maka model pemberdayaan akan susah untuk diimplementasikan. Begitu pula, sebagus apapun program pemberdayaan, bila objek/ sasaran pemberdayaan tidak memiliki motivasi, maka cenderung gagal. Maka kegiatan pemberdayaan harus dilakukan dengan hati-hati dan proses yang ketat. Tidak semua kegiatan program pemberdayaan berhasil. Biasanya dipilih terhadap orang-orang yang telah memiliki kegiatan terlebih dulu.

Kedua, masih terkait dengan sasaran penerima program pemberdayaan. Apakah budaya (*culture*) sasaran penerima program mendukung untuk lebih berhasil. Bila budaya penerima program tidak mendukung, seperti malas, tidak disiplin, hedonis, maka program pemberdayaan perlu dikaji ulang terhadap kelompok tersebut. Bila budaya yang terbentuk sebaliknya, mendukung terhadap kemajuan, seperti rajin, disiplin, pekerja keras, dan hemat, maka program pemberdayaan dapat dilakukan terhadap kelompok sasaran tersebut.

Ketiga, program pemberdayaan. Program pemberdayaan perlu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok penerima. Bila sasaran program memiliki keahlian pertanian, maka program pemberdayaan adalah yang berkaitan dengan pertanian. Bila sasaran penerima memiliki kemampuan di bidang perikanan, maka program bantuan harus berkaitan langsung dengan pertanian. Selain itu, program pemberdayaan juga disesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekitar kegiatan pemberdayaan.

Keempat, pelaksana. Pelaksana program pemberdayaan harus memiliki kepedulian terhadap kondisi prihatin sasaran penerima. Bila tidak memiliki semangat tersebut, kegiatan pemberdayaan hanya dimanfaatkan untuk bekerja semata-mata, bahkan untuk mencari keuntungan pribadi, atau bahasa lainnya, hanya jadi ajang untuk mencari makan semata. Bukan kegiatan untuk menolong pihak yang kurang berdaya dan tidak mampu. Selain itu pelaksana juga perlu memiliki keahlian untuk mengelola kegiatan pemberdayaan, tidak asal-asalan. Asal jalan dan asal berjalan, hasilnya terserah apa kata nanti.

Kelima, pendanaan. Pendanaan merupakan unsur vital dalam program pemberdayaan. Kegiatan yang dilakukan perlu biaya untuk membeli kebutuhan yang diperlukan. Selain itu biaya diperlukan juga untuk operasional kegiatan. Meski bukan segala-galanya, uang tetap diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan. Keberhasilan program pemberdayaan tidak semata-mata tergantung kepada besarnya jumlah dana. Bisa jadi dengan dana yang sedikit atau terbatas, bisa jadi program pemberdayaan menjadi lebih efektif. Sebaliknya bisa jadi dana yang besar malah membuat program tidak berhasil secara maksimal. Bahkan dari dana yang sedikit bisa menjadi banyak dengan swadaya dari penerima program pemberdayaan yang telah berhasil mandiri, atau dari perputaran para penerima yang disiplin dan bertanggung jawab dengan dana bergulir.

“Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.”

(Pearson et al, 1994)



BAB XVI

Teori Pengembangan Lembaga

Pengertian Teori Pengembangan Lembaga

Pengembangan lembaga (*institutional building*) merupakan salah satu teori yang dalam praktiknya bisa menjadi alternatif di dalam pelaksanaan pembangunan. Pengembangan lembaga bertumpu pada dua hal. *Pertama*, pembuatan institusi. Pemerintah perlu melakukan pembaharuan terhadap berbagai lembaga yang ada, baik lembaga negara, maupun lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Pada tataran lembaga negara, pemerintah perlu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sehingga tidak ada celah yang memungkinkan adanya kekosongan di dalam pengelolaan negara. Banyak lembaga negara yang dibuat oleh pemerintah setelah reformasi, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan politik. Misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan lain-lain. Di bidang ekonomi misalnya ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan Keuangan (LPSK). Lembaga terakhir ini dibuat oleh pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998, nasabah yang uangnya ada di bank, kebingungan harus mengadu kemana pada saat uang yang ada di bank tidak bisa ditarik. Sehingga dibuat lembaga yang menjadi dana nasabah yang menyimpan uangnya di bank yang ada.

Pada skala masyarakat (*community*) pemerintah juga banyak membuat lembaga (institusi) yang menjadi bagian pelaksanaan program pembangunan. Seperti pada era pemerintahan Susilo

Bambang Yudhoyono, dibuat kepengurusan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan dan Pedesaan. Lembaga ini terdiri dari masyarakat yang direkrut oleh pemerintah untuk menjalankan program pembangunan hingga level desa.

Kedua, penguatan institusi yang sudah ada. Institusi atau lembaga-lembaga yang sudah ada diperkuat keberadaan dan eksistensinya. Penguatan institusi/ lembaga bisa dengan cara memperluas cakupan dan wilayah kerjanya, maupun kewenangannya. Hal ini bisa berlaku pada lembaga negara, atau lembaga-lembaga yang ada di masyarakat yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat. Penguatan lembaga negara, seperti misalnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak hanya fokus pada wilayah pemberantasan korupsi, namun juga pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hal tersebut bila dilakukan dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi sejak dini, yang tentu saja dapat mencegah kerugian keuangan negara dari pelaku tindak pidana korupsi. Keberhasilan dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi, tidak otomatis dapat mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Contoh lain adalah, penguatan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai mitra pemerintah desa (Pemdes), namun sekaligus berfungsi sebagai kontrol terhadap pemerintah desa. BPD tidak terkesan menjadi stempel dari apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, namun menjadi penyeimbang (*check and balance*).

Penguatan lembaga yang ada di masyarakat bisa dilakukan dengan upaya membuat lembaga-lembaga yang sudah ada semakin efektif kinerjanya. Seperti keberadaan koperasi yang dalam sejarahnya, memiliki peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Koperasi bahkan disebut sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Namun keberadaannya pada beberapa dekade terakhir, kalah dengan peran industri, di dalam membangun perekonomian nasional. Sehingga keberadaan koperasi yang banyak tumbuh di tengah masyarakat perlu dikuatkan, dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan pemberian modal, serta fasilitasi bagi produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi, seperti *marketplace* dan lain-lain. Begitu pula dengan penguatan terhadap kelompok-kelompok mandiri yang ada di masyarakat, seperti karang taruna, kelompok pengajian, arisan dan lain-lain yang secara kultural, banyak tumbuh dan hadir di tengah masyarakat.

Begitu pula, pengembangan lembaga diharapkan dapat menggunakan sumber daya manusia secara efektif di dalam penggunaan dana yang tersedia baik yang berasal dari pemerintah maupun dari swadaya. Sehingga, keberadaan lembaga-lembaga yang ada, dapat berperan lebih maksimal di dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan di masyarakat.

Ahli Teori Pengembangan Lembaga

Abraham Maslow

Pengembangan lembaga erat kaitannya dengan motivasi. Motivasi orang-orang yang ada di dalam lembaga tersebut yang paling utama. Selain itu motivasi pihak di luar yang hendak ikut terlibat di dalam pengembangan lembaga, baik dalam bentuk pemberian informasi, masukan, evaluasi, kritik, dan saran. Motivasi yang mendorong sikap dan perilaku manusia. Setiap tindakan dan perilaku manusia didorong oleh motivasi tertentu. Semakin kuat motivasi, semakin kuat pula dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, saat motivasi lemah, maka dorongan untuk melakukan suatu tindakan juga semakin lemah.

Abraham Maslow dalam teori kebutuhannya menyebut bahwa kebutuhan menjadi motivasi yang mendorong perbuatan seseorang. Kebutuhan, terutama kebutuhan fisik, seperti makan, minum, tidur, dan berhubungan seks, menyita banyak waktu. Selain itu ada pula kebutuhan untuk kesehatan dan keselamatan (Dinata, 2020). Kebutuhan tersebut bersifat hirarkis, mulai dari kebutuhan fisik seperti makan, minum dan berpakaian. Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, baru kebutuhan untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Begitu seterusnya. Kebutuhan tersebut yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu.

Arthur Combs

Pengembangan lembaga juga berkaitan dengan pikiran manusia. Pikiran memandu perilaku manusia. Pikiran yang baik berkorelasi dengan sikap dan tindakan serta perilaku yang baik. Sebaliknya, pikiran yang buruk menuntun manusia berkata, bersikap, dan berperilaku buruk. Perlunya mengisi pikiran dengan hal-hal yang baik, sehingga dapat mengurangi pikiran buruk. Membiasakan diri untuk berpikir baik, secara otomatis juga berdampak pada pengurangan perilaku buruk. Mengisi pikiran dengan positif juga menjadi lebih penting.

Memahami pikiran orang, bila dilakukan dengan cara mengamati tindakan, dan perilakunya. Maka cara yang paling efektif untuk merubah perilaku orang adalah dengan merubah pikirannya. Membangun dan mengembangkan lembaga juga demikian, bisa dimulai dengan merubah pikiran orang-orang yang ada di dalam lembaga tersebut. Sehingga memiliki perspektif atau pola pikir maju, progresif dan positif. Dengan terlalu fokus pada persoalan, namun juga memiliki banyak pikiran untuk menemukan solusi.

Penerimaan dan penolakan untuk melakukan sesuatu dimulai dari pikiran. Hal tersebut dikemukakan oleh Combs. Menurut Combs, biasanya seseorang menolak melakukan apa yang harus dilakukan karena ada hal lain yang dalam pikirannya lebih menarik atau menguntungkan. Padahal dalam praktiknya, belum tentu lebih menarik dan lebih menguntungkan. Namun pilihan untuk melakukan sesuatu dan menolak melakukan hal lain karena pikiran menuntun ke hal yang lebih menarik dan lebih menguntungkan. Hal ini misalnya terjadi pada guru yang menyatakan bahwa siswanya tidak tertarik belajar, berarti siswa tersebut tidak tertarik untuk melakukan apa yang diinginkan gurunya (Rumini, 1993).

Aldous Huxley

Pengembangan lembaga berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan sejatinya diarahkan untuk membantu manusia mengembangkan potensinya. Pendidikan yang dapat mengembangkan potensi manusia adalah pendidikan holistik, yang mencakup seluruh aspek kemampuan manusia. Baik fisik, pikiran dan perasaan. Menurut Huxley dan Roberts (1975), pendidikan nonverbal adalah sesuatu yang harus diajarkan kepada siswa. Sebuah alternatif untuk pengaturan kelas tradisional. Pendidikan non verbal terdiri dari kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan materi pelajaran yang dipelajari, seperti senam, sepak bola, menyanyi, atau menari. Pendidikan nonverbal harus dimulai pada usia dini dan berlanjut sampai kompetensi tingkat tinggi diperoleh.

Pendidikan juga perlu mampu menumbuhkan kemampuan pada diri manusia untuk memahami tujuan hidup dengan benar. Selanjutnya, dengan pemahaman yang baik terhadap tujuan hidup, manusia dapat memiliki kebijakan hidup, daya cipta, dan kemampuan untuk bertahan melalui langkah-langkah bijak agar itu menjadi kenyataan. Setelah itu, maka manusia akan mudah memiliki keterampilan. Perpaduan antara

tujuan hidup dan keterampilan (*skill*) yang membuat manusia lebih siap untuk menghadapi pasang surut kehidupan (Syifaâ, 2008).

David Mills dan Stanley Scher

Pengembangan lembaga juga memiliki korelasi dengan faktor emosional manusia, atau semacam perasaan tertentu pada diri seseorang. Hal tersebut bisa terlihat dari orang-orang yang berada di dalam lembaga organisasi tertentu. Orang yang berada di dalam lembaga tertentu memiliki perasaan, keinginan dan obsesi terhadap sesuatu, apakah itu berkaitan dengan rencana kerja, program, obsesi dan cita-cita. Termasuk adanya perasaan kecewa terhadap sesuatu yang tidak tercapai, tidak terpenuhi secara baik. Bahkan pada level tertentu, manusia memiliki kecenderungan untuk sedih, dan marah.

Hal yang berkaitan dengan emosional menurut David Mills dan Stanley Scher, dapat diarahkan dengan pendidikan. Pendidikan tentu saja tidak dimaknai semata-mata sebagai pendidikan formal, namun juga nonformal. Pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan terpadu yang digambarkan sebagai strategi dengan memasukkan unsur perasaan atau sikap dalam proses belajar. Emosional dapat menjadi alat yang berguna untuk belajar. Selain itu, emosional juga berguna untuk mengembangkan mengaplikasikan kegiatan sehingga berjalan secara baik dan layak (Syifaâ, 2008).

Praktik Teori Pengembangan Lembaga

Pengembangan lembaga dalam praktiknya dapat berkembang dengan modal atau memanfaatkan sebesar-besarnya potensi manusia, organisasi sosial atau lembaga yang ada di masyarakat. Untuk selanjutnya hal tersebut didorong oleh rasa memiliki dan tanggung jawab yang besar pada lembaga yang ada. Sehingga, pengembangan lembaga dilakukan dengan mengefektifkan peran lembaga-lembaga yang ada, terutama yang telah ada di masyarakat. Misalnya, kelompok pengajian yang ada di masyarakat tidak hanya difungsikan untuk kegiatan keagamaan semata, namun dapat dikembangkan lagi dengan fungsi lain, misalnya fungsi agen perubahan sosial dalam skala yang lebih luas. Bisa dibuatkan kelompok relawan penyuluh di bidang kesehatan, terutama di bidang gizi anak-anak. Sehingga selain melakukan kegiatan keagamaan mereka juga menjalankan kegiatan sosial (Effendi, 1992).

Pengembangan lembaga bisa dilakukan dengan dua pendekatan, membuat lembaga yang benar-benar baru, dan mengaktifkan atau mengefektifkan lembaga yang telah ada.

Pertama, membuat lembaga baru. Institusi yang memiliki kewenangan untuk membuat lembaga, seperti pemerintah membuat lembaga baru. Lembaga baru yang dibuat oleh pemerintah bisa berfungsi sebagai:

1. Bagian dari rencana program pembangunan yang telah dirancang. Pada bagian ini, lembaga yang dibuat merupakan lembaga yang diproyeksikan untuk menambah pelayanan dan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu lembaga yang baru dibentuk oleh pemerintah, yang merupakan bagian dari rancangan pembangunan adalah lembaga PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan dan Pedesaan yang didirikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Lembaga ini terbentuk dari struktur di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan sampai desa. Lembaga ini diproyeksi untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayah perkotaan dan pedesaan.
2. Sebagai respon terhadap kondisi yang ada. Salah satu lembaga negara adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta penyelidikan di bidang keuangan. OJK didirikan pada tahun 2012 pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. OJK didirikan sebagai bentuk respon terhadap berbagai persoalan yang terjadi pada sektor keuangan dan perbankan di Indonesia. Sebelumnya, persoalan keuangan dan perbankan ditangani oleh Bank Indonesia. Namun sejak OJK berdiri, persoalan yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan ditangani oleh OJK yang memang secara khusus memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap lembaga keuangan dan perbankan.

Kedua, mengefektifkan lembaga yang telah ada. Pengembangan lembaga, tidak harus membangun atau membuat lembaga baru, namun bisa pula dengan jalan mengefektifkan dan mengaktifkan lembaga yang sudah ada.

1. Mengaktifkan lembaga yang sudah ada. Banyak sekali lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, yang telah dibentuk oleh masyarakat. Misalnya koperasi, kelompok pengajian, kelompok tani, kelompok nelayan dan

lain sebagainya. Namun tidak sedikit dari lembaga-lembaga yang dibentuk tersebut hanya berjalan pada saat awal pendirian. Untuk selanjutnya tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Berbagai persoalan terjadi, baik pada sisi internal, maupun karena persoalan eksternal. Lembaga tersebut kemudian vakum, tidak ada kegiatan, meski namanya tetap ada. Hal tersebut tentu saja, menyebabkan tidak berjalannya tujuan lembaga tersebut untuk memberi manfaat bagi pengurus, anggota dan masyarakat sekitar. Lembaga dalam kondisi tersebut sebaiknya diaktifkan kembali, bila hendak melakukan kegiatan sejenis dengan lembaga tersebut. Salah satu kelebihanannya tentu saja sudah punya nama, sehingga lebih oleh masyarakat sekitar.

2. Mengefektifkan lembaga yang sudah ada. Seperti telah dibahas sebelumnya, lembaga yang ada di masyarakat banyak sekali macam, ragam, jenis, dan bentuknya. Ada yang bersifat, kekeluargaan, ada yang bersifat sosial, ada yang hanya sekedar tempat berkumpul untuk kegyuban semata-mata, dan lain sebagainya. Di antara lembaga tersebut banyak pula yang memiliki orientasi untuk memberi manfaat bagi kemajuan masyarakat sekitar. Namun karena proses pendiriannya lebih pada kegyuban dan kesepakatan, maka dalam perjalanannya, lebih menjaga keharmonisan di dalam lembaga, sehingga seringkali mengabaikan tujuan dibentuknya lembaga tersebut. Terhadap lembaga dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya untuk mengefektifkan lagi, sehingga tujuan dan cita-cita untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar, tanpa harus mengorbankan harmonisasi di dalam lembaga. Peran pemerintah sangat besar di dalam hal tersebut. Terlebih bagi lembaga yang memiliki ketergantungan pendanaan kepada pemerintah. Di antaranya adalah lembaga-lembaga pendidikan yang menerima dana bantuan dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran di dalam mengembangkan lembaga pendidikan, sehingga berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu manfaat bagi masyarakat luas akan lebih dirasakan lagi.



Penutup

Ada banyak teori ekonomi politik dan pembangunan yang digagas oleh pemikir Eropa, Amerika dan lainnya yang telah dipraktikkan di Indonesia, mulai sejak Soekarno, Soeharto dan seterusnya memimpin Indonesia. Ada teori yang memiliki relevansi pada praktik ekonomi politik dan pembangunan di Indonesia. Teori-teori tersebut, tidak selamanya cocok (*compatible*) untuk masyarakat Indonesia, namun tidak seluruhnya juga tidak cocok (*incompatible*). Ada banyak yang perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Hal ini diketahui seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang masih belum mendekatkan antara cita-cita dan realita kehidupan berbangsa dan bernegara. Jurang kemiskinan masih menganga lebar, namun pada sisi lain ada banyak orang kaya baru tumbuh.

Dalam perkembangannya, banyak ahli di dalam ekonomi politik dan pembangunan yang mulai mengemukakan gagasan ekonomi dan pembangunan yang merupakan kekhasan dari ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Didin Damanhuri, salah seorang guru besar di Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dikenal dengan ide-idenya mengenai Nusantaranomics. Yaitu pemikiran yang mengarah kepada teori ekonomi dan pembangunan berbasis pada kekuatan dan potensi lokal, khas Indonesia. Gagasan ini merupakan bagian dari kekayaan pemikiran mengenai ekonomi dan pembangunan yang perlu digali lebih dalam. Tentu saja dengan harapan bisa menjadi alternatif dari teori ekonomi dan pembangunan yang selama ini didominasi dari pemikiran Eropa dan Amerika. Dalam praktiknya, teori ekonomi, ekonomi dan pembangunan yang digagas oleh para pemikir dari Eropa dan Amerika, tidak bisa menjawab persoalan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.



Daftar Pustaka

- Abercrombie, N, Hill, S, & Turner, B (1994). *The Penguin Dictionary of Sociology*. London: Penguin Group.
- Abdulsyani (2012) *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustina, L (2009). *Pengaruh Konflik Peran, Ketidaktelesan Peran, dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor*. Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 1. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Ahmadi, A (2004). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmadi, Abu & Supriyanto (2004). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar, Prabu Mangkunegara (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cetakan Ke 2. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al-Mawardi (1994). *al-H{aw{ al- Kab{r*. Beirut: D{ar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Arjawa, S (2014). *Pilihan Rasional di Balik Pembebasan Corby*. Jurnal Global & Strategis, Tahun 8. Nomor 1. Bali: Universitas Udayana.
- Arimbi (1993). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: WALHI.
- Aspinall, Edward & Berenschot, Ward, (2019). *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Astuti, Prida Ariani Ambar, dkk (2011). *Remaja Digital: Learn, Play, Socialize, Participate*. Surakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Azka, Ainun. 2007. *Pesan-Pesan Dakwah Dalam Novel Tembang Lara karya Pipiet Senja*, Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.

- Bahri, Mossadeq (1998). *Modal Asing dan Ketergantungan Studi Awal terhadap PMA Jepang di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Bauer, J (2003) *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States, Dissertation*. Clermont: University of Cincinnati.
- Basrowi (2005). *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghia Indonesia.
- Berger, P & Luckmann, T (1966). *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Inggris: Penguin.
- Berry, David (1983). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Bernstein, Nunnally, (1994). *Psychometric Theory*, Edisi ke 3. New York: McGraw Hill.
- Biddle, B. B., & Thomas, E. J, (1966). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: Wiley.
- Buchanan, James (1989). *Essays on Political Economy*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Budiardjo, M (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B (2006). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Butler, Eamonn (2012) *Public Choice A Primer*. The Institute of Economic Affairs: 2 Lord North Street Westminster London SW1P 3LB.
- Bryant, Nelson & White (1982). *Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang (Edisi Terjemahan)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Carter, C. R. & Rogers, D. S (2008). *A Framework of Sustainable Supply Chain Management: Moving Toward New Theory*. *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, Vol. 38: 360-387.
- Caporaso, J & Levine, D (1992). *Theories of Political Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cook, Karen and Rice, Eric (2003). *Handbook of Social Psychology*, (edited by John Delamater). New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishers.

- Cohen, B (1992). *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Coleman, James (2009). *Dasar-dasar Teori Sosial (Foundation of Social Theory)*.
- Dermawan, Andy (2013). Dialektika Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 8, No. 1.
- Deviyanti, D (2013). *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah*. *EJournal Administrasi Negara*. Volume 1. Nomor 2. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Deliarnov (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Dinata, F. R. (2020). Pembelajaran Humanistik Dalam Mendorong Pengembangan Afeksi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 48–57.
- Downs, Anthony (1957). *Economic Theory of Democracy*. New York.
- Easton, David (1988). *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. (Terjemahan Sahat Simamora). Jakarta: Bina Aksara.
- Effendi, T. N. (1992). Sumber Daya Manusia Di Indonesia; Analisis Data Sensus. *Population and Environment*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jp.10808>
- Eriyanto (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Fachruddin, Andi (2015). *Cara Kreatif Memproduksi Program Televisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Fakih, Mansour (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frank, Andre Gunder (1984). *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*. Jakarta: Pustaka Pulsar.
- Ferguson, T (1995). *Golden Rule: The Investment Theory of Party Competition and the Logic of Money-Driven Political System*. London: The University of Chicago Press.
- Fernanda, dkk, (2012). Hubungan Antara Kemampuan Berinteraksi Sosial Dengan Hasil Belajar. *Jurnal Ilmiah Konseling*; Vol. 1 , No. 1.

- Formaini, Robert (2003) *James M. Buchanan The Creation of Public Choice Theory*. Economic Insights Federal Reserve Bank of Dallas, Volume 8, Number 2, p. 2-4.
- Gaventa, J (2006). "Finding the Spaces for Change: A Power Analysis," *IDS Bulletin* Volume 37 Number 6 November 2006, hal. 23-25.
- Gramsci, Antonio (1971). *Selection from the Prison Notebooks*. New York: International Publisher.
- Giddens, Anthony (2003). *The Constitution of Society, Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*, Pasuruan: Pedati.
- Gill, Stephen (1995). "Globalization, Market Civilisation, and Disciplinary Neoliberalism," *Millennium: Journal of International Studies*, 24, p. 3.
- Ginintasi, R (2012). *Interaksi Sosial*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Gerungan, W (2004). *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Gultom (1985). *Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan*. Salatiga: UKSW.
- Habib, A (2004). *Konflik Antaretnik di Pedesaan Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*. Yogyakarta: LKiS.
- Habermas, Jürgen (2007). *Moral Consciousness and Communicative Action*, (diterjemahkan oleh Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen). Cambridge: Polity press.
- Halim, A (2014). *Politik Lokal: Pola Aktor & Alur Gramatikalnya, Perspektif Teori Powercube, Model dan Panggung*. Yogyakarta: Lembaga
- Harold & Domar (1947). *Essays in the Theory of Economic Growth*. *The American Economic Review*. Vol. 37.No.1.
- Hardjosoemantri (1993). *Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Horoepoetri, dkk (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: WALHI.
- Harmes, Adam (2006). *Neoliberalism and Multilevel Governance*. London: Routledge Publisher.

- Haryanto, S (2012). *Spektrum Teori Sosial*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Hatu, R. (2010). Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis). *Jurnal Inovasi*, 7(04).
- Hedstrom, Peter & Stern, Charlotta, (2008). "Rational Choice and Sociology". *Journal the New Palgrave Dictionary of Economics*. (Second Edition,).
- Hermansyah (2015). *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung*. Ejournal Pemerintahan Integratif. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Horton, Paul B, & Chester L. Hunt (1993). *Sosiologi*, (Jilid I Edisi Keenam), (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hoselitz, Bert (1988). *Panduan Dasar Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Rajawali.
- Hutabarat, Romelin (2016). *Hubungan Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Geografi Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Tarutung Tahun Pelajaran 2015/ 2016*. Skripsi. Medan: Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.
- Ife, J. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision. Analysis and Practice*. Longman.
- Inkeles, Alex & Smith, David. H (1974). *Becoming Modern, Individual Change in Six Development Countries*. Massachusetts: Harvard University Press Cambridge.
- Irmawati, I., Salim, A., & Rahman Fitra, T. (2021). *Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pendidikan Terhadap Komunitas Adat Terpencil Studi Kasus Suku Anak Dalam Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)*. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/7965>
- Isbandi, R (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Jalal, F & Supriadi, D (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: Depdiknas Bappenas Adicitakaryanus.
- Johson, P (1986). *Contemporary Sociological Theory An-Integrated Multi-Level Approach*. New York: Springer.

- Johnson, D (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kanfer, R (1987). Task-Specific Motivation: An Integrative Approach to Issues of Measurement, Mechanisms, Processes, and Determinants. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 5, 237-264.
- Karimi, A (2012). *Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan*. Gresik: Muhi Press.
- Kadji, Y (2012). "Tentang Teori Motivasi," *Jurnal Inovasi* Vol. 9, No. 1 hal. 3-7.
- Kranenburg dan Sabaruddin (1980). *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Laily, E (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 3, Nomor 2. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Lindner, J (1998). "Understanding Employee Motivation," *Journal of Extension*, Vol. 36, No. 3, hal. 1.
- McClelland, D. (1965). Need Achievement and Entrepreneurship: A Longitudinal Study. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1, 389-392.
- Marsh, David & Stoker, Gery (2017). *Teori dan metode dalam ilmu politik* (penerjemah Helmi Mahadi) Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Mansbridge, Jane (1980). *Beyond Adversary Democracy*. New York, NY: Basic Books
- Mighfar, S. (2015). Social Exchange Theory: Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 9 (2), 259-282. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.98>
- Miraningsih, W (2013). Hubungan Antara Interaksi Sosial dan Konsep Diri Dengan Perilaku Reproduksi Sehat Pada Siswa Kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri Purworejo. Skripsi (tidak diterbitkan). FIP BK Unnes Semarang.
- Mikkelsen, Britha (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Merkl, P (1967). *Continuity and Change*. New York: Harper and Row.

- Moore, Wilbert (1967). *Order and Change: Essays in Comparative Sociology*. New York.
- Morison, J. (2004). e-democracy: on-line civic space and the renewal of democracy? *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*. <https://doi.org/10.1017/s0841820900003842>
- Mubarak, Z. (2010). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. Tesis. *Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota*.
- Narwoko, D (2007). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Noor, F (2007). “Demokrasi Mati Suri” *Jurnal Penelitian Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Vol. 4, p. 1.
- Nuhung, Andi, Iskandar (2014). *Strategi dan Kebijakan Pertanian dalam Perspektif Daya Saing*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Partan, P & Al-Barry, M (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Partowisastro, H. (1983). *Psikologi Sosiologi*. Jakarta : Erlangga.
- Poloma, M (1984). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV Rajawali.
- Poerwadarminta, W (1991). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Philipus dan Aini, Nurul (2004). *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purwanto, E (2012). “Model Motivasi Trisula: Sintesis Baru Teori Motivasi Berprestasi,” *Jurnal Psikologi*, Vol. 41, No. 2, hal. 220.
- Raho. B (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Risnawati (2016). *Peran Ganda Istri yang Bekerja dalam Membantu Ekonomi Keluarga Buruh Perkebunan Kelapa Sawit pada PT Bumi Mas Agro di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur*. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Ritzer, George (2012). *Teori Sosiologi Modern Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ritzer, & Goodman (2011). *Teori Sosiologi, Edisi Terbaru*. Bantul: Kreasi.

- Robbins, S (2003). *Perilaku Organisasi, Jilid I*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Robbins S & Judge T (2015). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Journal TAPIs*.
- Rostow, W. W. (1960). *The Process of Economic Growth*. England: Oxford Clarendon Press.
- Rusdiyanta dan Syarbaini, Syahrial (2009). *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rumini, S. dkk. (1993). *Psikologi Pendidikan*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sarbin, T.R. & Allen, V.L (1968). *Role Theory, Handbook of Social Psychology*. Vol I. Massachusetts. Addison Wesley Publisher co.
- Samekto, A. (2005). *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*. Citra Aditya Bakti Santos,
- Theotonio Dos (1970). *The Structure of Dependence*. American Economic Review. Vol. 60.
- Saifudin, Abdul Bari. 2001. *Buku Acuan Nasional, Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka-
- Sarwono Prawirohardjo. Sarwono, S (2002). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sarwono, Sarlito W. & Eko A. Meinarno. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Sadhana, K (2017). "*Handbook Kajian Realitas Sosial*". Malang: Universitas Merdeka.
- Sastropoetro, Santoso. (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Siagian, S (1995). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Shilling, Chris & Philip A. Mellor (2001). *The Sociological Ambition*. London: Sage Publications Ltd.

- Sholahudin, Umar (2020). *Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Sejarah, Asumsi, dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial*. *Jurnal Urban Sociology*. Vol. 3 No. 2.
- Staniland, Martin (1985). *What is Political Economy?* New Heaver: Yale University Press.
- Sugiyah. (2001). *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*. Tesis. PPs - UNY.
- Surbakti, Ramlan (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Syifaâ, R. (2008). Psikologi humanistik dan aplikasinya dalam pendidikan. *El Tarbawi*, 1(1), 99–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol1.iss1.art8>
- Syahri, M (2014). *Teori Pertukaran Sosial George C. Homans dan Peter M. Blau*. Surabaya: Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Syarif, M. (2013). Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam. *Media Akademika*, 3(28), 33–362.
- Soekanto, S (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.
- Suhelmi, A. (2001). *Pemikiran politik barat : kajian sejarah perkembangan pemikiran negara, masyarakat dan kekuasaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sumaryadi, I (2010). *Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Sumodiningrat, G. (2002). *Memberdayakan Masyarakat Perencana*. Kencana Nusadwipa.
- Sulila, I. (2016). Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas manajemen dan mutu produk pada kelompok kerajinan Karawo di Desa Bongo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(22), 96–102.

- Stokes, J. et al, (2013). *Development of a Questionnaire to Assess the Impact of Chronic Low Back Pain for Use in Regulated Clinical Trials*. Springer International Publishing Switzerland, 6 (4) , pp. 291–305.
- Suyanto, B & Amal, K (2010). *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*.
- Sztompka, P (2014). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tangkilisan, H (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Taneko, S (1986). *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Fajar Agung.
- Tilaar, H (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudi, Bambang (2012). *Manajemen sumber Daya Manusia*. Bandung: Sulita.
- Wardana, Data & Geovani Meiwanda (2017). *Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih dan Bermartabat*. *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vo. III, No. I.
- Warjio (2016). *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Jakarta: Prenada Media.
- Wirawan, I (2014). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- West, Richard & Turner, Lynn (2007), *Introduction Communication Theory: Analysis and Application*, 3rd Edition, McGraw-Hill.
- Yorks, L (2004). *A Radical Approach to Job Enrichment*. New York: Amacom
- Yustiningrum, R (2007). *Demokrasi Mati Suri*. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 4, No. 1, hal. 53.
- Zakariya, A. F. (2018). *Pengorganisasian masyarakat hutan melalui sistem agroforestri menuju kampung iklim di Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek*. *Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. Pustaka Kencana Prenada Media Group.



Glosarium

- Afeksi : Rasa kasih sayang
- Alloplastis : Mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dirinya
- Autoplastis : Penyesuaian diri sesuai dengan lingkungan
- Behaviorisme : Filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku
- Dialektika : Hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah
- Dinamis : Penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya
- Eksistensi : Hal berada; Keberadaan
- Eksperimental : Berhubungan dengan percobaan
- Elektoral : Pemilihan atau yang berkaitan dengan pemilih
- Elitis : Terpilih, terpendang; berhubungan dengan kelompok elite dalam masyarakat
- Fenomenal : Dapat disaksikan dengan pancaindra; luar biasa; hebat
- Fungsionalisme : Teori yang menekankan bahwa unsur-unsur di dalam suatu masyarakat atau kebudayaan itu saling bergantung dan menjadi kesatuan yang berfungsi; doktrin atau ajaran yang menekankan manfaat kepraktisan atau hubungan fungsional
- Implementasi : Pelaksanaan atau pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan
- Intensionalitas : Kemampuan kesadaran untuk menunjukkan sesuatu yang tidak seperti dirinya sendiri atau yang tidak seperti kegiatannya sendiri

Interpretif	: Sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi
Komparatif	: Berkenaan atau berdasarkan perbandingan
Konkret	: Nyata; benar-benar ada
Konstitusional	: Bersangkutan dengan, sesuai dengan, atau diatur oleh konstitusi suatu negara
Konvergensi	: Keadaan menuju satu titik pertemuan atau memusat
Kriminolog	: Orang yang ahli tentang tindakan kriminal
Literal	: Berdasarkan arti yang paling dasar atau harfiah
Nirlaba	: Bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan
Nominalisme	: Aliran filsafat yang mengajarkan bahwa pengertian umum tidak mencerminkan aspek umum dan aspek yang mempunyai kesamaan tentang eksistensi suatu benda
Oposisi	: Partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa
Partikular	: Bersifat mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum
Popularitas	: Perihal populer; Kepopuleran
Pragmatisme	: Kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham, doktrin, gagasan, pernyataan, ucapan, dan sebagainya), bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia
Pranata	: Sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi seperti adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat
Preferensi	: Hak untuk didahulukan dan diutamakan daripada yang lain; Prioritas
Rekonsiliasi	: Perbuatan memulihkan hubungan ke keadaan semula atau menyelesaikan perbedaan
Teologi	: Pengetahuan ketuhanan
Teoritikus	: Ahli pikir atau filosof

- Totalitarianisme : Sistem pemerintahan yang tidak memberikan kebebasan individu dan mengontrol seluruh aspek kehidupan individu
- Utilitarianisme : Keyakinan bahwa nilai dari suatu hal atau tindakan ditentukan oleh utilitas atau manfaat
- Variabel : Sesuatu yang dapat berubah; Faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan



Indeks

A

Abdul Halim, 72, 171
Abdulsyani, 31, 155, 168
Abercrombie, 167
Abraham H. Maslow, 149, 173
Adam Smith, 87, 172
Agustina, 113, 155, 175
Ahmadi, 31, 103, 155, 168
Aldous Huxley, 150, 177
Alex Inkeles, 123, 176
Al-Mawardi, 74, 155, 171
Alvin Bertrand, 111, 116, 175
Amerika Serikat, 124, 176, 187
Andrew Heywood, 73, 171
Anthony Downs, 44, 51, 89, 169, 170
Anthony Giddens, 68, 170
Antoine de Montcheitien, 87, 172
Antonio Gramsci, 129, 176
Anwar, 29, 155, 168
Arimbi, 100, 155, 174
Aristoteles, 71, 170
Arjawa, 51, 155, 170
Arthur Combs, 150, 177
Astuti, 108, 155, 175
Azka, 65, 155, 170

B

Bagong, 167
Bahri, 128, 155, 176

Basrah, 74, 171
Basrowi, 29, 30, 156, 168
Bauer, 111, 156, 175
Berry, 110, 156, 175
Bert F. Hoselitz, 123, 176
Bimo Walgito, 31, 168
Bryant, 102, 156, 174
Burhan Bungin, 31, 168
Butler, 167

C

Caporaso, 167, 172
Carl Rogers, 149, 150, 177
Carter & Rogers, 130, 176
Charles Lindblom, 87, 172
Charles Loomis, 36, 169
Coady International Institute, 80, 172
Cohen, 106, 107, 110, 116, 157, 175
Cohen dan Uphoff, 106, 107, 175
Cook & Rice, 167

D

David Easton, 72, 171
David McClelland, 94, 122, 173
David Mills, 151, 177
David Ricardo, 87, 172
David Smith, 123, 176
Dedi Supriadi, 100, 174
Deliarnov, 87, 88, 157, 172

Dermawan, 137, 157, 177
Deviyanti, 106, 157, 175
Dinata, 149, 157, 177
Dougherty & Pritchard, 111, 175
Durkheim, 37, 169

E

Edward Aspinall, 168
Effendi, 153, 157, 178
Eriyanto, 58, 157, 170
Eropa, 122, 124, 154, 176
Erving Goffman, 67, 118, 170
Evsey Domar, 122, 176

F

Fachruddin, 60, 157, 170
Fakih, 128, 157, 176
Fasli Djalal, 100, 174
Fernanda, 34, 158, 169
Fitra, 142, 160, 177
Formaini, 167
Frank, 127, 128, 158, 176
Frankfurt, 133, 134, 135, 136, 137,
157, 164, 177

G

Gary Yukl, 76, 171
George Homans, 167
George Simmel, 36, 37, 169
Gerungan, 30, 33, 158, 168
Gilin and Gilin, 34, 169
Ginintasaki, 29, 158, 168
Glen Elder, 110, 119, 175
Goodman, 168
Gordon Tullock, 88, 172
Gultom, 102, 103, 158, 174

H

Halim, 72, 79, 159, 171
Hall, 38, 169
Hans Albert, 137, 177
Hans Morgenthau, 73, 171
Hardjasoemantri, 101, 159, 174
Hariyanto, 167
Harold Laswell, 73, 75, 171
Hasbullah, 141, 177
Hasibuan, 97, 159, 173
Hatu, 144, 159, 177
Hechter dan Kanazawa, 49, 169
Hedstrom & Charlotta, 169
Herbert Blumer, 38, 169
Herbert Marcuse, 133, 176
Hermansyah, 112, 159, 175
Herzberg, 92, 173
Hessel, 105, 174
Holil, 106, 174
Hoogerwerf, 73, 171
Horton, 112, 159, 175
Huber, 42, 169
Hutabarat, 97, 160, 173

I

Indonesia, 1, 2, 4, 108, 124, 125,
148, 154, 155, 156, 157, 158,
162, 165, 166, 177, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 195, 196, 197
Inggris, 12, 74, 80, 100, 156, 171
Institut Pertanian Bogor (IPB), 154,
178
Institut Studi Pembangunan dan
Direktur, 80, 172
Institute of Development Studies
(IDS), 80, 172

Irak, 74, 171
Irmawati, 142, 160, 177
Isbandi, 106, 160, 174

J

James Buchanan, 167, 172
James Coleman, 49, 51, 169
James R. Lindner, 93, 173
Jerman, 122, 134, 137, 177
Jim Ife, 142, 177
Jnanabrota Bhattacharyya, 101, 174
John Scott, 170
John Gaventa, 79, 80, 171
John Locke, 74, 171
John Stuart Mill, 167, 172
Johnson, 167, 169
Jürgen Habermas, 133, 135, 137, 139, 176

K

Kadji, 94, 161, 173
Kahn, 117, 175
Kanada, 80, 172
Kanfer, 112, 160, 175
Karimi, 71, 161, 170
Karl Marx, 137, 177
Karl Popper, 137, 177
Keith Davis, 101, 174
Kenneth Arrow, 88, 172
Kimball Young, 32, 169
Klaas Beniers, 97, 173
Korten, 101, 174
Kranenburg dan Sabaruddin, 74, 161, 171
Kridawati Sadhana, 59, 170

L

Laily, 100, 161, 174
Levine, 167, 172

M

Maliki, 68, 170
Mansbridge, 42, 161, 169
Marsh & Stocker, 169
Martin Staniland, 167
Max Horkheimer, 133, 134, 176
Max Weber, 122, 169
Meece, 94, 173
Meinarno, 30, 164, 168
Michael Pink, 138, 177
Mighfar, 167
Mikkelsen, 103, 161, 174
Miraningsih, 37, 161, 169
Miriam Budiarjo, 72, 171
Mohammad Hidayaturrahman, 1, 2, 41, 78, 86, 91, 120, 171, 183, 197
Mubyarto, 100, 173

N

Narwoko, 36, 67, 162, 169
Nasrullah, 67, 170
Nelson, 102, 105, 156, 174
Nicholl, 94, 173
Nikita Khrushchev, 168
Noor, 73, 75, 162, 171
Nuhung, 127, 162, 176

O

Oslon, 88, 172

P

Partan & Al-Barry, 100, 173

Partowisastro, 29, 162, 168
Perancis, 87, 172
Peter Blau, 167
Peter Burke, 68, 170
Peter Merkl, 72, 170
Philipus dan Aini, 88, 162, 172
Pintrich, 94, 173
Piotr Sztompka, 56, 170
Pip Jones, 68, 170
Poerwadarminta, 101, 162, 174
Poloma, 168, 170
Pramudibyanto, 76, 171
Prof. Didin Damanhuri, 154, 178
Purwanto, 94, 162, 173

R

Rahayu Ginintasasi, 29, 168
Raho, 168
Raul Prebisch, 128, 176
Risnawati, 111, 117, 119, 163, 175
Ritzer, 167, 168
Robbins & Judge, 92, 172
Robbins dan Judge, 114, 175
Robert Dahl, 87, 172
Robert Dur, 97, 173
Robert Linton, 110, 116, 117, 175
Robert Malthus, 87, 172
Rosana, 121, 163, 176
Roy Harrod, 122, 176
Rudiyanta & Syarbaini, 32, 169
Rumini, 149, 150, 163, 177

S

Saifuddin, 167
Salim, 142, 160, 177
Samekto, 133, 163, 176
Sarbin & Allen, 113, 175

Sarwono, 30, 116, 163, 164, 168
Sastropoetro, 102, 105, 107, 164,
174
Schunk, 94, 173
Scott, 50, 111, 175
Shaw & Costanzo, 117, 175
Shilling & Mellor, 48, 169
Sholahudin, 137, 164, 177
Skinner, 14, 92, 173
Soerjono Soekanto, 31, 32, 110,
168
Sondang Siagian, 92, 173
Staniland, 167
Stanley Scher, 151, 177
Stephen Robbins, 93, 173
Steven Lukes, 80, 171
StFX University, 80, 172
Stokes, 168
Sugiyah, 104, 164, 174
Suharto, 142, 165, 177
Suhelmi, 132, 165, 176
Sumaryadi, 100, 165, 173
Supriyanto, 103, 155, 174
Surbakti, 71, 164, 170
Susilo Bambang Yudhoyono, 147,
177
Suyanto & Amal, 68, 118, 170
Swift, 141, 177
Syahri, 167
Syifaâ, 151, 164, 177

T

Talcott Parson, 71, 170
Taneko, 111, 116, 165, 175
Tangkilisan, 105, 165, 174
Theodor W. Adorno, 133, 176
Theotonio Dos Santos, 128, 131,
176

Thomas, 39, 60, 90, 113, 156, 169,
170, 172, 175
Tilaar, 101, 166, 174
Tindjafe, 141, 177

U

Umar bin Khattab, 70, 170
Uni Soviet, 168
Universitas Sussex, 80, 171

V

Vroom, 92, 173

W

Wahyudi, 96, 166, 173
Walt Whitman Rostow, 123, 176
Walter Benjamin, 134, 177

Ward Berenschot, 168
Wardana & Meiwanda, 128, 176
Warijo, 171
West & Turner, 168
White, 102, 156, 174
Wilbert E. Moore, 126, 176
William Riker, 88, 172
Wirawan, 167
Wisseman, 141, 177

Y

Yorks, 92, 166, 173
Yustiningrum, 73, 166, 171

Z

Zakaria, 143, 177
Zubaedi, 143, 144, 166, 177



Riwayat Penulis 1

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Dr. Mohammad Hidayatullah, M.I.Kom
Tempat/ tgl lahir : Sumenep, 15 Januari 1977
Alamat : Sumenep, Jawa Timur
Telepon & WA : 0823 3292 0307
Email : hidayatullah@wiraraja.ac.id
Website : www.mohammadhidayatullah.com

PENDIDIKAN

1. S3 Ilmu Sosial (Politik dan Pembangunan) Universitas Merdeka Malang, lulus 2020.
2. Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, lulus tahun 2012.
3. Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Aqidah, Jakarta, lulus tahun 2002.

PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Dosen FISIP Universitas Wiraraja Sumenep, Maret 2015-sekarang. (Mata kuliah yang diampu; Ekonomi Politik Pembangunan; Teori dan Isu Pembangunan; Administrasi Pembangunan; Politik Lokal).
2. Kontributor Metro TV wilayah Madura, Mei 2011-sekarang.
3. Produser televisi lokal Madura Channel, Maret 2008-Maret 2011.

PUBLIKASI JURNAL

1. "Clientelism Politics of Muslim Politician Who Became People's Representatives." Diterbitkan oleh Jurnal International Journal Ihya' 'Ulum al-Din, Vol. 23, No. 2, Desember 2021.
2. "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Desa Melalui Optimalisasi Pengelolaan Bumdes Budidaya Lele di Desa Patean Kecamatan

Batuan.” Diterbitkan oleh Jurnal Abdimas Indonesia, Volume 1 No. 2, Agustus 2021.

3. “Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Raas Melalui Pendampingan Standarisasi Produk dan Kemasan.” Terbit di Jurnal Abdiraja, Volume 4 No. 1, Maret 2021.
4. “Integrating Science and Religion at Malaysian and Indonesian Higher Education.” Terbit di Jurnal Al-Ta’lim, Volume 28, No. 1, 2021, (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
5. “Religious Behavior of Indonesian Muslims as Responses to the Covid-19 Pandemic.” Terbit di Jurnal Al Adabiya, Volume 16, No. 1, Juni 2021, (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
6. “Government Response and Community Participation Overcoming Outbreak and Managing Its Impact Covid-19.” Terbit di Jurnal Ijtima'iyya, Volume 13, No. 2, Desember 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
7. “The roles of technology in al-Quran exegesis in Indonesia.” Terbit di Technology and Society, Volume 63, November 2020, (Sciencedirect, terindeks Internasional, Scopus Q1).
8. “Political investors: Political elite oligarchy and mastery of regional resources in Indonesia.” Terbit di Asian Journal of Comparative Politics, Volume Mei 2020 (terindeks Internasional, Scopus Q2).
9. “Relation of Religion, Economy and Politics: Islamization of Malay Community through Trade and Kingdom.” Terbit di Jurnal Al-Tahrir, Volume 20, No. 2, Juni 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
10. “Why Development Failed? Facts and Analysis of Development Failure in Sumenep.” Terbit di Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 18, Nomor 1, Juni 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
11. “Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep.” Terbit di Jurnal Sospol, Volume 6, Nomor 1, April 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
12. “COVID-19: Public support to handle economic challenges.” Terbit di Jurnal Inovasi Ekonomi, Volume 5, No. 2, Maret 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
13. “The Role of Technology and Social Media in Spreading the Qur’an and Hadiths by Mubalig.” Terbit di Jurnal DINIKA, Volume 4, No. 1, Tahun 2019 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
14. “Kiai and Political Relations Reconciling Politics And Religion in Indonesia.” Terbit di Jurnal Tahrir IAIN Ponorogo, Volume 18, No. 2,

- November 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
15. "Analisis Curse Theory Pada Sumber Daya Alam Migas Bagi Warga Madura." Terbit di Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. Volume 14, No. 1, tahun 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
 16. "Integration of Islam and Local Culture:Tandhe' in Madura." Terbit di Jurnal Miqot, UIN Sumatera Utara, Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
 17. "Corporate Social Responsibility Strategi Komunikasi Perusahaan Migas." Terbit di Jurnal Nomosleca Volume 3, No. 2, Oktober 2017 (terakreditasi Nasional).

PUBLIKASI PROSIDING

1. "The Successes and Failures of Three Democracies in Resolving Covid-19 Indonesia, The United States of America, and South Korea," Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV) Universitas Sumatera Utara, 14-15 Oktober 2021.
2. "The Strategies of Religious Leaders to Become Regional Heads in Indonesia," Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia.
3. "The Role of Local People in Improving Education of the Archipelago and Remote Communities of Indonesia." Terbit di Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Atlantis Press, Volume 267, Desember 2018 (terindeks Internasional, Thomson Reuters).
4. "Spice Route and Islamization on the West Coast of Sumatra in 17th-18th Century." Terbit di Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 302, Januari 2019, Atlantis Press (terindeks Internasional Thomson Reuters).
5. "Empowerment Salt Farmers to Alleviate Poverty." International Conferences Sdgs 2030 Challenges And Solutions, Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, Agustus 2017, (terakreditasi Nasional).

PUBLIKASI BUKU

1. Mengapa Madura Mengalahkan Jokowi? Diterbitkan oleh Edulitera, Malang, April 2022.
2. Dasar-Dasar Teori dan Isu Pembangunan. Diterbitkan oleh Unitomo Press, Januari 2022.

3. Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep Model Hexa Helix. Diterbitkan oleh Edulitera, Malang, Desember 2021.
4. Negara Demokrasi Menghadapi Covid-19: Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan, diterbitkan oleh Edulitera Malang, September 2021.
5. Pengantar Ekonomi Politik Pembangunan, diterbitkan oleh Unitomo Press, Surabaya, September 2021
6. Perilaku Voters pada Masyarakat Multikultural, diterbitkan oleh Edulitera, Malang, 2021.
7. Kutukan Demokrasi, diterbitkan oleh Edulitera Malang, 2021.
8. Investor Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Studi Pembangunan (LKSP) Jakarta, 2020.
9. "Participation in building human resources: Independent strategies for facing demographic expansion in remote island." Terbit di CRC Press Taylor & Francis Group, Nopember 2020. (terindeks Internasional Scopus).
10. Teori Sosial Empirik yang Sering Digunakan Untuk Penelitian Ilmiah; Skripsi, Tesis dan Disertasi. Diterbitkan oleh Edulitera, Malang, 2019.
11. Teori Sosial dan Pertentangannya. Diterbitkan oleh Universitas Wiraraja Press, 2018.
12. Media dan Pelayanan Publik. Diterbitkan oleh LSPP Jakarta, 2014.

PUBLIKASI DI MEDIA

1. "Kerikil Sepatu Kekuasaan," Terbit di www.bermedia.id, 12 April 2021.
2. "Responses by Islamic Mass Organizations and Ummah in Indonesia to Reduce the Number of Covid-19 Victims." Terbit di Asia Research Institute, September 2020.
3. "COVID-19 Tests Government Solidity and Middle Class Solidarity." Terbit di ISA Social Transformation and Sociology of Development, Edisi 09, Agustus 2020.
4. "Eid Al-Fitr and Religious Holidays: Challenges of Covid-19 in the Muslim World." terbit di The Sociological Review, edisi Solidarity and Care, 20 Mei 2020.
5. "Melawan Covid-19 Dengan Cinta." Terbit di Harian Bhirawa, 5 April 2020.

6. “Tak Ada (Salahnya) Madura Provinsi.” Terbit di Majalah SULUH MADURA, edisi II Oktober 2016.
7. “UMKM Berjaringan Eksis di Era MEA.” Terbit di Majalah ASEAN, edisi 12 Juni 2016.
8. “Rekonsiliasi Pasca Pilkada.” Terbit di Majalah Parlemen, edisi Januari 2016.

SPEAKERS

1. Pembicara pada acara “HYBRID WRITERPRENEUR dengan Tema “Mewujudkan Gerakan Literasi Progresif Melalui Pelatihan Menulis bagi Mahasiswa”. Diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPII) Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung, 24 Januari 2022.
2. Pembicara pada acara “Webinar Kebangsaan Memperingati Kemerdekaan ke 76 Republik Indonesia,” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sapeken Sumenep (Himpass) pada tanggal 18 Agustus 2021, pukul 09.00-12.00 secara daring, via zoom. Judul Materi yang disampaikan “Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh.”
3. Pembicara pada acara “Literasi Digital Nasional” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada 12 Juli 2021, pukul 09.00-12.00 WIB secara daring, via zoom meeting. Judul materi “Perubahan Interaksi Sosial pada Era Digital.”
4. Pembicara pada acara “Literasi Digital Nasional” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada Kamis, 10 Juni 2021, pukul 09.00-12.00 WIB secara daring, via zoom meeting. Judul materi “Mendeteksi Ancaman Keamanan Digital di Media Sosial.”
5. Pembicara pada Diskusi Publik dengan topik “Demokrasi Kita Mau Kemana?” yang digelar oleh Center for Indonesia Reform (CIR) bekerja sama dengan Data Sight pada tanggal 19 Juni 2021 secara daring via zoom. Judul Materi “Mengapa demokrasi mengutuk, dan bagaimana keluar dari kutukan demokrasi?”
6. Pembicara pada “Refleksi Indonesia Tahun 2020, Apakah Baik-Baik Saja?” Diselenggarakan oleh Center for Indonesian Reform (CIR), Sabtu, 26 Desember 2020.
7. Pembicara pada “Seminar Nasional Public Speaking.” Diselenggarakan oleh UKM Broadcasting Universitas Wiraraja, Sabtu, 26 Desember 2020.

8. Pembicara pada “Trans Integration in Lecture Series entitled, Ekonomi Islam Dalam Oligarki Politik, Mampukah Bertahan? Diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah UIN STS Jambi, Rabu, 18 November 2020.
9. Pembicara pada “Pelatihan Menjadi Jurnalis.” Diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang, 29-30 Oktober 2020.
10. Pembicara pada “Bedah Buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh RANAH Institut, Padang, Sumatera Barat, 16 Oktober 2020.
11. Pembicara “Ngobrol Inspiratif, Diskursus Politik, Demokrasi Terancam Dikorupsi.” Diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja, 12 September 2020.
12. Pembicara “Bedah Buku, Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD), 5 September 2020.
13. Pembicara “Diskusi Buku, Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh Center for Indonesia Reform (CIR), 29 Agustus 2020.
14. Pembicara “Mimbar Virtual, Politik Dinasti Antara Etis dan atau Hak Politik?” Diselenggarakan oleh Barisan.co, 28 Juli 2020.
15. Pembicara “Bedah Buku, Menegosiasi Ulang Indonesia.” Diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan FISIP Universitas Wiraraja, 16 Mei 2020.

PRESENTERS

1. Presenter pada Presenter The 1st International Conference on Democracy and Social Transformation (ICON-DEMOST) “HUMANITY AND THE CHANGING OF SOCIAL AND POLITICAL LANDSCAPE IN POST COVID-19 WORLD” yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, pada tanggal 15-16 September 2021, secara daring via zoom. Judul penelitian yang dipresentasikan adalah “Covid-19 and Money Politics in Direct Regional Head Elections.”
2. Presenter pada The Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS) 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung pada 30-31 Agustus 2021. Materi presentasi dengan judul “Poverty and the Excessive Role of Women Batik Craftsmen in Indonesia.”

3. Presenter pada Konferensi Internasional Dakwah dan Komunikasi yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo Semarang, pada tanggal 29 Juli 2021 secara daring, via zoom meeting. Materi presentasi dengan judul “Failure of State Communication in Countering Terrorism to Muslim and Islamic Mass Organizations”.
4. Presenter pada International Conference on Humanities and Social Sciences 2021 (ICHSoS) diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang yang digelar secara daring, pada tanggal 18-19 Juni 2021. Judul artikel yang dipresentasikan “Covid 19 and Medical Personnel in Social Choice Theory.”
5. Presenter pada “1st International Conference on Innovation in Science, Health and Technology (ICISHT), Clientelism Politics People’s Representative.” Diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo, 10-11 Desember 2020.
6. Presenter pada “Conference and Workshop, The Pandemic in Indonesia and the World: Reflections and the Way Forward.” Diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN STS Jambi Indonesia, pada 18-19 Desember 2020.
7. Presenter pada “The 3rd International Symposium on Religious Life (ISRL), Religious Life, Ethics and Human Dignity in the Disruptive Era.” Diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pada 2-5 Desember 2020.
8. Presenter pada “The 2020 Annual Conference Indonesian Association for Public Administration. Strengthening Governance Capacity and Public Administration Amidst Pandemic and New Normal Era.” Diselenggarakan oleh IAPA, 11 November 2020.
9. Presenter pada International Conference on Islam and Muslim Societies (ICONIS) 2019, Magister Program State of Islamic Studies (IAIN) Salatiga, Central Java, 6-7 August, 2019, by the title “Political Investors: Political Elit Oligarchy and Mastery of Regional Resources.”
10. Presenter pada International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries 2018, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 22-23 Oktober 2018.
11. Presenter pada 5th Asia-Pacific Education Conference (AECON 2018), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 13-14 Oktober 2018.

12. Presenter pada “The 1st International Conference on Islamic Studies (ICIS).” Diselenggarakan oleh Jurnal Al-Tahrir di IAIN Ponorogo, 10-12 Oktober 2018.
13. Presenter pada “Indonesia Development Forum 2018, Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur).” Diselenggarakan oleh Bappenas RI, di Jakarta 10-11 Juli 2018.
14. Presenter “Seminar Nasional, Perkembangan Terkini, Teori, Riset dan Praktik Administrasi Publik.” Diselenggarakan oleh FISIP Universitas Negeri Jember, 14-15 Februari 2018.
15. Presenter pada “International Islamic Research Forum (IIRF).” Diselenggarakan oleh IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada 27-28 November 2017.
16. Presenter pada “Seminar Internasional Studi Islam, Islam a Friendly Cultural Religion.” Diselenggarakan oleh IAIN Pamekasan, Jawa Timur, pada 21-22 Oktober 2017.
17. Presenter pada “International Conference on Sustainable Development Goals (2030): Challenges and Solutions.” Diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, pada 11-12 Agustus 2017.

REVIEWER

1. Environment, Development and Sustainability (ENVI) Journal, Scopus Q3, 2019-2020.
2. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, (Terakreditasi Nasional Sinta 5), 2020-sekarang.
3. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, STISIPOL Wira Bhakti Denpasar, Bali, Agustus 2021.
4. Jurnal E-Saintika, Undikma, Nusa Tenggara Barat, 2021-sekarang.
5. Jurnal Public Corner, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, 2018-2020.
6. Journal of Governance Innovation, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, April 2019-2021.
7. Journal of Community Service and Empowerment, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020-sekarang.
8. Tabuah, Rumah Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, 2020-sekarang.

EDITOR

1. Jurnal Public Corner, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja (Terakreditasi Nasional Sinta 5), 2020-sekarang.

PENGALAMAN PENELITIAN DIBIYAI

1. Ketua Penelitian “Pengembangan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep Perspektif Hexa Helix”, dibiayai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep tahun 2021, sebesar Rp 40.5000.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Outputnya rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang pariwisata.
2. Ketua penelitian, “Why Development Failed”, Penelitian Dosen Pemula (PDP) dibiayai oleh Kemenristek Dikti tahun 2019, sebesar Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Outputnya artikel yang diterbitkan di Jurnal Ekonomi Pembangunan terakreditasi nasional Sinta 3. Terbit tahun 2020.

PENGALAMAN PENGABDIAN DIBIYAI

1. Anggota pengabdian “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep” tahun 2020, bekerjasama dengan SKK Migas dan Kangean Energy Indonesia (KEI), sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Outnya artikel terbit di jurnal pengabdian Abdi Raja tahun 2021, dan buku pedoman ber-HKI.
2. Ketua pengabdian masyarakat “Menggagas Desa Digital di Wilayah Kepulauan Sapeken, tahun 2019, dengan skema dana internal Universitas Wiraraja sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Outnya program desa digital di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Selain itu artikel yang terbit di Journal of Community Service and Empowerment (JCSE) tahun 2020.
3. Anggota pengabdian masyarakat “Melindungi Hak Paten dan Kekayaan Intelektual di Desa Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep,” tahun 2019, dengan skema dana internal Universitas Wiraraja Sumenep sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Outputnya, artikel yang terbit di Journal of Community Service and Empowerment (JCSE) tahun 2021.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Direktur Center for Indonesian Reform (CIR), Desember 2020-sekarang
2. Penasihat Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) 2014-sekarang
3. Ketua Paguyuban Jurnalis Merah Putih (JMP) Kabupaten Sumenep 2011-2013
4. Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep 2013-2014.

PENGALAMANTUGAS

1. Pembina Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Wiraraja 2015-2020.
2. Tim seleksi (Perwakilan Kementerian Kominfo di daerah) Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode 2017-2021. Februari-Juli 2017.
3. Juri Anugerah Jurnalistik Migas (AJM) KEI-SKK Migas, 2016.

AWARD

1. Pemenang Hibah Penelitian Kompetisi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, tahun 2021 di bidang “Pembangunan Pariwisata.”
2. Best paper pada Indonesia Development Forum 2018 dengan topik “Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur), Bappenas, di Jakarta 10-11 Juli 2018.
3. Best Paper pada International Islamic Research Forum (IIRF) IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 27-28 November 2017.
4. Pemenang ketiga, Lomba Menulis Majalah Swa tentang CSR, tahun 2007

Sumenep, Juni 2022

Mohammad Hidayaturrahman



Riwayat Penulis 2

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap (dengan gelar) : Edy Purwanto., SE., M.Sc
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
NIP/NIK/Identitas lainnya : -
NIDN : 0703088805
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep, 03 Agustus 1988
E-mail : edypurwanto@wiraraja.ac.id
Nomor Telepon/HP : 085230718708
Alamat Kantor : Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM. 5
Patean Sumenep 69451
Nomor Telepon/Faks : (0328) 673399 / (0328) 673088

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. S1 Manajemen Universitas Wiraraja, 2009 - 2013
2. S2 Sains Manajemen Universitas Gadjah Mada, 2015 -2017

PENGALAMAN PEKERJAAN DAN KERJASAMA

1. Enumerator - Kementerian Keuangan + UGM, Sept 2016 - Okt 2016
2. Asisten - Asisten Penelitian Dosen UGM - Mei 2017 - Juli 2017
3. Dosen - Universitas Wiraraja Sumenep - 2017 - Sekarang
4. Kepala Seksi - Sentra HKI Universitas Wiraraja - 2019 Sekarang

PENGALAMAN KERJASAMA

1. SKK MIGAS - Program Pemberdayaan UMKM Kecamatan Ra'as - Tahun 2019
2. DISPARBUDPORA - Pendaftaran KIK Kebudayaan Kabupaten Sumenep - Tahun 2021

3. DISPARBUDPORA - Penyusunan draft Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep - Tahun 2021
4. DISPARBUDPORA - Penyusunan Buku kajian Keris dan Baju Adat Kabupaten Sumenep - Tahun 2021

PENGALAMAN PENELITIAN

1. *Pengaruh Country Of Origin, Word Of Mouth, Kualitas Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Beli* - **Dana Internal** Rp 6.500.000., - Tahun 2019
2. *Peningkatan Kinerja Usaha Melalui Kemampuan Manajemen Serta Inovasi* - **Dana Internal** Rp 6.500.00., - Tahun 2019
3. *COVID-19: Public Support Against The Government's Efforts To Handle And Economic Challenges* - **Dana Mandiri** - Tahun 2020
4. *Penerapan Theory Of Planned Behavior Dalam Memprediksi Niat Beli Produk Second Hand: Study Pada Konsumen Igeneration* - **Dana Dikti** Rp. 19.580.000., - Tahun 2020
5. *Consumer Purchase Intention Of Second-Hand Smartphone The Moderating Role Of Subjective Norms And Knowledge (Prosiding: IISDGS UBMG)* - **Dana Dikti** Rp. 19.580.000., - Tahun 2020
6. *Pengaruh Satisfaction, Brand Love Terhadap Brand Loyalty Dan Word of Mouth* - **Dana Mandiri** - Tahun 2021
7. *Mediating Role of Brand Love and Brand Trust: An Empirical Study of Cultural Brand in Indonesia* - **Dana Internal** Rp 6.500.000 - Tahun 2021
8. *Consumer Brand Loyalty in Brand Heritage Attractions: A Brand Equity Perspective* - **Dana Internal** Rp 6.500.000 - Tahun 2021
9. *Pengaruh Dimensi Equitas Merek Terhadap Kepercayaan Konsumen Di Kabupaten Sumenep* - **Dana Mandiri** - Tahun 2021

PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. *Penerapan Analisis Regresi Linier Berganda dalam Penyelesaian Skripsi Mahasiswa* - **Dana Internal** Rp 3.500.00., - Tahun 2019
2. *Initiate of Digital Village for Excellence Service in Archipelago Area* - **Dana Internal** Rp 3.500.00., - Tahun 2020
3. *Building and Protecting Business Through Intellectual Property Rights* - **Dana Internal** Rp 3.500.00., - Tahun 2020
4. *Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Ra'as Melalui Pendampingan Standarisasi Produk dan Kemasan* - **Dana External** Rp. 98.800.000., - Tahun 2021

5. *Pengolahan Ikan Berbasis Diversifikasi dan Standarisasi Produk* - **Dana Internal** Rp 3.500.00., - Tahun 2021
6. *Kedudukan Ekonomi Teknik Fermentasi dan Diversifikasi Produk Hasil Samping Pengolahan Minyak Kelapa di Pulau Pangerungan Besar* - **Dana Internal** Rp 3.500.00., - Tahun 2021
7. *Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Pelaku UMKM Masyarakat Kepulauan* - **Dana Internal** Rp 3.500.00., - Tahun 2021

PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL DI JURNAL

1. *Pengaruh Country Of Origin, Word Of Mouth, Kualitas Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Beli: Study Pada Kamera Digital Merek Jepang*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 4 No. 3 - Tahun 2019
2. *Peningkatan Kinerja Usaha Melalui Kemampuan Manajemen Serta Inovasi*, Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi) Vol. 7 No. 1 - Tahun 2019
3. *Penerapan Analisis Regresi Linier Berganda dalam Penyelesaian Skripsi Mahasiswa*, Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara, Vol. 3 No. 1 - Tahun 2019
4. *COVID-19: Public support against the government's efforts to handle and economic challenges*, Jurnal Inovasi Ekonomi Vol. 5 No. 2 - 2020
5. *Penerapan Theory Of Planned Behavior Dalam Memprediksi Niat Beli Produk Second Hand: Study Pada Konsumen Igeneration*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 5 No. 3 - Tahun 2020
6. *Consumer Purchase Intention Of Second-Hand Smartphone The Moderating Role Of Subjective Norms And Knowledge (Prosiding: IISDGs UBMG)*, Proceedings of International Interdisciplinary Conference on Sustainable Development Goals (IICSDGs) - Tahun 2020
7. *Initiate of Digital Village for Excellence Service in Archipelago Area*, Journal of Community Service and Empowerment, University of Muhammadiyah Malang Vol 1 No. 3 - Tahun 2020
8. *Building and Protecting Business Through Intellectual Property Rights*, Journal of Community Service and Empowerment University of Muhammadiyah Malang Vol 2 No. 1, - Tahun 2021
9. *Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Ra'as Melalui Pendampingan Standarisasi Produk dan Kemasan*, Jurnal ABDIRAJA Vol. 4 No. 1 - Tahun 2021

10. *Kedudukan Ekonomi Teknik Fermentasi dan Diversifikasi Produk Hasil Samping Pengolahan Minyak Kelapa di Pulau Pagerungan Besar*, Prosiding SNAPP, 527-535 - Tahun 2021
11. *Processed Fish Products Based on Diversification and Standardization*, Journal of Community Service and Empowerment University of Muhammadiyah Malang Vol. 3 No. 1 - Tahun 2022

PENGALAMAN NARASUMBER

1. Diklat mahasiswa baru himmaraja dengan topik “sejarah perkembangan teori ekonomi” di parsanga, sumenep - Tahun 2018
2. Narasumber dalam acara kajian ekonomi kerakyatan dilaksanakan komunitas pajarlaggu, - Tahun 2018
3. Narasumber rutin tiap minggu dalam kajian ekonomi oleh FMM - Tahun 2018
4. Kajian rutin mingguan bersama dengan komunitas COGITO - Tahun 2018
5. Moderator, seminar kepabeanan “ bea cukai dan ecommerce” - Tahun 2018
6. Moderator acara workshop riset kuantitatif bukan sekedar angka, - Tahun 2018
7. Acara student day fisip dengan topik “kewirausahaan” di lingkungan universitas wiraraja, - Tahun 2018
8. Juri di acara debat pekan institusi mahasiswa di universitas wiraraja, - Tahun 2018
9. Pemateri di acara kajian tentang ekonomi kerakyatan - Tahun 2019
10. Moderator dalam acara workshop kemigasan oleh pemkab sumenep, di hotel utami - Tahun 2019
11. Moderator di acara seminar nasional menjadi warga kelas dunia bersama wempi dyocta koto, - Tahun 2019
12. Moderator workshop & klinik proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hibah ristekdikti. - Tahun 2019
13. Moderator di workshop dan pelatihan multimedia “ mengasah kreatifitas dalam lingkup tak terbatas - Tahun 2019
14. Moderator workshop intreprenur “Bisnis Cerdas Generasi Milenial”, - Tahun 2019
15. Pemateri diklat mahasiswa baru himmaraja dengan topik “Ekonomi Digital” di lingkungan Universitas Wiraraja, Sumenep - Tahun 2019

16. Pamateri di acara latihan dasar kepemimpinan mahasiswa (LDKM) FEB Universitas Wiraraja - Tahun 2019
17. Menjadi pembimbing dalam acara kbm di ITB bandung - Tahun 2019
18. Mengikuti pelatihan Workshop HKI dan PATEN di Pamekasan UIM - Tahun 2019
19. Pelatihan tentang workshop pdp di UNISLA - Tahun 2019
20. Pemateri di acara ngobrol inspiratif dengan topik “Meneropong sifat apatis mahasiswa millenial terhadap literasi” - Tahun 2019
21. Pemateri di kegiatan pelatihan dan pendampingan UMKM kecamatan Ra’as “tentang pentingnya pemasaran” - Tahun 2019
22. Menjadi moderator di acara workshop hak kekayaan intelektual dengan tema “mpenguatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui hak kekayaan intelektual” - Tahun 2020
23. Menjadi Pembimbing Lomba Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) dengan total Pendanaan 16.000.0000., - Tahun 2020
24. Menjadi Pembimbing Lomba Kompetisi PHP2D dengan total Pendanaan 30.000.000., - Tahun 2021
25. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional Literasi Digital di Kabupaten Sumenep tanggal 21 Juni 2021
26. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional Literasi Digital di Kabupaten Sumenep tanggal 19 Juli 2021
27. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional Literasi Digital di Kabupaten Bangkalan tanggal 30 September 2021
28. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional Literasi Digital di Kabupaten Sumenep tanggal 04 Oktober 2021
29. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional Literasi Digital di Kabupaten Sumenep tanggal 21 Oktober 2021
30. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional Literasi Digital di Kabupaten Pamekasan tanggal 27 Oktober 2021
31. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional Literasi Digital di Kabupaten Bangkalan tanggal 04 November 2021
32. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Seminar Sekolah Pemasaran dengan tema “Inovasi Pemasaran di Era New Normal” tanggal 13 November 2021
33. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Seminar dengan tema “Menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan sebagai calon pelopor revolusi mental yang kreatif, inoovatif, dan kritis dalam kehidupan berorganisasi” tanggal 15 November 2021

34. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKNN-TM) tanggal 29 November 2021
35. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Upgrading Kepengurusan HMJA Universitas Wiraraja dengan tema Manajemen Organisasi tanggal 15 Februari 2022
36. Menjadi narasumber dalam acara seminar tentang how to be outstanding 29 Mei 2022

KARYA BUKU DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

1. Wiraraja mengabdikan : pemberdayaan perekonomian masyarakat menghadapi revolusi industri 4.0 Kecamatan Dungkek 2019 - Wiraraja Press, 978-623-93078-7-5 - Tahun 2021
2. Kajian Keris Sumenep - Disaparbudpora Kab. Sumenep, 978-623-95168-1-9 - Tahun 2021
3. Kajian Baju Adat Keraton Sumenep - Disaparbudpora Kab. Sumenep, 978-623-95168-2-6 - Tahun 2021
4. Intellectual Capital Measurement and Disclosure, Wiraraja Press, 978-623-5650-03-6 - Tahun 2022

PEROLEHAN HKI 5-10 TAHUN TERAKHIR

1. Penerapan Theory of Planned Behavior dalam Memprediksi Niat Beli Produk Second Hand : Study Pada Konsumen Igeneration - Tahun 2020 (Poster) - Nomor P/ID: 000217248
2. Panduan Penggunaan Aplikasi SIPP UNIJA 2020 / buku panduan atau petunjuk - Tahun 2021 (Buku Panduan /Petunjuk) - Nomor P/ID: 000235051
3. Pedoman Hak Kekayaan Intelektual 2020 - Tahun 2021 (Buku Panduan /Petunjuk) - Nomor P/ID: 000235052
4. Pedoman Penelitian Tahun 2019 - Tahun 2021 (Buku Panduan/ Petunjuk) - Nomor P/ID: 000235053
5. Pedoman Penelitian Tahun 2020 - Tahun 2021 (Buku Panduan/ Petunjuk) - Nomor P/ID: 000235054
6. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2019 - Tahun 2021 (Buku Panduan/Petunjuk) - Nomor P/ID: 000235057
7. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020 - Tahun 2021 (Buku Panduan/Petunjuk)- Nomor P/ID: 000235059

8. Selling Time Strategy Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Garam - Tahun 2021 (Poster) - Nomor P/ID: 000236008
9. Program Pemberdayaan UMKM Kecamatan Ra'as tahun 2019 - Tahun 2021 (Poster) - Nomor P/ID: 00236009
10. Laporan Akhir program Pemberdayaan UMKM kecamatan Ra'as 2019 - Tahun 2021 (Laporan Penelitian) - Nomor P/ID: 000236566
11. Produk Olahan Ikan - Tahun 2021 (Buku Panduan Atau Petunjuk) - Nomor P/ID: 000236686
12. Pedoman Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana UMKM Di KUB Adi Rasa Kecamatan Ra'as - 2021 (Buku Panduan Atau Petunjuk) - Nomor P/ID: 000237275
13. WIRARAJA MENGABDI: Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Kecamatan Dungkek 2019 - Tahun 2021 (Buku) - Nomor P/ID: 000256600

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian dosen internal Universitas Wiraraja Sumenep.

Sumenep, 4 Juni 2022

Yang Menyatakan



Edy Purwanto, SE., M.Sc
NIDN : 0703088805

